

**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH  
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

# **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**









**PETA PEMBINAAN INOVASI DAERAH  
WILAYAH KABUPATEN/KOTA**

# **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**







## **Peta Pembinaan Provinsi Kalimantan Selatan**

Jakarta: Bina Praja Press, 2022  
Copyright © BSKDN Kemendagri

Penyunting : Aji Nur Cahyo  
Desain sampul, grafis dan penata letak : Fajar Haramukti

Diterbitkan dan dicetak oleh Bina Praja Press  
Dikeluarkan oleh BSKDN Kementerian Dalam Negeri

ISBN : 978-623-88512-7-0

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



Alamat Redaksi:  
Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat  
pid@litbangkemendagri.com  
Telp. (021) 3913201

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## **TIM PENULIS**

**Pengarah:**

Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal

**Penanggungjawab:**

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri  
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri  
Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Dalam Negeri

**Penulis:**

1. Halumma Zulfia Fitri, S.Stat
2. Nuril Fikri Aulia, SE, M.Si

## **SAMBUTAN KEPALA BSKDN KEMENDAGRI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Era Revolusi 4.0 menuntut kesiapan aparatur yang andal, unggul untuk peningkatan daya saing bagi daerah. Buku ini, secara kompleks menggambarkan penerapan inovasi daerah. Kemajuan IPTEK menjadi salah satu landasan berpikir bagi daerah dalam mempersiapkan aktor inovasi daerah yang dapat bersaing di kancah Internasional. Pengembangan inovasi menjadi kekuatan untuk meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan potensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala nasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan program daya saing daerah.

Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Saya berbangga hati terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berinovasi. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Semangat daerahku, semangat bangsaku, maju daerahku. Salam Inovasi.

*Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kepala Badan Strategi  
Kebijakan Dalam Negeri  
Kemendagri

**Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd**



## **SAMBUTAN KEPALA PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH**

Saat ini kebutuhan inovasi menjadi indikator kinerja utama pemerintah daerah. Daerah dengan segala keterbatasannya, mampu menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk percepatan akselerasi pembangunan. Amati, Tiru dan Modifikasi menjadi sesuatu yang semestinya disikapi oleh daerah dalam berinovasi. Ide kreatif inovator memberikan ruang dan suasana baru bagi inovasi, apresiasi kami sangat tinggi terhadap adanya perubahan mindset. Inovasi bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, akan tetapi keharusan bagi daerah untuk berbuat seberapa besar dan seberapa banyak inovasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Data Indeks menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengawal inovasinya. Mulai dari kelengkapan data pendukung sebagai dokumentasi, publikasi inovasi, maupun pelibatan stakeholder antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota, OPD dengan OPD lainnya, maupun antara Masyarakat dengan ASN. Kolaborasi dan elaborasi menjadi cerminan bahwa inovasi daerah menjembatani koordinasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan inovasi daerah.

Keberanian dan tumbuh kembangnya inovasi daerah di tingkat provinsi/Kabupaten/Kota karena didasarkan pada beberapa hal. Pertama daerah sudah menyadari inovasi daerah tidak terkait /dengan diskresi, kedua, daerah menyadari bahwa adanya inovasi daerah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sepihak, ketiga, inovasi daerah menjadi indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, keempat, penilaian Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah membahas mengenai indeks inovasi daerah, kelima adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi ASN di daerah dengan memperhitungkan bobot perhitungan indeks inovasi daerah.

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman efektivitas pengembangan inovasi daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri. Buku ini khusus mengulas inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di daerah, tahun 2019, 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui penerapan indeks inovasi daerah tahun 2021. Dengan demikian, buku ini sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Memainkan peranan sebagai unsur pembinaan dan pengawasan dalam inovasi daerah. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri terhadap Provinsi/Kabupaten/Kota, namun juga bagaimana kementerian teknis turut andil di dalam mengembangkan inovasi.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah

**Drs. Aferi S. Fudail, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Daerah, menegaskan peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri dalam melakukan pembinaan inovasi daerah melalui Indeks Inovasi Daerah (IID), penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA), dengan tujuan untuk melihat tingkat daya saing daerah berdasarkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai tahun pembuktian bagi daerah. Sebanyak 25.124 inovasi daerah yang termuat dalam IID dilakukan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan meramaikan inovasi dengan dominasi dari berbagai aspek. Aspek Pelayanan publik sebanyak 14.580 inovasi, dilanjutkan dengan inovasi bentuk lainnya sebanyak 6.668 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan sebanyak 3.606 inovasi terdiri atas : (1) Kategori Provinsi Terinovatif 5 Pemda Provinsi; (2) Kategori Kabupaten Terinovatif 10 Pemda Kabupaten; (3) Kategori Kota Terinovatif 10 Pemda Kota; (4) Kategori Daerah Tertinggal Terinovatif 3 Pemda Kabupaten; (5) Kategori Daerah Perbatasan Terinovatif 3 Pemda Kabupaten.

Buku ini sebagai sarana edukasi dan literasi yang dapat menciptakan budaya inovasi yang kuat pada skala internasional. Dengan terbitnya buku ini dapat menjadi referensi Kementerian/ Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan program daya saing daerah. Membangkitkan semangat berinovasi menjadi harapan terbesar dalam buku ini. Kreasi dan Karsa inovasi daerah menjadi ciri khas dan keunikan tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada. Inilah yang menjadikan inovasi daerah kembali ke marwahnyanya. Inovasi daerah bukan lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang sulit dan rumit, tetapi dapat dilihat sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

Kami mengharapkan buku ini dapat menguatkan implementasi inovasi daerah secara masif. Berkat dukungan dari semua pihak untuk membaca, menjadikan buku ini sebagai panduan bagi daerah untuk mengembangkan ide dan gagasan berdasarkan kemanfaatan, efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan.

Tim Penulis



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG	1
B. MANFAAT	2
C. TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2

## **BAB II INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN DAN KLASTER KOTA**

A. KABUPATEN BALANGAN	5
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	5
Aspek Satuan Inovasi Daerah	6
B. KABUPATEN BANJAR	11
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	12
Aspek Satuan Inovasi Daerah	13
C. KABUPATEN BARITO KUALA	20
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	20
Aspek Satuan Inovasi Daerah	21
D. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	29
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	29
Aspek Satuan Inovasi Daerah	30
E. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	38
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	39
Aspek Satuan Inovasi Daerah	40
F. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	45
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	45
Aspek Satuan Inovasi Daerah	46
G. KABUPATEN KOTA BARU	51
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	51
Aspek Satuan Inovasi Daerah	52
H. KABUPATEN TABALONG	58
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	59
Aspek Satuan Inovasi Daerah	60
I. KABUPATEN TANAH BUMBU	67
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	68
Aspek Satuan Inovasi Daerah	69
J. KABUPATEN TANAH LAUT	74
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	74
Aspek Satuan Inovasi Daerah	75

K. KABUPATEN TAPIN	81
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	81
Aspek Satuan Inovasi Daerah	82
L. KABUPATEN BANJARBARU	87
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	88
Aspek Satuan Inovasi Daerah	89
M. KOTA BANJARMASIN	95
Aspek Satuan Pemerintah Daerah	95
Aspek Satuan Inovasi Daerah	96
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>104</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 01. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Balangan
- Gambar 02. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Balangan
- Gambar 03. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Balangan
- Gambar 04. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Balangan
- Gambar 05. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Balangan
- Gambar 06. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Balangan
- Gambar 07. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Balangan
- Gambar 08. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Balangan
- Gambar 09. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Balangan
- Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan
- Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah
- Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banjar
- Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banjar
- Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Banjar
- Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Banjar
- Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Banjar
- Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Banjar
- Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Banjar
- Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Banjar
- Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Banjar

Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar

Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Barito Kuala

Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiasi/Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Barito Kuala

Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala

Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Gambar 40. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 41. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kota Baru

Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator/Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Kota Baru

Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kota Baru

Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tabalong

Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tabalong

Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tabalong

Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tabalong

Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tabalong

Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong

Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tanah Laut

Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanah Laut

Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tapin

Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tapin

Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tapin

Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tapin

Gambar 115. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tapin

Gambar 116. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tapin



Gambar 117. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tapin

Gambar 118. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tapin

Gambar 119. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tapin

Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 121. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjarbaru

Gambar 122. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjarbaru

Gambar 123. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Banjarbaru

Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banjarbaru

Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banjarbaru

Gambar 126. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banjarbaru

Gambar 127. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Banjarbaru

Gambar 128. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Banjarbaru

Gambar 129. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Banjarbaru

Gambar 130. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarbaru

Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 132. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjarbaru

Gambar 133. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjarmasin

Gambar 134. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Banjarmasin

Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banjarmasin

Gambar 136. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banjarmasin

Gambar 137. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banjarmasin

Gambar 138. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Banjarmasin

Gambar 139. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Banjarmasin

Gambar 140. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Banjarmasin

Gambar 141. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin

Gambar 142. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah
- Tabel 2. 1. Daftar Inovasi Kabupaten Balangan beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 2. Daftar Inovasi Kabupaten Banjar beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 3. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Kuala beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 4. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 5. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 6. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 7. Daftar Inovasi Kabupaten Kota Baru beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 8. Daftar Inovasi Kabupaten Tabalong beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 9. Daftar Inovasi Kabupaten Tanah Bumbu beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 10. Daftar Inovasi Kabupaten Tanah Laut beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 11. Daftar Inovasi Kabupaten Tapin beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 12. Daftar Inovasi Kota Banjarbaru beserta Skor Kematangannya
- Tabel 2. 13. Daftar Inovasi Kota Banjarmasin beserta Skor Kematangannya
- Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator Pada satuan Inovasi Daerah IID Tahun 2021
- Tabel 3. 2 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan Berdasarkan
- Tabel 3. 3 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 4 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 5 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 6 Optimalisasi inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan
- Tabel 3. 7 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 8 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan
- Tabel 3. 9 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan
- Tabel 3. 10 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 11 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Kota Baru Berdasarkan
- Tabel 3. 12 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 13 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan
- Tabel 3. 14 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan
- Tabel 3. 15 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 16 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Tapin Berdasarkan
- Tabel 3. 17 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 18 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Banjarbaru Berdasarkan
- Tabel 3. 19 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung
- Tabel 3. 20 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Banjarmasin Berdasarkan
- Tabel 3. 21 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung

The Page Left is Blank





# ***BAB I***

---

## ***PENDAHULUAN***



## A. LATAR BELAKANG

Inovasi Daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pelaksanaannya diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mendorong optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan konteks dan dinamika di masing-masing daerah. Upaya tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan amanat regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri telah menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Penilaian inovasi daerah didasarkan pada laporan Kepala Daerah atas pelaksanaan inovasi daerah bersangkutan melalui mekanisme pengisian data indeks inovasi daerah. Secara general, penilaian inovasi daerah melalui empat (4) tahapan yaitu: Tahap Penjaringan, Tahap Pengukuran, Tahap Presentasi Kepala Daerah dan Tahap Peninjauan Lapangan. Sedangkan untuk pelaksanaan *Innovative Government Award* (IGA), kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2017 dan mulai tahun 2018 penilaian IGA diperkuat dengan aplikasi Indeks Inovasi Daerah.

Setiap tahun, Kementerian Dalam Negeri melakukan penjaringan atas berbagai macam data inovasi yang pemerintah daerah lakukan, baik itu berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan kewenangan daerah. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Dalam Negeri telah menghimpun sebanyak 25.124 inovasi yang dilaporkan oleh 519 pemda melalui aplikasi indeks inovasi daerah pada laman [indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id](https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id). Inovasi tersebut mengalami eskalasi yang tajam dari tahun tahun sebelumnya, yaitu: pada tahun 2018 lalu diikuti oleh 188 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 3.718, tahun 2019 diikuti oleh 260 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 8.016 dan di tahun 2020 diikuti oleh 484 pemerintah daerah dengan jumlah inovasi 17.779. Kenaikan jumlah inovasi tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasional, dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan publik yang lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*) baik melalui inovasi digital maupun inovasi non-digital.

Adapun penilaian indeks inovasi daerah tahun 2021 lalu diperoleh hasil: 37 Pemerintah Daerah berkategori Sangat Inovatif, 316 Pemerintah Daerah berkategori Inovatif, 166 Pemerintah Daerah berkategori Kurang Inovatif dan 23 Pemerintah Daerah berkategori Tidak Dapat Dinilai. Selanjutnya Penerima Penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri terhadap daerah dengan kategori 5 Provinsi Terinovatif, 10 Kabupaten Terinovatif, 10 Kota Terinovatif, 3 Daerah Perbatasan Terinovatif dan 3 Daerah Tertinggal Terinovatif. Sementara khusus untuk klaster daerah kabupaten/kota terinovatif kategori Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejauh ini belum dapat diberikan mengingat rendahnya partisipasi pelaporan inovasi daerah di wilayah tersebut.

Penerima penghargaan *Innovative Government Award* merupakan daerah yang tidak hanya mampu menghasilkan inovasi dari sisi kuantitas namun juga kualitas (kematangan inovasi) serta memiliki komitmen kuat dalam mendorong budaya inovasi di daerahnya. Hal tersebut direpresentasikan dengan upaya pelembagaan inovasi dan kemampuan mensinergikan antara

kepemimpinan, sumber daya, kemampuan berkolaborasi dalam mencapai kemanfaatan inovasi untuk masyarakat.

Hadirnya inovasi tersebut tentu memperkuat simpul-simpul pertumbuhan nasional, sebab inovasi pastinya diciptakan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan seperti isu kemiskinan, kesenjangan wilayah, defisit infrastruktur, keterbatasan anggaran dan sebagainya. Adanya inovasi akan menopang peningkatan daya saing daerah, yang pada akhirnya berakumulasi pada naiknya daya saing nasional. Menurut laporan survey *World Competitiveness Yearbook (WCY) 2021*, daya saing Indonesia naik menjadi peringkat 37 dari sebelumnya peringkat 40 di tahun sebelumnya. Jika ditelisik lebih dalam, dari 4 komponen utama penilaian survei (kondisi perekonomian, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, infrastruktur), komponen efisiensi pemerintahan yang menyumbang tertinggi peningkatan daya saing. Ini menunjukkan efisiensi yang kita lakukan sudah ke arah yang tepat dan berdampak cukup signifikan.

Pemerintah daerah perlu berstrategi secara cermat agar inovasi yang dihadirkan dapat memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Inovasi daerah memerlukan dukungan dari berbagai aspek, seperti aspek kepemimpinan, kapasitas dan kompetensi kelembagaan, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung budaya organisasi yang tangguh, adaptif dan fleksibel. Pemerintah daerah dapat menempuh berbagai strategi dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya tersebut mengacu pada pengaturan organisasi, manajemen data, dan jejaring atau kemitraan strategis. Untuk mendorong kinerja inovasi daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah yang belum mendapatkan penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah; dan pemerintah daerah yang telah menerima penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dengan melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui buku pembinaan inovasi daerah.

## **B. MANFAAT**

Buku ini memberikan gambaran kinerja inovasi daerah di kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan inovasi daerah baik oleh provinsi maupun kementerian/lembaga.

## **C. TUJUAN**

Penyusunan Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah tahun 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan :

- a. Gambaran kinerja inovasi daerah;
- b. Bahan evaluasi kebijakan pembinaan inovasi daerah
- c. Bahan perumusan dan pengembangan kebijakan pembinaan inovasi daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Buku Peta Pembinaan Inovasi Daerah merupakan rangkuman dari perkembangan kinerja inovasi daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia pada periode penilaian Indeks Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021. Buku ini secara khusus mengulas inovasi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 dan 2020 dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Adapun pemerintah kabupaten/kota yang akan dideskripsikan dalam buku ini adalah Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai



Utara, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin.

Informasi capaian kinerja inovasi di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan, diharapkan dapat memberi gambaran perkembangan kekuatan dan kelemahan inovasi di wilayah tersebut baik dari Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) maupun Aspek Satuan Inovasi Daerah (SID). Indeks Inovasi Daerah terdiri dari 2 aspek, 8 variabel dan 36 indikator. Aspek SPD memuat 3 variabel yaitu variabel Institusi, variabel Sumber Daya Manusia dan Jumlah Inovasi, serta variabel Ekosistem Inovasi dan Kajian. SPD terdiri atas 16 indikator yang merupakan indikator *output* dan *outcome*. Adapun Aspek SID terdiri dari 5 variabel yaitu variabel Infrastruktur, variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, variabel Kecepatan Bisnis Proses, variabel Kecanggihan Produk, serta variabel Hasil Kreatif. Pada aspek SID tersebut mencakup 20 indikator yang merupakan indikator input dan proses. Indikator input dan proses merupakan indikator pengaktif inovasi di suatu daerah. Tabel berikut merupakan daftar indikator Indeks Inovasi Daerah sesuai dengan variabel dan aspek masing-masing.

Tabel 1. Daftar Indikator Indeks Inovasi Daerah

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
SPD	Institusi	Visi Misi
		Tingkat Lembaga Kelitbangan
		APBD Tepat Waktu
		Kualitas Peningkatan Perizinan
		Jumlah Pendapatan Perkapita
		Tingkat Pengangguran Terbuka
		Jumlah Peningkatan Investasi
		Jumlah Peningkatan PAD
		Opini BPK
		Nilai Capaian Lakip
		Penurunan Angka Kemiskinan
	Jumlah Inovasi, Ekosistem inovasi, dan Kajian	Jumlah Inovasi Daerah
		Jumlah penelitian atau kajian yang mendukung Inovasi
Roadmap SiDA		
SDM	Nilai IPM	
	Penghargaan Bagi Inovator	
SID	Hasil Kreatif	Kemanfaatan Inovasi
		Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
		Kualitas Inovasi Daerah
	Infrastruktur	Regulasi Inovasi Daerah
		Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah
		Dukungan Anggaran
		Penggunaan IT
		Bimtek Inovasi
		Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
	Kecanggihan Produk	Replikasi
		Online Sistem
		Kecepatan Inovasi
	Kecepatan Bisnis	Pedoman Teknis

ASPEK	VARIABEL	INDIKATOR
	Proses	Kemudahan Informasi Layanan
		Penyelesaian Layanan Pengaduan
		Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan
	Output Pengetahuan dan Teknologi	Jejaring Inovasi
		Pelaksana Inovasi Daerah
		Keterlibatan aktor inovasi
		Sosialisasi Inovasi Daerah



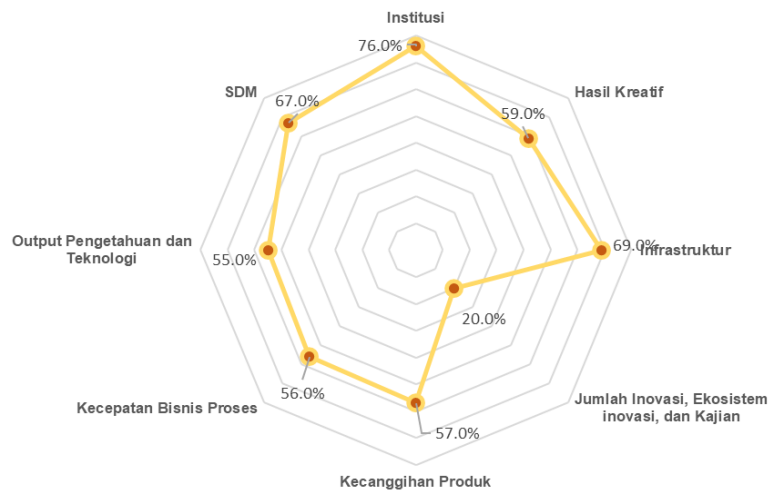
# **BAB II**

---

**INOVASI DAERAH KLASTER KABUPATEN  
DAN KLASTER KOTA**



## A. KABUPATEN BALANGAN



Gambar 1. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Balangan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Balangan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 76.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 20.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 2. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Balangan

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Balangan pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.13% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.21% dengan

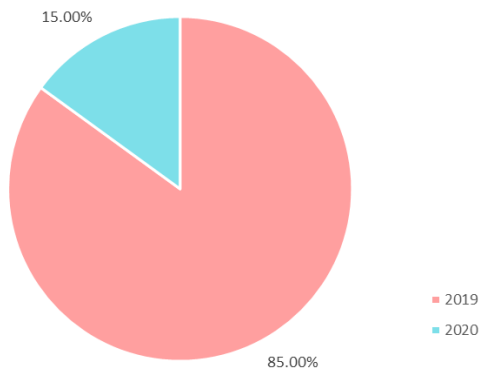


perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.43% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Balangan menunjukkan peningkatan pada angka 30.53% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 4.43% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 636.54% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Balangan mengalami penurunan sebesar 0.95% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

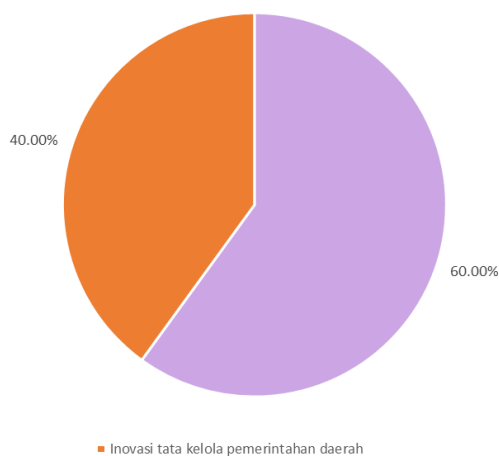
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 3. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Balangan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Balangan telah diterapkan sejak tahun 2019 yaitu sebesar 85%, sedangkan sisanya sebesar 15% diterapkan di tahun 2020.

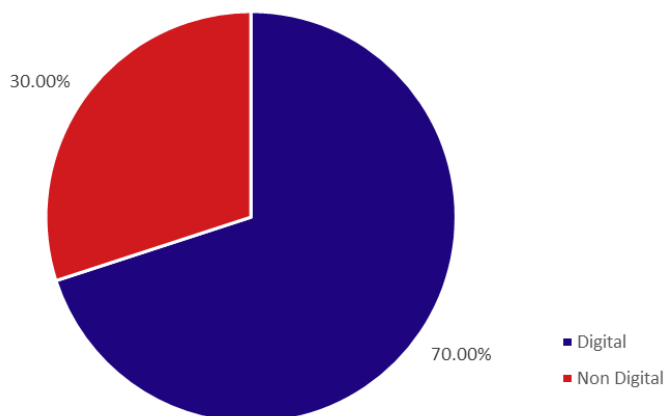
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 4. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Balangan

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah. Sedangkan tidak ada sama sekali inovasi kategori lainnya.

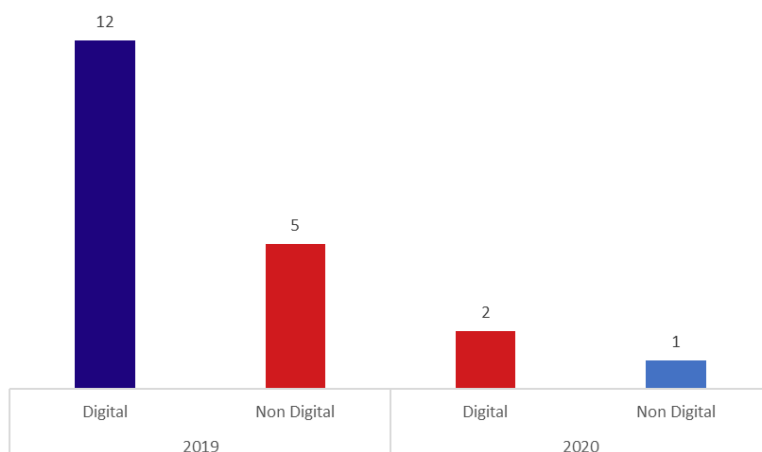
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 5. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Balangan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 70% yang dilaporkan Kabupaten Balangan merupakan inovasi digital, kemudian sisanya sebesar 30% inovasi merupakan inovasi non digital, dan tidak ada yang dilaporkan berjenis inovasi teknologi.

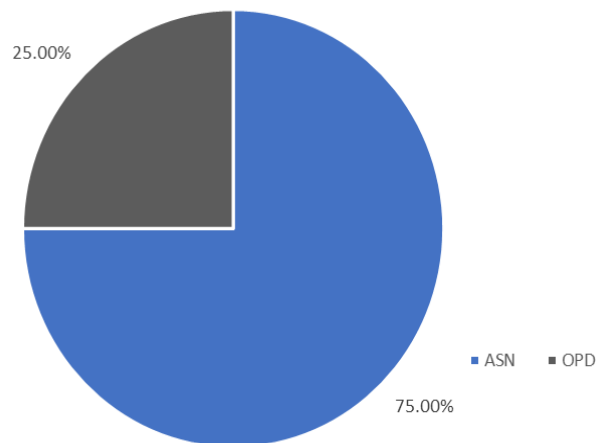
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



Gambar 6. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Balangan

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 12 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 2 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 5 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 1 inovasi.

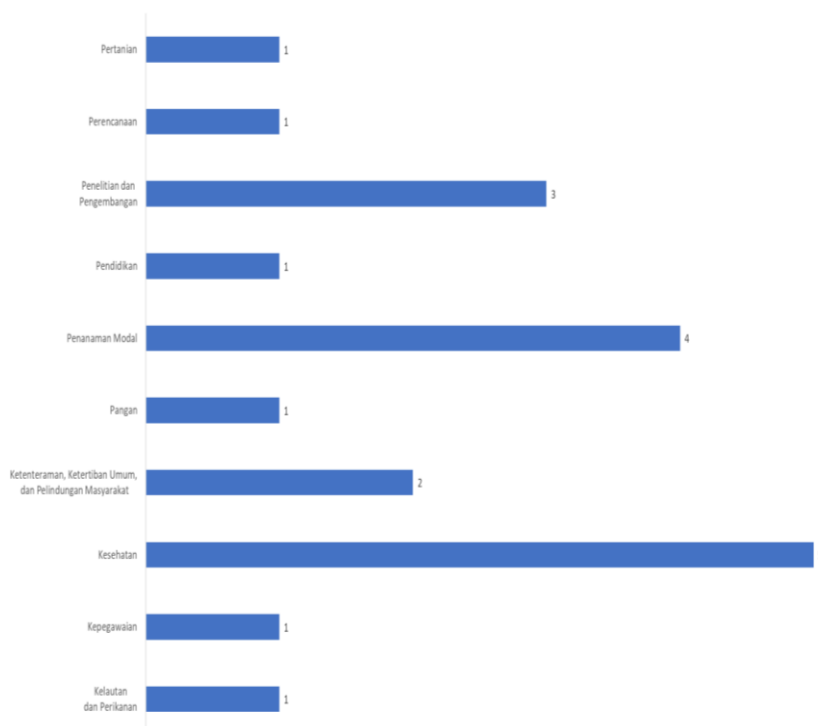
### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 7. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Balangan

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Balangan pada tahun 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah, yaitu sebesar 75% sementara sisanya sebesar 25% lainnya diinisiasi oleh ASN. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

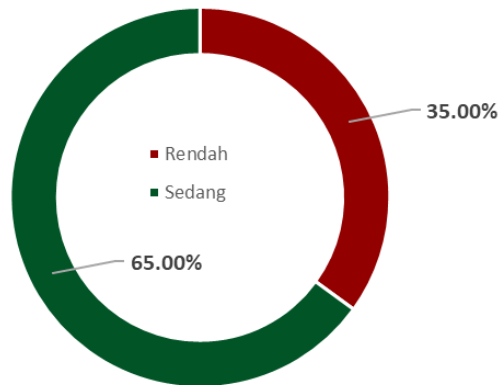


Gambar 8. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Balangan

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Balangan yaitu pada urusan pertanian 1 inovasi, pada urusan perencanaan 1 inovasi, pada urusan penelitian dan pengembangan 3 inovasi,

urusan pendidikan 1 inovasi, urusan penanaman modal 4 inovasi, urusan pangan 1 inovasi, urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 2 inovasi, urusan kesehatan 5 inovasi, urusan kepegawaian 1 inovasi, dan urusan kelautan dan perikanan dengan 1 inovasi.

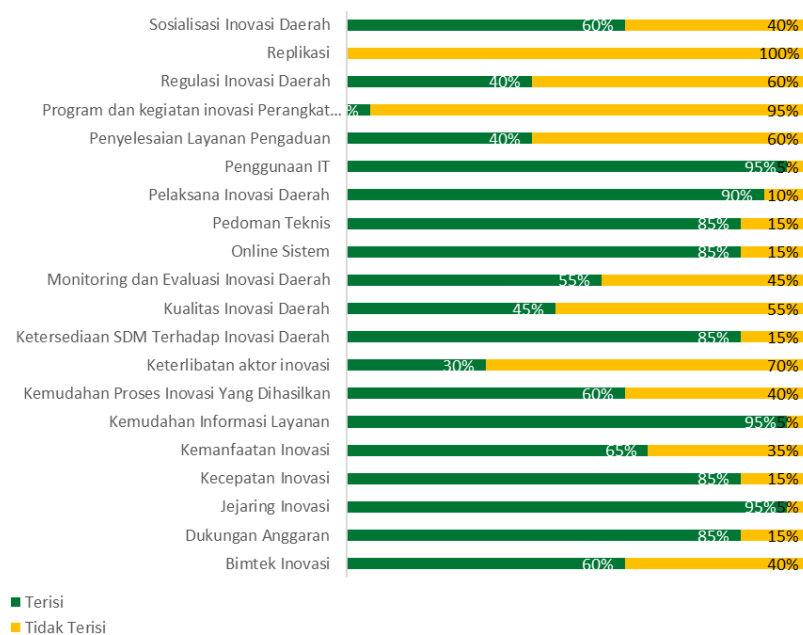
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 9. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Balangan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sebesar 65% dari total inovasi. Sedangkan untuk sisanya sebesar 35% berada di skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

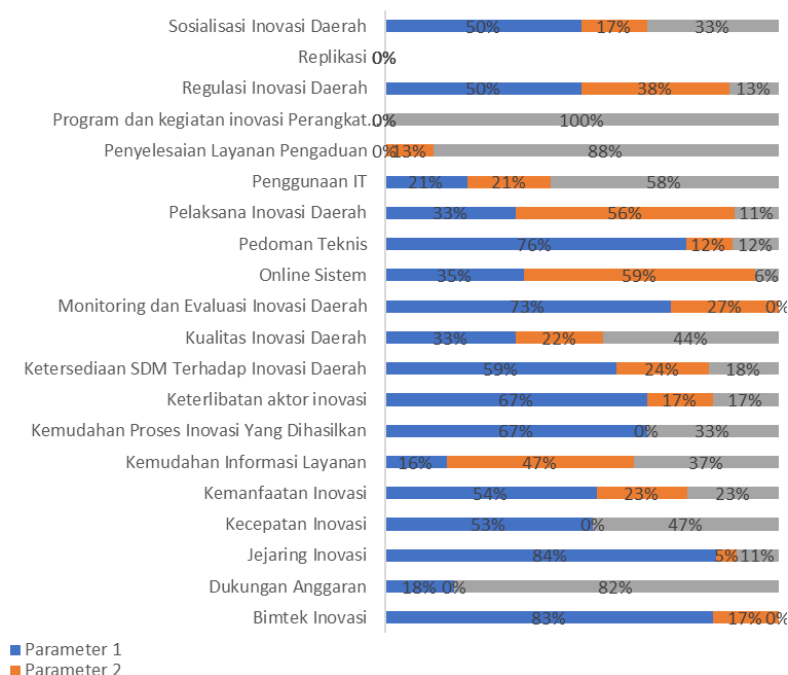
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 10. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Balangan

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Balangan, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 37% sedangkan 63% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator Replikasi adalah satu-satunya indikator yang seluruhnya tidak terisi, sedangkan untuk indikator Penggunaan IT, kemudahan informasi layanan dan jejaring inovasi yang memiliki persentase tingkat keterisian data pendukung paling tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya yaitu sebesar 95%.

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 11. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan kegiatan inovasi perangkat daerah sebesar 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Online sistem sebesar 59%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Jejaring inovasi sebesar 84% artinya 84% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi.

#### j. Daftar Inovasi Kabupaten Balangan beserta Skor Kematangannya

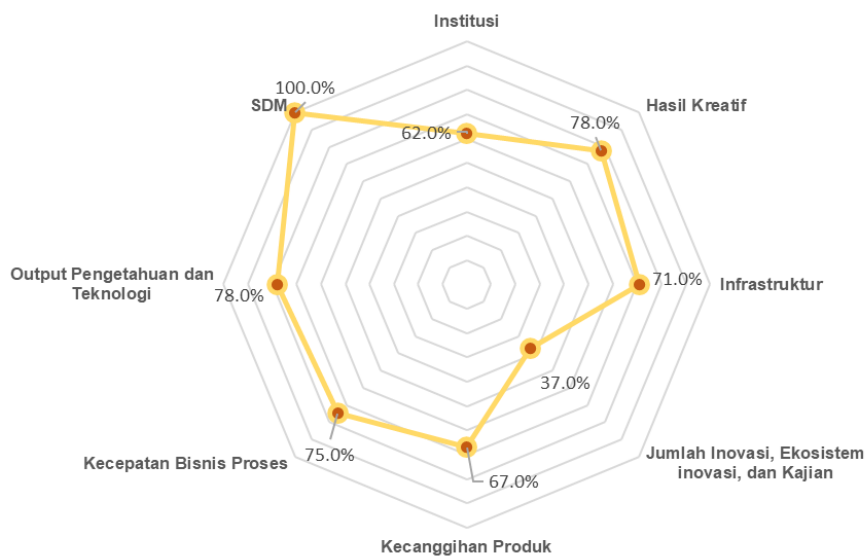
Tabel 2. 1. Daftar Inovasi Kabupaten Balangan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
OVOD (One Village One Data)	78
Si GitAr (Dokumentasi Digital Arsiparis)	82
Siduan Online (Sistem Pengaduan Online)	66
SIMANIS (Sistem Informasi Melayani Izin Dengan Segera)	44
Si Suka Meli (Sistem Survey Kepuasan Masyarakat secara	58



Online)	
E-BKU (Buku Kas Umum Elektronik)	39
E-Survey Kepuasan Masyarakat BLUD RSUD Balangan	42
MAKAN APEL (Mri Kita Nyalakan Alarm Persalinan)	51
KADUT MAIL (Kartu Data Umum Terpantau Lima Imunisasi Lengkap)	55
(KALITA) Kartu Aktif Balita	71
SIJAKA (SISTEM JADUAL AGENDA KELITBANGAN)	79
GITA MUDA PRAJA	81
Pelestarian Potensi Perikanan Tangkap Kabupaten Balangan	74
E-Ketapang (Elektronik Ketahanan Pangan) Sistem Monitoring Perkembangan Kondisi Pangan Di Kabupaten Balangan	45
DIVERSIFIKASI PERKEBUNAN KARET DENGAN POLA TANAM GANDA	32
Gerakan Satu Untuk Selamanya	35
SEPEDA BARU (SISTEM PENJARINGAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TERPADU)	64
KOMPOR PANGGUL (KOMODITAS PORANG PANGAN UNGGUL)	67
SIPANA (SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA)	59
Sistem Aplikasi Mutasi (SAMUT)	49

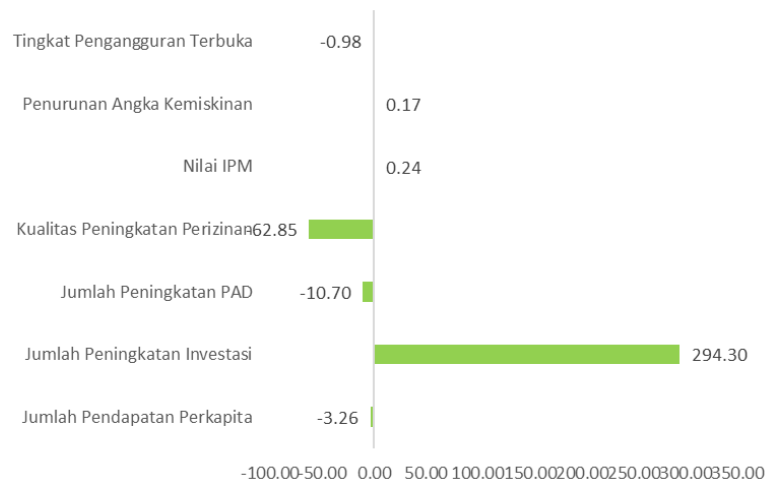
## B. KABUPATEN BANJAR



Gambar 12. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banjar

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Banjar memiliki skor tertinggi pada variabel Sumber Daya Manusia, yaitu 100.0%. Artinya secara umum seluruh indikator - indikator pada variabel Sumber Daya Manusia sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 37.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



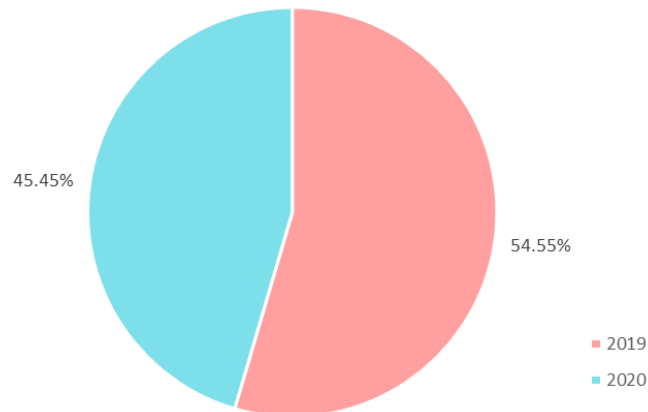
Gambar 13. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banjarnegara

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Banjarnegara pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.98% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.17% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.24% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Banjarnegara menunjukkan penurunan pada angka 62.85% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 10.70% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 294.30% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan sebesar 3.26% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

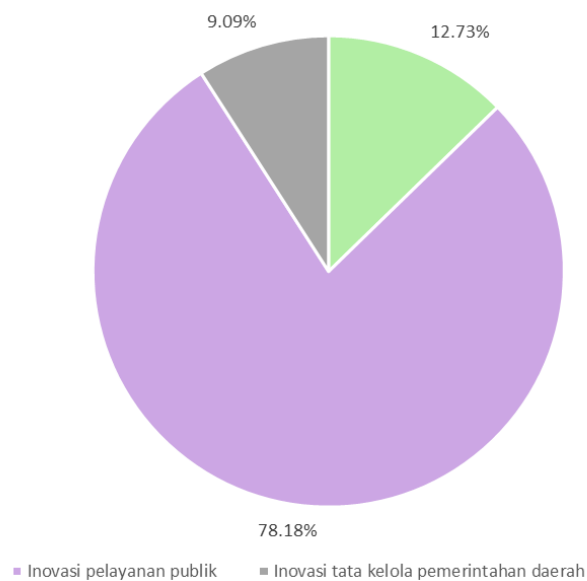
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 14. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Banjarnegara telah diterapkan sejak tahun 2019 sebesar 54.55% dan sisanya tahun 2020 sebesar 45.45% inovasi.

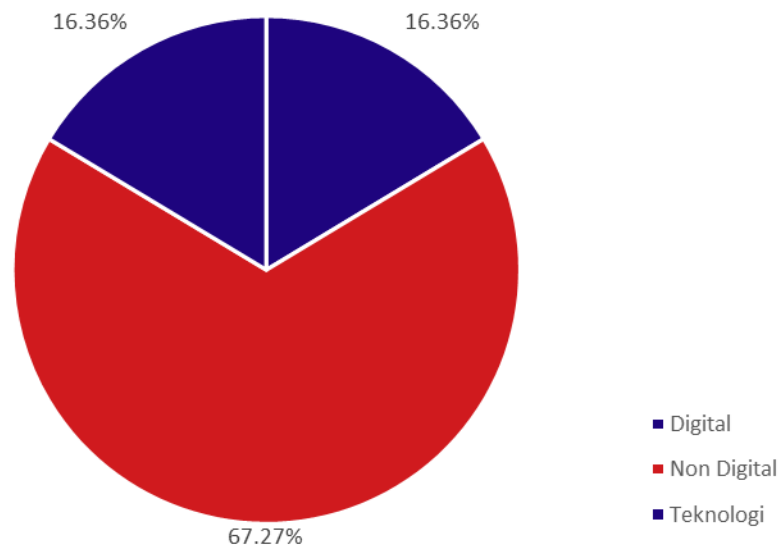
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 15. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 78.18%, kemudian 12.73% merupakan inovasi lainnya dan sisanya sebesar 9.09% adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

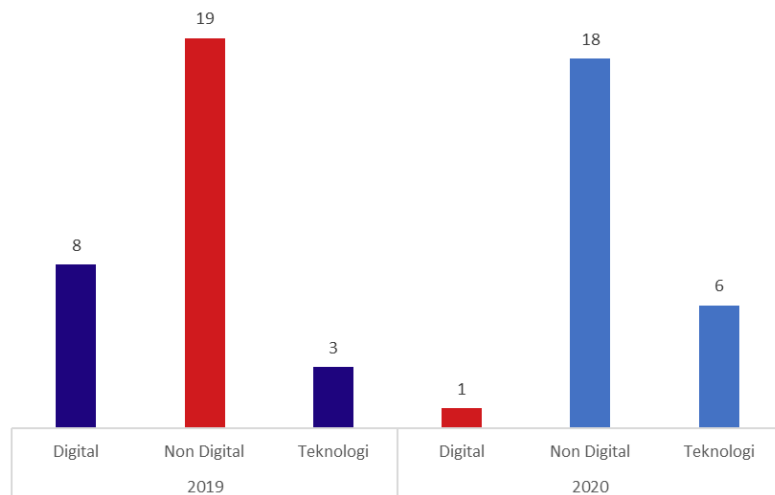
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Banjar

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 67.27% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Banjar merupakan inovasi non digital, 16.36% inovasi digital dan 16.36% merupakan inovasi teknologi.

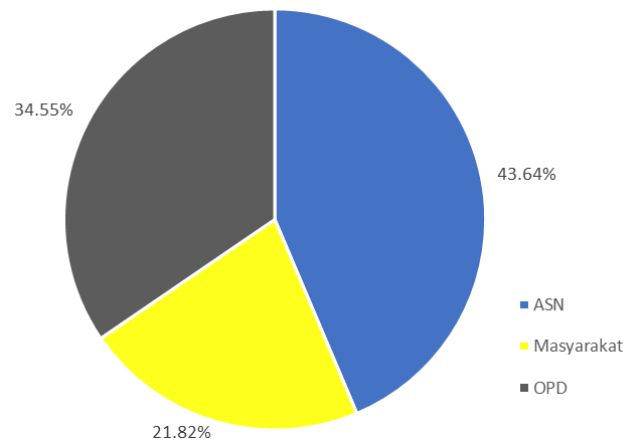
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 17. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Banjar

Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 8 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 1 inovasi. Inovasi non digital mengalami sedikit penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 19 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 18 inovasi. Sedangkan inovasi teknologi dari berjumlah 3 pada 2019 naik menjadi 6 pada tahun 2020.

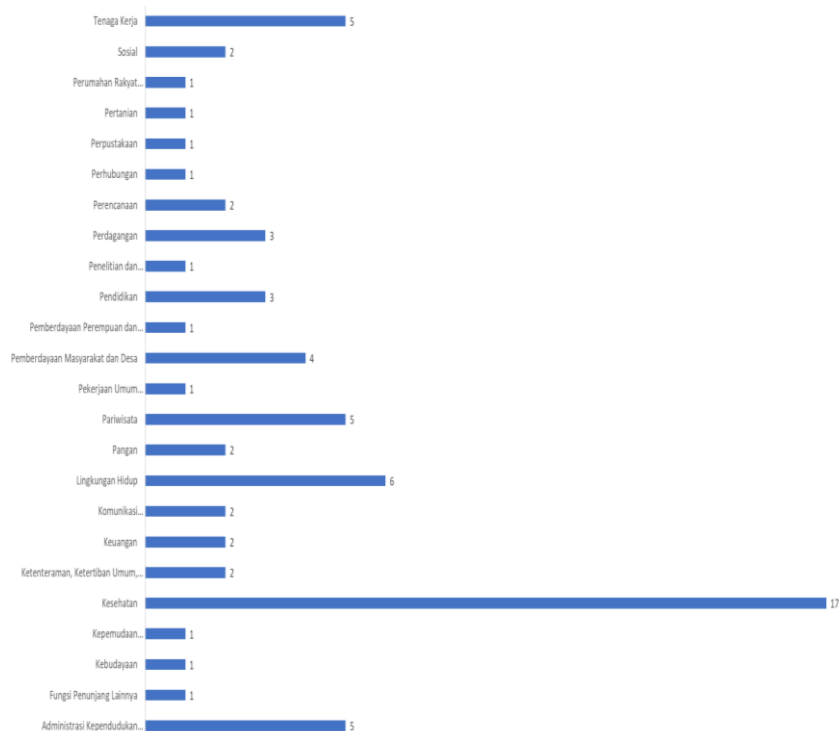
### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 18. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Banjar

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Banjar pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sebesar 43.64% inovasi sementara sebesar 34.55% diinisiasi oleh OPD dan sebesar 21.82% diinisiasi oleh masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD dan Kepala Daerah belum dilaporkan di tahun 2021.

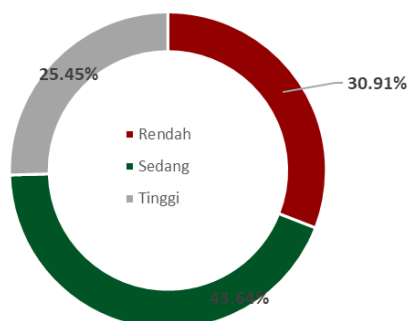
### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 19. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Banjar

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Banjar berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 17 inovasi dan 6 urusan lingkungan hidup.

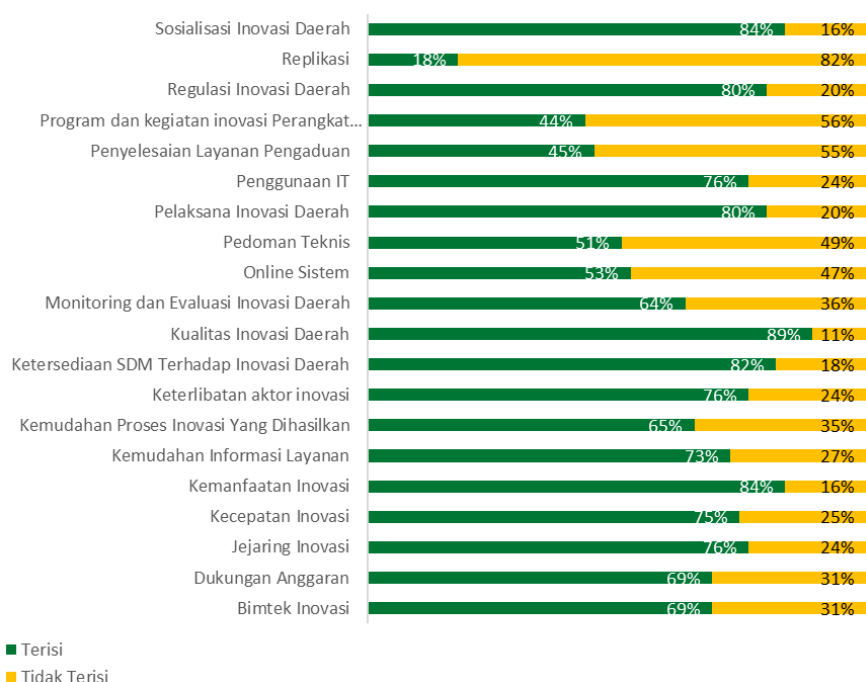
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 20. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Banjar

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sebesar 43.64% dari total inovasi. Sedangkan untuk kategori rendah sebesar 30.91% dan sisanya sebesar 25.45% berada di skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

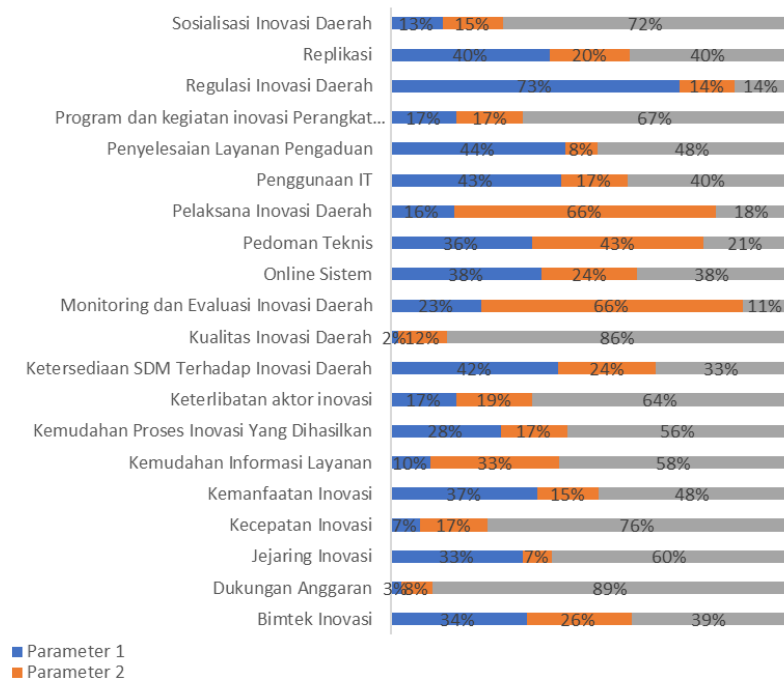


Gambar 21. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar



Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Banjar, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 32.36% sedangkan 67.64% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator kualitas inovasi daerah menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 89% sedangkan indikator replikasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 82%.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 22. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah dukungan anggaran sebesar 89%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah pelaksana inovasi daerah dan monitoring dan evaluasi inovasi daerah sebesar 66%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator regulasi inovasi daerah sebesar 73% artinya 73% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi.

### j. Daftar Inovasi Kabupaten Banjar beserta Skor Kematangannya

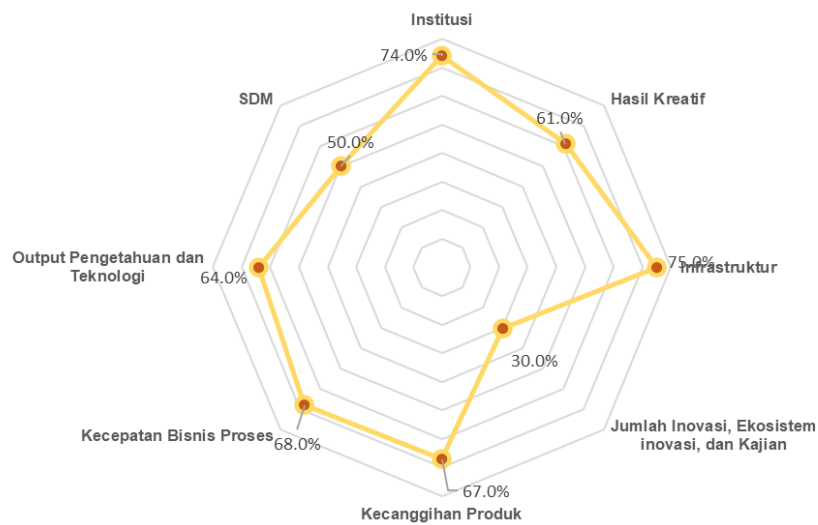
Tabel 2. 2. Daftar Inovasi Kabupaten Banjar beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Inovasi Hotel aman nyaman bebas Covid19	15
Makan Nyaman bersama Raja Banjar	15
Pasar Batuah Martapura Bebas Covid	15
Mal Pelayanan Publik Bebas Covid19	15
Transportasi Air Bebas Gair	15
Sistem Keren Pasar Modern anti Covid-19	15

Ke Pasar Terapung Lok Baintan Tanpa Rasa Takutan	15
DAGO (Daftar Gaji Online)	19
GEBRAK PARIWISATA BANJAR (Gerakan Bersama Memviralkan Pariwisata Kabupaten Banjar)	21
OM TOILET OM (Program Pengurangan Jamban Terapung)	37
Mahimungi, membangun partisipasi	6
Loket Terpadu Administrasi Kependudukan All In One " Bungas Hati "	25
Pemberdayaan Karang Taruna Purna Praja Ber BMW (Berinovasi, Mandiri, Wirausaha)	80
SIMANTAB (Sistem Informasi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban)	6
INTAN BAKILAU	116
KLINIK PERENCANAAN	107
PELAYANAN TERPADU "INTAN" BANJAR (ITSBAT NIKAH DAPAT BUKU NIKAH, AKTA KELAHIRAN)	110
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI KEGIATAN TAPILA (TANGGUNG JAWAB PIHAK LAKI-LAKI) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GAMBUT	75
IVA MOBILE (INSPEKSI VISUAL DENGAN ASAM ASETAT)	89
LAPAT PAK RT UPT PUSKESMAS GAMBUT(LAKUKAN PEMBINAAN KEPADA MASYARAKAT PADA KELUARGA DAN KELOMPOK RISIKO TINGGI)	77
GALUH GAMBUT (GERAKAN LINGKUNGAN BERSIH GASAN MASYARAKAT GAMBUT)	68
ACIL IKAS (APOTEKER CILIK ISTIMEWA DAN CERDAS)	48
DUTA ANTI ROKOK	78
LABU MANIS (LAKUKAN GERAK TUBUH UNTUK MENCEGAH KENCING MANIS)	80
LABU CEPER (LAKUKAN GERAK TUBUH CEGAH HIPERTENSI)	83
BANJARKERJA	125
LAPOR ABAH GURU	112
BANK DAUR'S PURNA PRAJA	82
Aplikasi Apoteker EMAS (Apoteker Edukasi Masyarakat) dan peran aktif apoteker dalam upaya meningkatkan kepatuhan pasien, pengobatan rasional dan efisiensi biaya pelayanan kesehatan	111
SATGAS DESA	103
BANJARSAPA PLUS (Batanam Banih Jajar Legowo Sakali Mawiwit Dua Kali Panen Plus)	101
TAMBAK UDANG (DATANG MELAHIRKAN BAWA AKTA KELAHIRAN UNTUK DIBAWA PULANG)	131
JEMPOL PELANDUK (JEMPUT BOLA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	123
PENGHAPUSAN JAMBAN APUNG "GEBRAK's" (GERAKAN BERSAMA REALISASI AKSES SANITASI)	104
Radio Sahabat Anak (RAHATAN) Kabupaten Banjar	77

KAWANKU BUNGAS (Klinik Hewan Ku Baik, Unggul dan Berkualitas)	94
Sistem Aplikasi Pendonor Darah ( SAPIDA Puskesmas)	90
SIPALUI (Sistem Informasi Puskesmas Akurat Langsung Universal)	103
Si DELIMAS (Aplikasi Kader Peduli Balita BGM dan Stunting)	105
SIMONDALEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi)	109
LITER GREEN (Literasi Forum Komunikasi Go Green)	27
LIHAI (Layanan Informasi Handal Untuk Manajemen Lingkungan berbasis Model Prediksi)	39
PESOMMAN (PELATIHAN SOPIR MASYARAKAT MANDIRI)	0
Pemanfaatan ketersediaan air yang Melimpah menjadi Usaha mandiri Berpotensi Ratusan Juta.(pabrik air Minum Dalam Kemasan)	99
TIMBANGAN POSYANDU DARI BAN BEKAS	70
PERPUSTAKAAN KELILING DESA	75
INOVASI ALAT PERAGA PAUD HELIKOPTER	63
TAMAN BACA LAYAK ANAK ( TBLA ) DESA CABI	80
SI BUNGAS (SIAPKAN IBU BERSALIN NORMAL DENGAN SENAM)	77
Wisata Sungai SRT	91
MENYELAMATKAN LAHAN EKONOMI WARGA MELALUI MANGROVE	67
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL DAN ANAK BALITA BERBASIS ONLINE	81
Mengoptimalkan Wisata Alam untuk Kemandirian Ekonomi Desa	77
Telur Asin Herbal	89
Usaha BUMDesa Pelopor dalam rangka Pelestarian Sasirangan	90

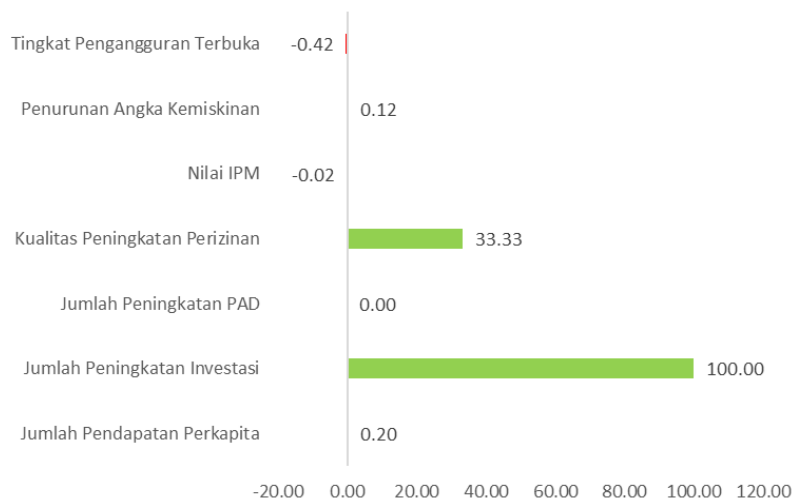
### C. KABUPATEN BARITO KUALA



Gambar 23. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Barito Kuala memiliki skor tertinggi pada variabel Infrastruktur, yaitu 75.0%. Artinya secara umum seluruh indikator - indikator pada variabel infrastruktur sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 30.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

#### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 24. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Kuala

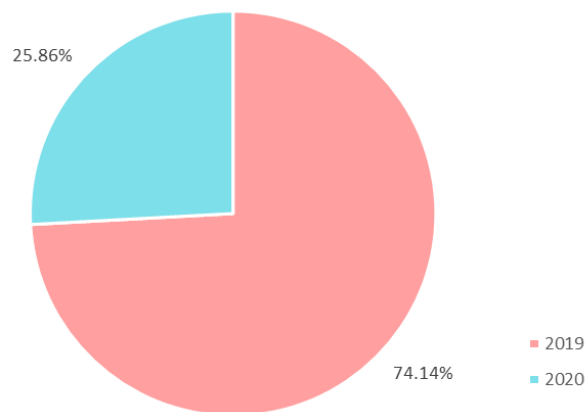
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Kuala pada

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.42% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.12% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami penurunan sebesar 0.02% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan pada angka 33.33% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD tidak mengalami penurunan maupun peningkatan yaitu sebesar 0.00% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 100.00% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan sebesar 0.20% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

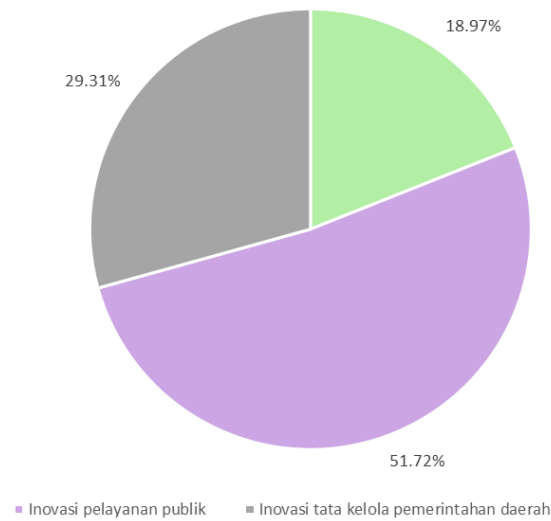
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 25. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Kuala telah diterapkan sejak tahun 2019 sebesar 74.14% dan sisanya diterapkan tahun 2020 sebesar 25.86% inovasi.

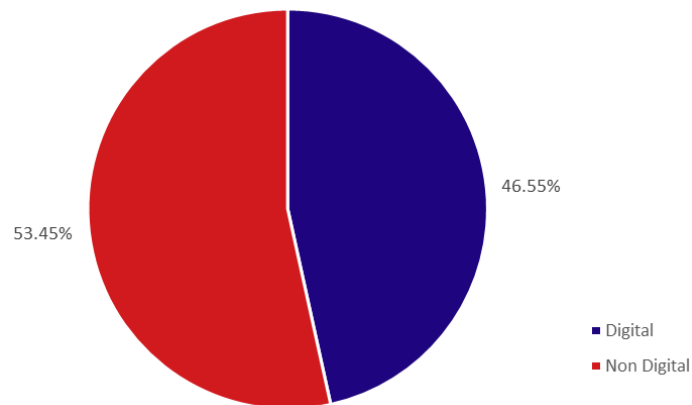
## b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 26. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 51.72%, kemudian 29.31% inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan sisanya sebesar 18.97% adalah inovasi lainnya.

## c. Berdasarkan Jenis Inovasi

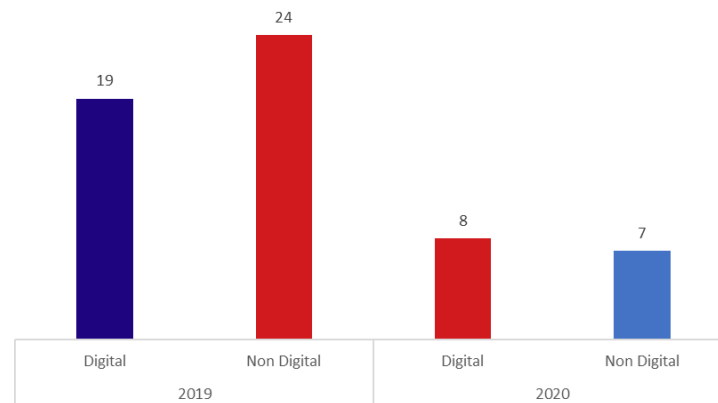


Gambar 27. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 53.45% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Barito Kuala merupakan inovasi non digital, dan sisanya sebesar 46.55% merupakan inovasi digital.



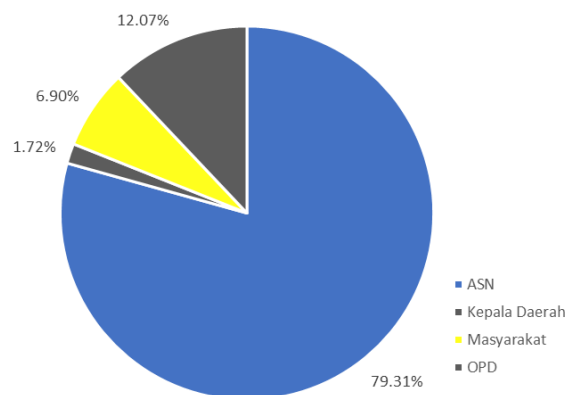
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 28. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Barito Kuala

Secara umum jumlah inovasi mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 19 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 8 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 24 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 7 inovasi.

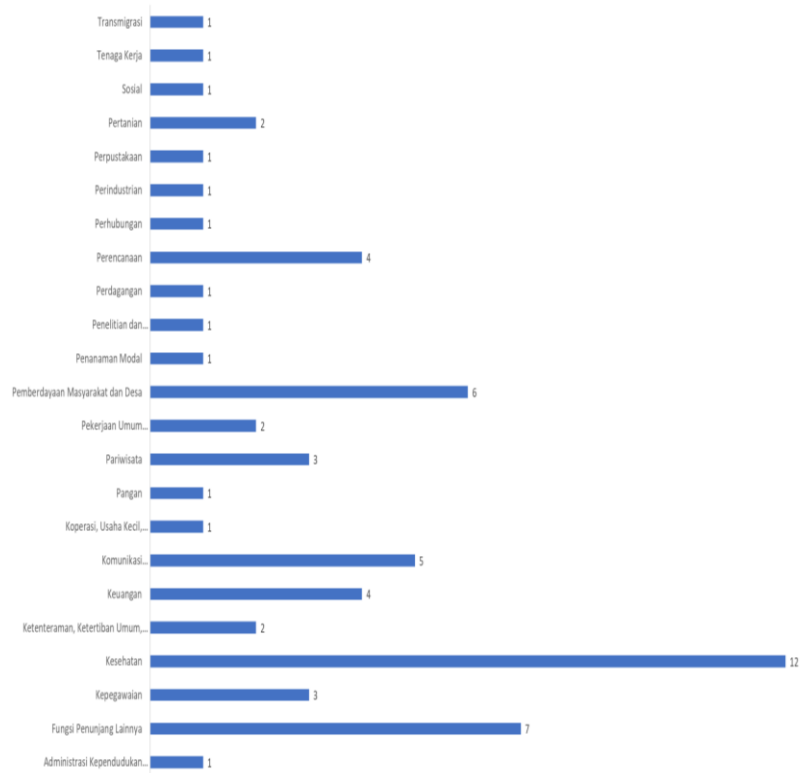
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 29. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Barito Kuala

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2021 diinisiasi oleh ASN, yaitu sebesar 79.31% inovasi sementara sebesar 12.07% diinisiasi oleh OPD, sebesar 6.90% diinisiasi oleh masyarakat dan sebesar 1.72% diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

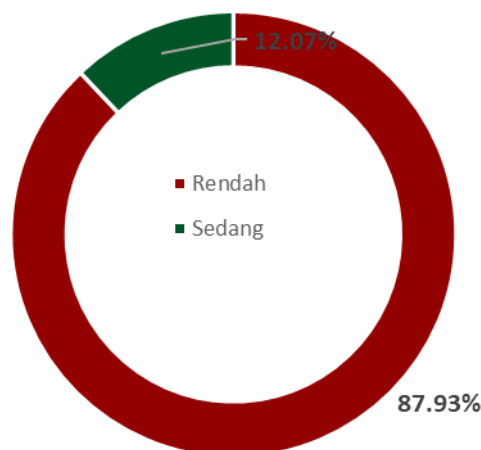
## f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 30. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Barito Kuala

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Barito Kuala berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 12 inovasi, 7 pada inovasi urusan Fungsi Penunjang Lainnya, dan 6 pada inovasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

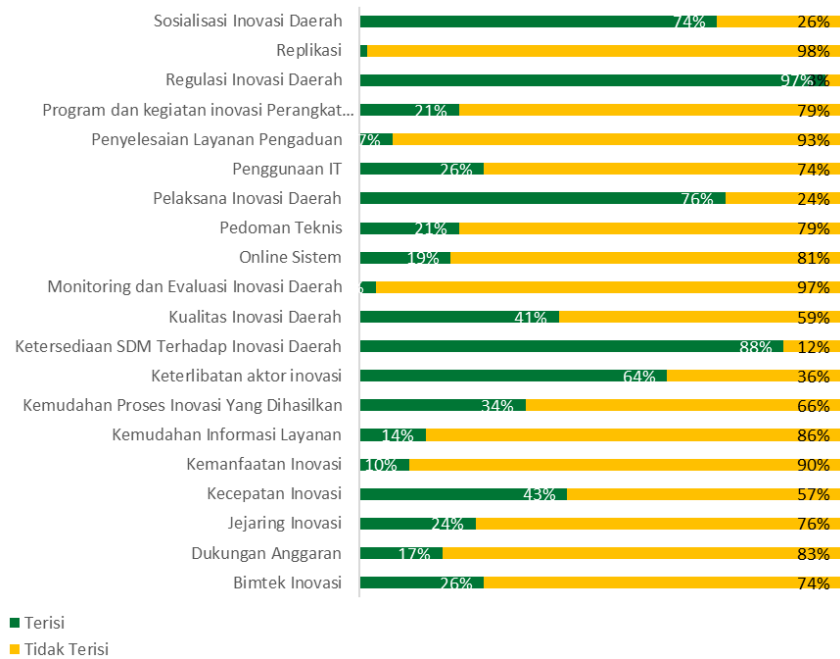
## g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 31. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Barito Kuala

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi masih berada pada kategori skor kematangan rendah, yaitu sebesar 87.93% dari total inovasi. Sedangkan untuk sisanya sebesar 12.07% berada di skor kematangan sedang. Tidak ada inovasi yang berada pada skor kematangan tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

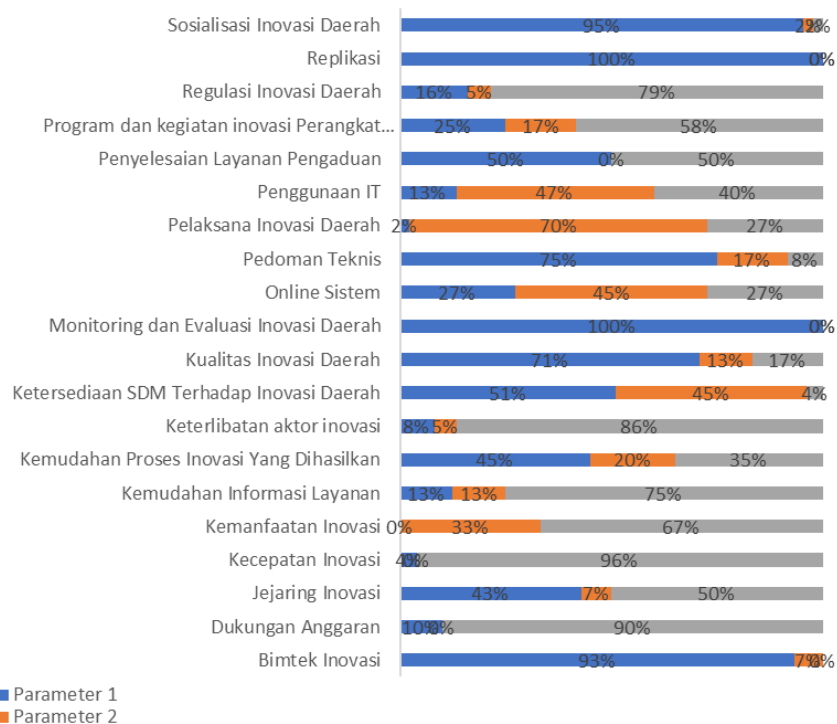
#### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 32. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Barito Kuala, diperoleh rata-rata inovasi yang tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 64.66% sedangkan 35.34% lainnya telah terisi data pendukung. Indikator regulasi inovasi daerah menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 97% sedangkan indikator replikasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 98%.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 33. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah dukungan anggaran sebesar 90%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator Pelaksana Inovasi Daerah sebesar 70%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Regulasi dan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Kuala beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. 3. Daftar Inovasi Kabupaten Barito Kuala beserta Skor Kematangannya

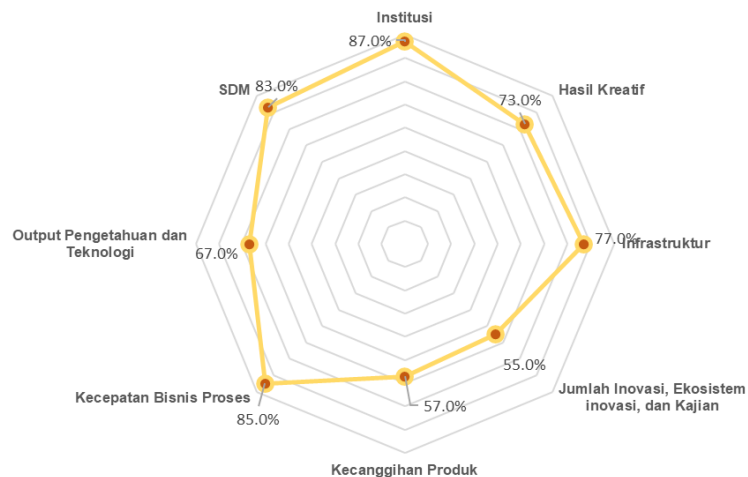
NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Kafe Sehat Bebas Covid-19	23
New Normal Wisata Susur Sungai	17
New Normal Ferry Penyebarangan	23
New Normal Hotel di Kabupaten Barito Kuala	28
Bedah Kampung Terintegrasi	29
"SILADA JAMUTARU" SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25
SIP RKA (Sistem Informasi Pengelolaan Rencana Kerja Anggaran)	60
"DESI TAGANA" PEMBENTUKAN DESA TANGGUH SIAGA BENCANA	18
"MONGSA SUGATARA" MODEL PENGEMBANGAN WISATA SUSUR SUNGAI KOTA MARABAHAN	39

Program Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah melalui e-Pojok Konsultasi (Pro Pantasi)	35
Program Pengembangan Produksi Padi Dan Jagung Melalui Kegiatan Sumber Anakan Turiang (SU-ANANG) Dan Tanaman Sela (TA-SELA)	51
TULANG PASTERUKUR (Pengelolaan Pasar tertib ukur dengan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya)	61
SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (SIWASDAL) DANA DESA DAN DANA ALOKASI DESA	42
SI-IMIN (Sistem Informasi Identifikasi Masyarakat Miskin) Kabupaten Barito Kuala	75
"SIMPEDU JASIRA" SISTEM INFORMASI PERENCANAAN TERPADU JARINGAN IRIGASI RAWA	47
Pelayanan Pembuatan Karsu Dan Karis (Kartu Suami dan Kartu Istri )	42
"SIRANJAU MS EXCELL" OPTIMALISASI LAPORAN KINERJA MELALUI Ms. EXCELL	26
Optimalisasi Pengelolaan Buku Administrasi Pemerintahan Desa	18
Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Terpadu	27
PETA DANA (Perduli Tanggap Darurat Bencana)	25
Pengelolaan Usaha Kolektif Produksi Bibit Sapi Bali	29
HATARUNDANG (Himpunan Peraturan Perundang - Undangan)	27
LOLA SAYA (pengeLOLAan jaSA laYanan BLUD)	28
Optimalisasi Pengawasan Pengembangan Inovasi Melalui Penyusunan Ketatalaksanaan dan Penerapan Inovasi	38
"PRO-PE-SI" (Program Peningkatan Potensi) PAD PBB Melalui Pemberdayaan Pemerintah Desa Dan Kelurahan	23
MADE IN KITA (peMbiNaan kADEr biNa Keluarga baLiTA)	52
SILANDAK (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Elektronik)	46
"Marskisa Membayar IMB" Mari Saudara Kita Segera Membayar IMB	35
"OPEN LAP RFK" Optimalisasi Penyusunan Laporan RFK Melalui Implementasi SOP	34
BANG KAMI (pengeBANGAn KAwasan transMIgrasi)	32
"E-HINDAI (HIMPUNAN INFORMASI DATA) -PENGOLAHAN DATA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	38
PESUT PEMBAJAK (Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Aplikasi)	34
E RFK( pengelolaan data realisasi fisik dan keuangan berbasis aplikasi)	46
"SUKREMAS" SUDUT KREASI KEMASAN	25
E RISALAH(Sistem Pengelolaan Dokumen RISALAH rapat dan persidangan)	28
"OPSI PUBER" OPTIMALISASI INFORMASI PUBLIK BERKALA	33
RABADULI DISABILITAS	13

"GERAKAN ANI AMAT AKUR GIZI" (Ayo tangaNI Ayo selaMATkan Anak KURang GIZI)	22
SI FINA (PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN FISIK PRASARANA BERBASIS APLIKASI)	27
JUMAT DISIPLIN	36
SENAM BUJANG PTM (Inggawi Senam wan BUncu JAjanan bahujuNG)	20
"CERITA GERAK DAN LAGU" DALAM CTPS	20
SIDOPER (SINGKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN RENJA SKPD MELALUI PENYUSUNAN JUKNIS FORMAT ASISTENSI	46
"PEDAL BUMDesa" Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa	34
E-BPHTB (Pembayaran BPHTB secara elektronik)	49
GEMA SI BU LINDA (GERAKAN MENABUNG SI IBU BERSALIN DI DESA)	17
GEMA TA BASARANG (GERAKAN MASYARAKAT TABUKAN BEBAS BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN)	27
"TIGER C" (Tim Gerak Cepat)	22
Pelayanan Aduan Cepat, Tepat Dan Adil Pada Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	36
Internet Desa	70
Standarisasi RKBMD	26
LISA TAMBAN (Lihat Sampah Tampung Ambil Manfaatkan)	22
Smart Presensi ASN Kabupaten Barito Kuala	84
Rumah Data Batola	21
Aplikasi Pelayanan Kependudukan (SISMART/SIMPATIK) Inovasi Desa Simpang Jaya Kec. Wanaraya	22
PAS UNTUK KAMU (Pengelolaan Air Sungai UNTUK Keperluan Air MinUm)	31
'GALUH BUNGAS" (Gerakan Penyuluhan HIV AIDS Bersama Ulama, Nakes, Guru, Aparat Setempat)	22
Komunitas Cinta Buku (KOCIBU)	25



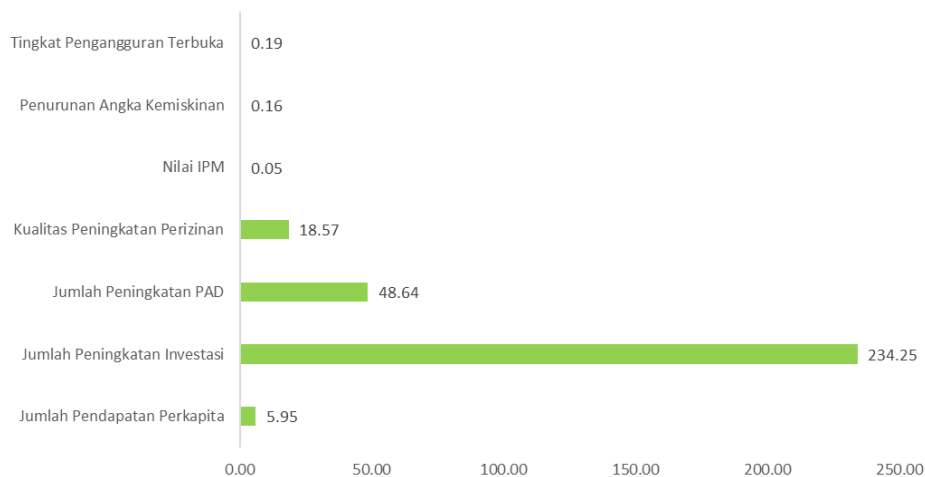
## D. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Gambar 34. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 87.0%. Artinya secara umum indikator - indikator pada variabel Institusi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah dibandingkan variabel lain yaitu 55.0%.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 35. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

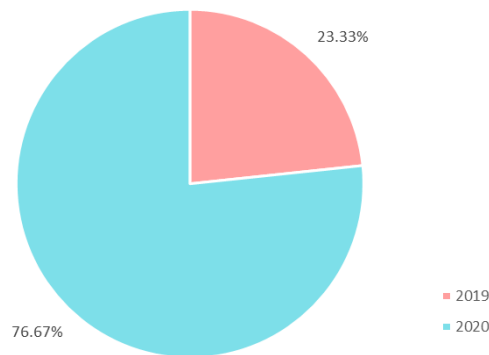
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 0.19% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.16% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka

Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.05% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan peningkatan pada angka 18.57% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 48.64% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 234.25% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan sebesar 5.95% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

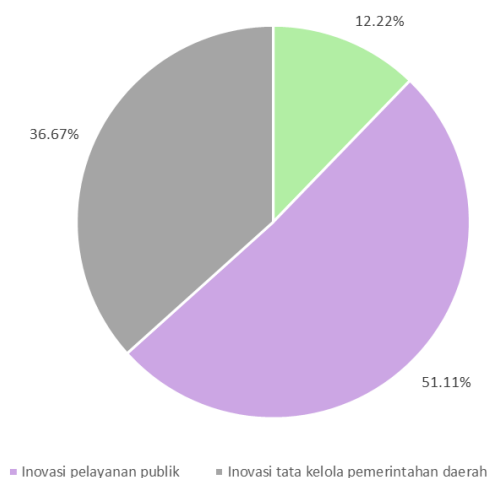
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 36. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diterapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 76.67%, sedangkan sisanya sebesar 23.33% diterapkan sejak tahun 2019.

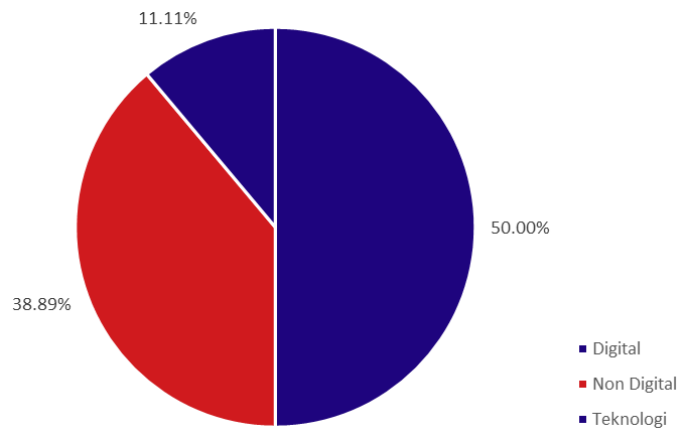
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 37. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 51.11%, kemudian sebesar 36.67% merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan sisanya sebesar 12.22% adalah inovasi kategori lainnya.

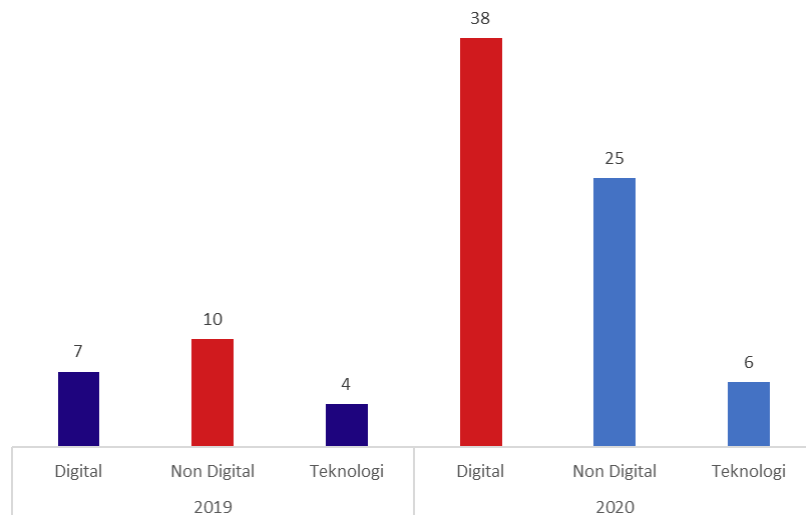
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 38. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 50% yang dilaporkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan inovasi digital, kemudian sebesar 38.89% inovasi merupakan inovasi non digital, dan sisanya sebesar 11.11% dilaporkan berjenis inovasi teknologi.

**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



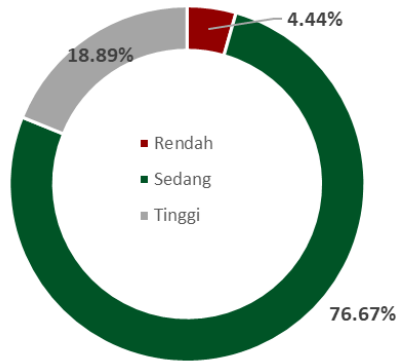
Gambar 39. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, non digital maupun inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi namun pada tahun 2020 naik menjadi 38 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah



Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 21 inovasi dan sebanyak 16 inovasi pada urusan fungsi penunjang lainnya.

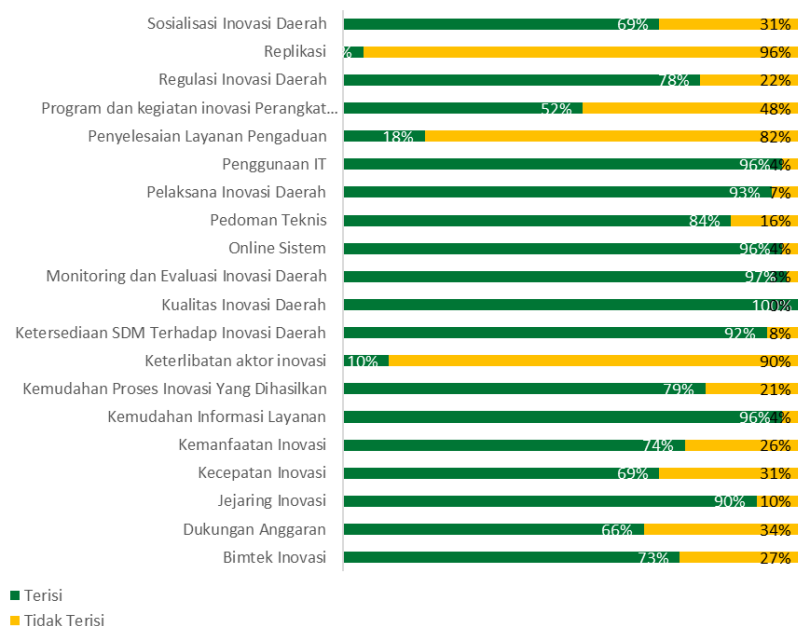
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 42. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sebesar 76.67% dari total inovasi. Sebesar 18.89% memiliki skor kematangan tinggi kemudian sisanya 4.44% mencapai skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

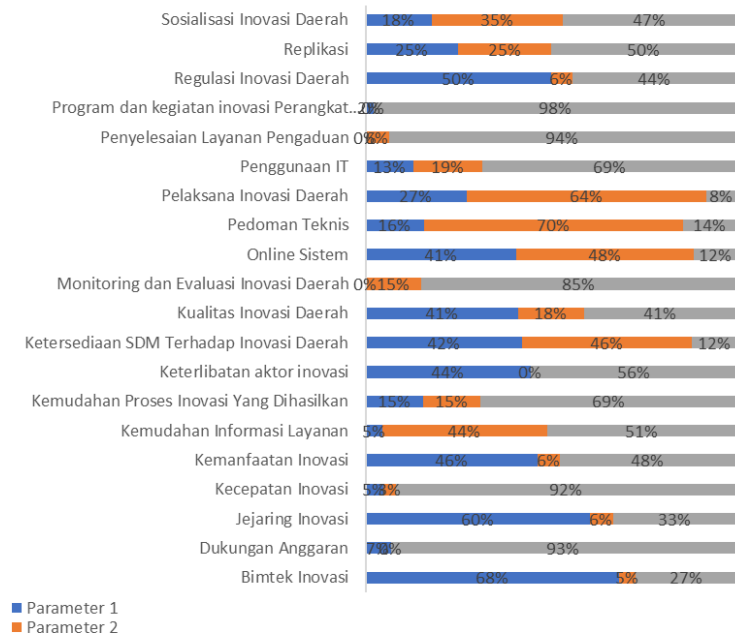
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 43. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 71.78% sedangkan 28.22% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator monitoring dan evaluasi inovasi daerah menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 97% sedangkan indikator replikasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 96%.

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 44. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Program dan kegiatan inovasi perangkat daerah sebesar 98%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah indikator pelaksana inovasi daerah sebesar 64%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Bimtek inovasi sebesar 68% artinya 68% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator Bimtek inovasi.

#### j. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. 4. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pahlawan Sehati C-19 (Pelayanan Transportasi Umum Sehat, Aman,dan Safety Covid-19)	67
Pandu Wisata C-19 (Pelayanan Terpadu Wisata Aman Covid-19)	84
SI LAPAT (Laporan Pelayanan dan Analisa Terpadu)	98
ES-KREM HASAN BASRY (Elektronik Slip Kompensasi dan	106

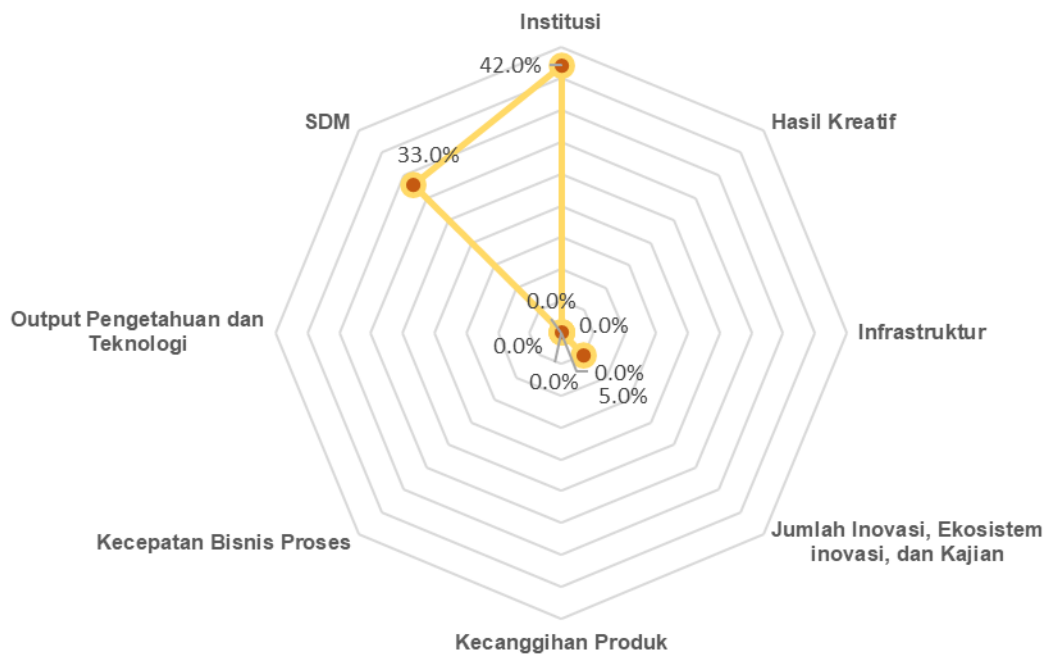


Remunerasi RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan)	
Pejabat Sayang Lanjut Usia (Pesan Lia)	90
SI PINTAR (SK Pensiun Di Antar Ke Rumah)	82
KEMAS WIGAS (KElompok reMAja Sehat WIGAS SMPN 1 Kandangan)	83
Balita Santun (Balita yang Lulus Timbang Usia Lima Tahun)	87
SENADA (Sistem Informasi Inovasi Daerah)	94
Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Kecamatan Bebas Rentenir (GARDA FOR KEREN)	84
SI PETENIS KU	72
Mas Bro 3D	73
SISTEM INFORMASI EVALUASI ASUHAN KEPERAWATAN (SIEVAK)	101
Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis QR code Matrix Data dan Instagram (Isma Badastar) pada Sub Bag Umum dan Rumah Tangga RSUD Brig. Jend. H. Hasan Basry Kandangan.	86
ROKET (Registrasi Online Ke Rumah Sakit)	89
Gerakan Sadar Madu (Program Pendidikan Keaksaraan Dasar Melalui Masyarakat Terpadu)	62
Media Tanam Dan Pupuk Dari Limbah Kolong Kaling Untuk Tanaman Bawang Merah	71
Dashboard Keuangan	71
LACANA (LAYANAN CEPAT TANGGAP BENCANA)	87
SI PALAWA 15" (Pelayanan Administrasi Lewat Whatsapp 15 Menit)	90
PENYUSUNAN SISTEM RENCANA KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BERBASIS APLIKASI ("SIRENJA LITBANG")	64
WC TRIPIKON-S UNTUK WARGA RTM DI BANTARAN SUNGAI	63
Printer 3 D	48
WASTAPEL SENSOR OTOMATIS DAN SABUN OTOMATIS	35
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MAGNET Dan FLYWHEEL	41
KREASI LIMBAH KAYU ONLINE	78
ELPPD (Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	80
SURAT ASISTEN, SEKDA, WAKIL BUPATI DAN BUPATI (SARASWATI)	55
ANTARA LISA (ANTAR JEMPUT PASIEN HEMODIALISA)	62
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan (JDIH Kab HSS)	97
PEMUNGUTAN PAJAK TERPADU DAN TERINTEGRASI (P A P A T E S I)	72
SALAM BERPRESTASI - Sistem Aplikasi Layanan Mahasiswa Berprestasi	102
Ka'bah Samuda	92
SISTEM INFORMASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERPADU SEBAGAI APLIKASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK	107

(SIMADU)	
HITS PLANNING	85
E SURAT	93
MONALISA (MONITORING DAN EVALUASI DESA)	62
GRUP SI WAJASETA	87
Sihapok di Pasar (Sistem Informasi Harga Bahan Pokok di Pasar)	85
Si Dasi Apik (Sistem Pendokumentasian Arsip Melalui Aplikasi Elektronik)	81
Sistem Informasi dan Publikasi DPRD HSS (SIPI DPRD HSS)	78
KASI AMBIL (BERKAS SELESAI, BARU DIAMBIL)	90
SMS Masking	96
Pusdatu (Pusat Data Terpadu PAUD dan PNF Kab. HSS)	67
SISTER (Sistem Input Surat Tugas Terpadu)	105
GO-ZIN ( Gojek Izin )	58
IMB (Jempol) Jemput Bola	83
KLINIK UMKM	106
INTAN PRO (Informasi Kegiatan Pimpinan Kepala Daerah)	96
TELAH BERKEMAS ; (Tetap Lestari Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat).	102
Email Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	92
Panda (PengAmaNan Dokumen sAnapati)	115
Aplikasi Monitoring Server	88
Satgas Pelayanan Ambil Antar (SA" PALATAR)	71
SIMBIOSIS	82
SISKA (Sistem Informasi Perkawinan)	52
Bermandikan Gaharu (Berdayakan Masyarakat dengan Budidaya Ikan Gabus Haruan)	84
SIMPAI	106
INOVASI PAGIKU	88
AJUKAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN VIA APLIKASI ONLINE, DOKUMEN DIANTAR KE RUMAH (JULAK DI VAKSIN DOKTER)	100
SI KOMAR (SISTEM INFORMASI KETERSEDIAAN KAMAR)	90
Sertifikasi Padi Organik pada Bumdes Bakti (Sertifikasi Panic Bumdes Bakti)	95
Percepatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (PATANGGA RAMAN ANUM)	106
Si Midun Chating Dengan Dina ( Strategi Kemitraan Bidan Kampung dan Bidan Merujuk Ibu Bersalin Ke Fasilitas Kesehatan serta Cegah Stunting dengan Dinas Terkait )	99
Kotak Warna-warni boks Arsip (KOWAB SIP)	86
RISSA (Reporting Institusi Masyarakat Perdesaan)	87
ASIK Online (Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online)	90
SIMGAJI - Sistem Informasi Gaji	79

PBB online	104
ANANDA BAJU DANSA (PELAYANAN DIDATANGI BAGI LANJUT USIA DAN DISABILITAS)	94
E-Raport Perangkat Daerah	77
SIDAKAT 2020 (Sistem Database Asal Tumbuhan) Kab. Hulu Sungai Selatan	96
Petinju Cepak (Penyelesaian Tindak Lanjut Cepat dan Akuntabel)	82
TEMPAYAN BATANTU (TEMPAT LAYANAN DAHA BARAT, SELATAN, DAN UTARA)	100
SIM PKB (Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor)	97
"SILAMEN- APBDES" SISTEM PENGELOLAAN DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BERBASIS WEBSITE PADA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	105
BANGJI SEHATI (BANGSAL JIWA SEHATI)	43
SI IMUT (Sistem Informasi Indikator Mutu)	58
Aksi IPSRS (APLIKASI KINERJA DAN SISTEM INFORMASI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT)	68
eRKBMD (ELEKTRONIK RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH)	73
MOBIL GERIATRI	75
POSYANDU PAKAI DOOR PRIZE	91
Perawat Yang Selalu Senyum, Empati, Humanis, Aman, Terampil dan Islami (PERAWAT SEHATI)	59
SIPutraDesa Cs SIAPKK.	83
SINORMA (SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN)	83
SATU SAKU (Satu Tahun Satu Buku)	73
SIPEDULI 3 KG (STRATEGI PENGAWASAN DISTRIBUSI LPG 3 KG)	118
SATU NIK	78
SATU PETA	106
Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan Dalam Genggaman (SI IDAH PEDALAMAN)	102

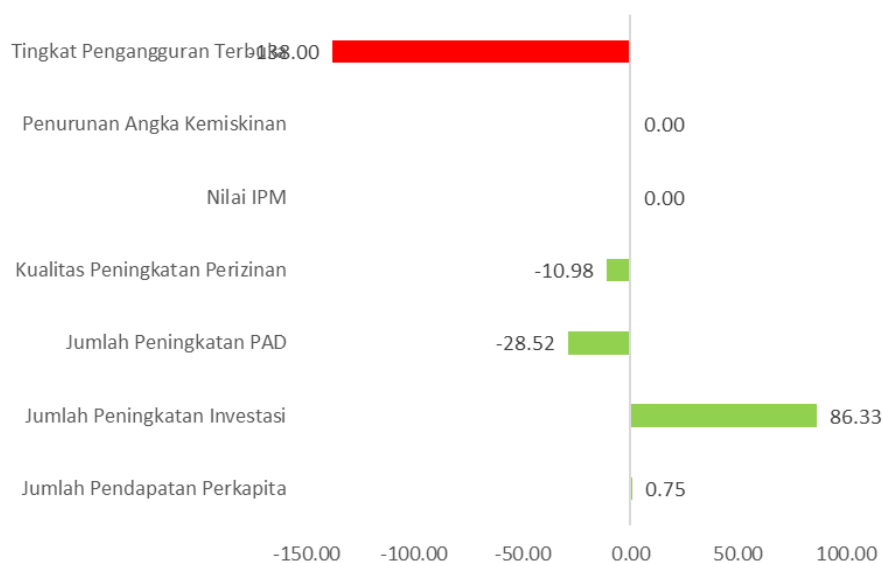
## E. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



Gambar 45. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 42.0%. Namun beberapa variabel memiliki skor 0% yaitu variabel hasil kreatif, variabel output pengetahuan dan teknologi, variabel kecepatan bisnis proses, variabel kecanggihan produk, dan variabel infrastruktur yang artinya tidak ada capaian skor pada indikator-indikator pada variabel tersebut.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



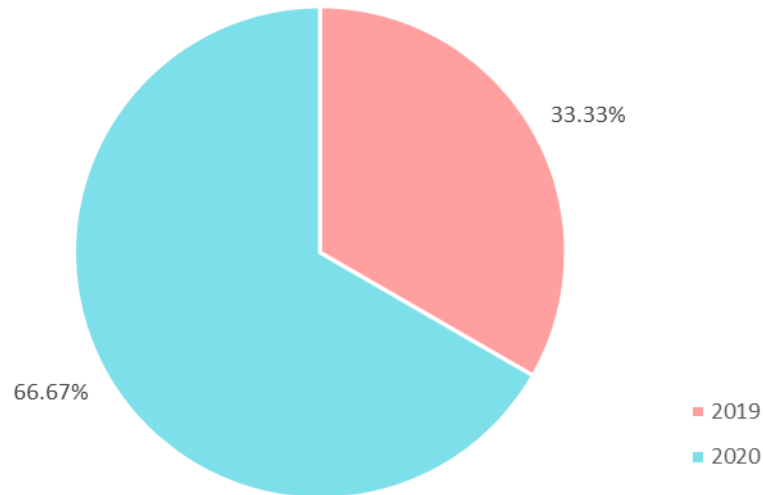
Gambar 46. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.138% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sebesar 0.00% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM sebesar 0.00% telah sesuai dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan penurunan pada angka 10.98% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 28.52% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 86.33% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami peningkatan sebesar 0.75% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

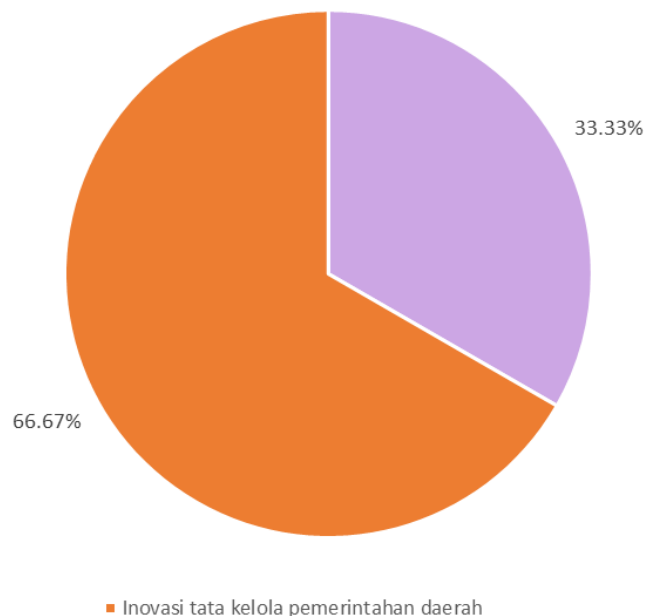
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 47. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, mayoritas inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah diterapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 66.67%, sedangkan sisanya sebesar 33.33% diterapkan pada tahun 2019.

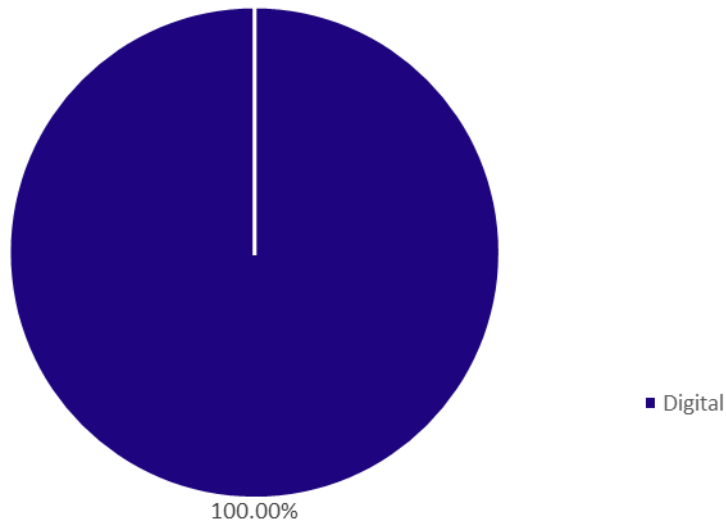
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 48. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebesar 66.67% dan sisanya sebesar 33.33% adalah inovasi pelayanan publik. Sedangkan tidak ada sama sekali inovasi kategori lainnya.

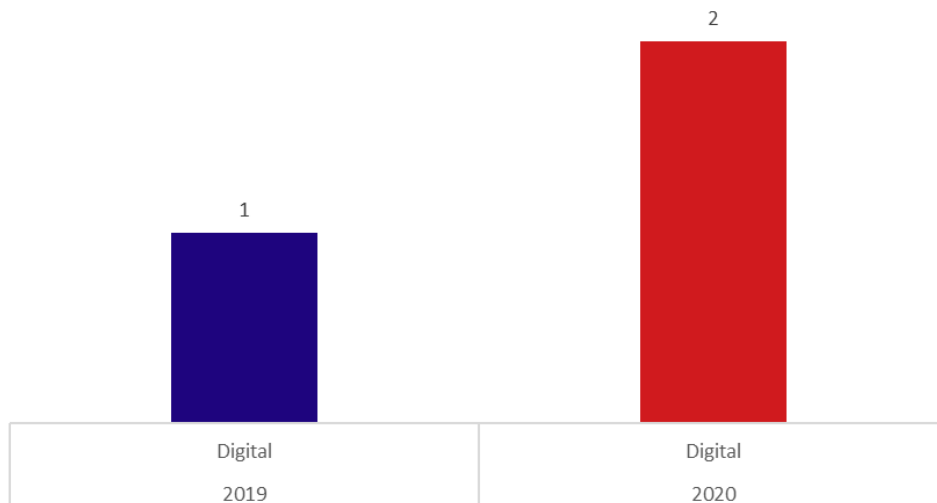
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 49. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, yang dilaporkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluruhnya merupakan inovasi digital.

**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**

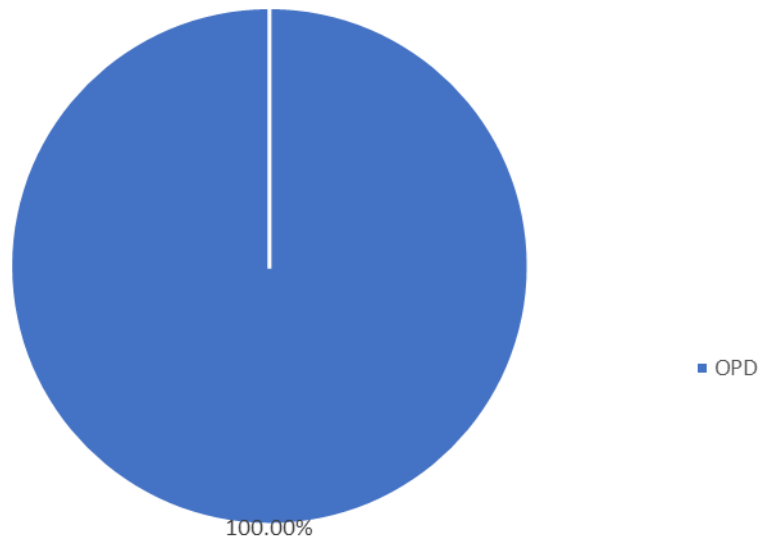


Gambar 50. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan jenis Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jumlah inovasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2019 telah menerapkan sebanyak 1 inovasi menjadi 2 inovasi di tahun 2020.



**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 51. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Seluruh Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun penilaian 2021 diinisiasi oleh perangkat daerah. Tidak ada inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat di tahun 2021.

**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Gambar 52. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu pada urusan perencanaan sebanyak 1 inovasi, pada urusan penanaman modal 1 inovasi dan pada urusan fungsi penunjang lainnya juga 1 inovasi.

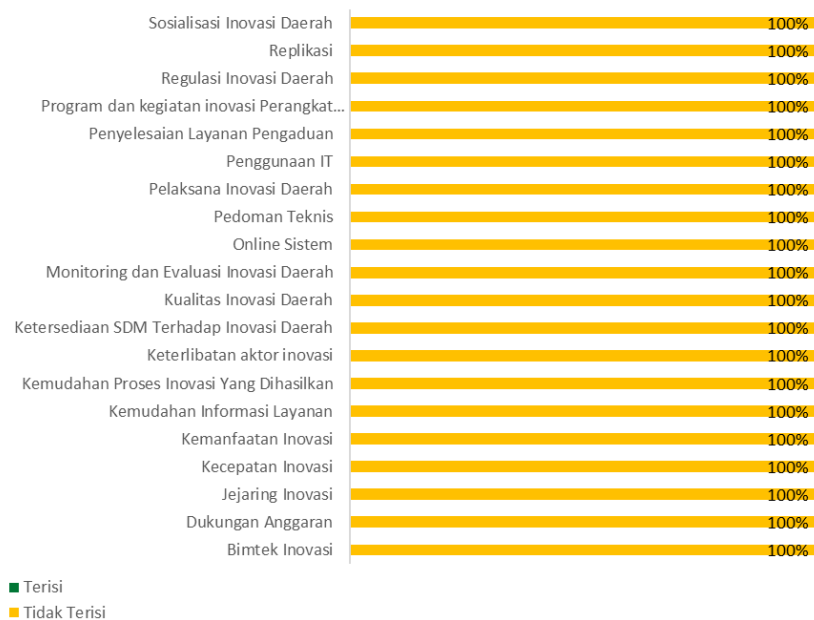
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 53. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

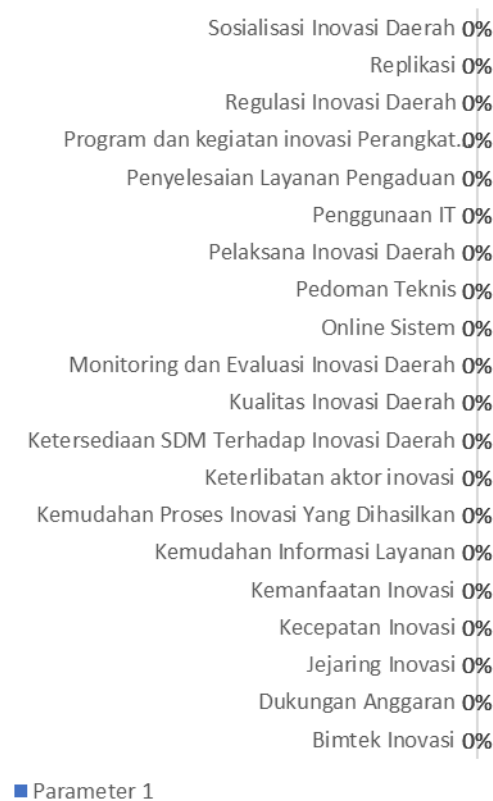
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 54. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diperoleh bahwa seluruhnya tidak terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah. Untuk seluruh indikator tidak terdapat keterisian data pendukung atau *evidence*.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 55. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

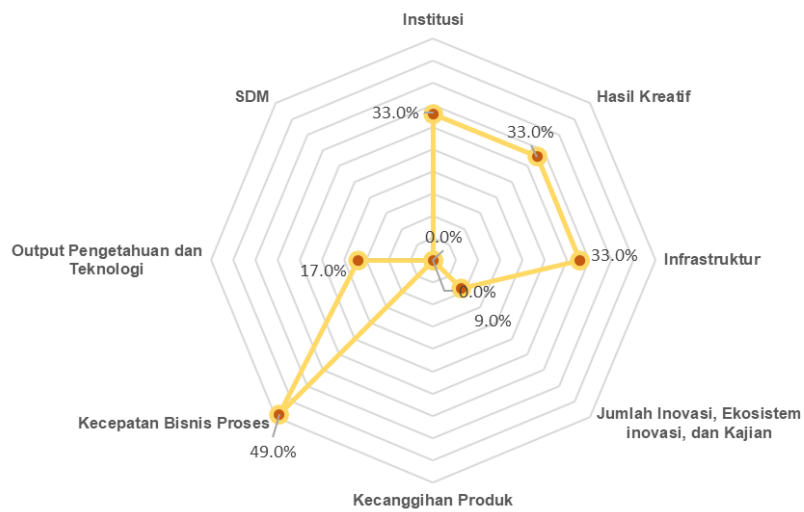
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diperoleh hasil bahwa tidak terdapat keterisian data pendukung atau *evidence* untuk seluruh parameter.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. 5. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
sistem monitoring evaluasi kimerja elektronik	0
Sistem Monitoring Evaluasi Fisik Pembangunan	0
Whataapp Perijinan	0

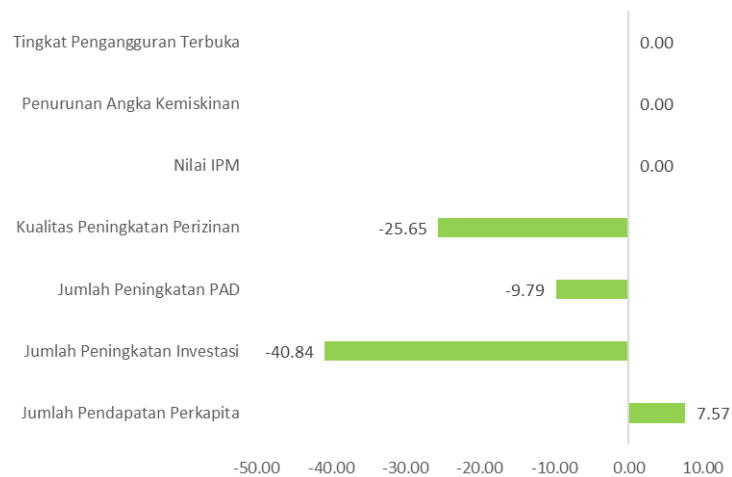
## F. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Gambar 56. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu 49.0%. Namun beberapa variabel memiliki skor 0% yaitu variabel Sumber Daya Manusia dan variabel Kecanggihan Produk yang artinya tidak ada capaian skor pada indikator-indikator pada variabel tersebut.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 57. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

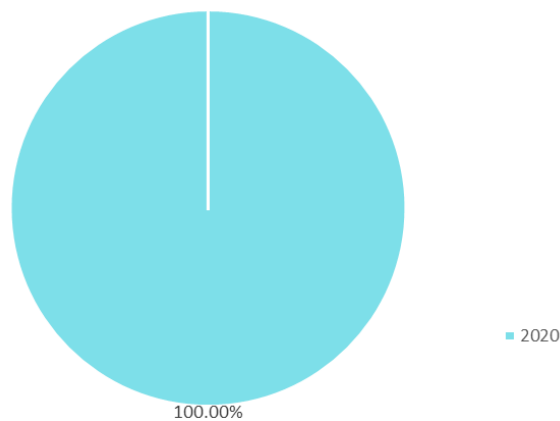
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka tidak mengalami penurunan maupun peningkatan sebesar 0.00% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sebesar 0.00% dengan

perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM sebesar 0.00% telah sesuai dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan penurunan pada angka 26.65% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 9.79% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami penurunan sebesar 40.84% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami peningkatan sebesar 7.57% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

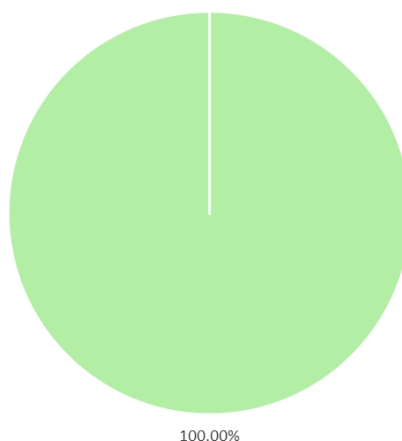
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 58. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara diterapkan pada tahun 2020.

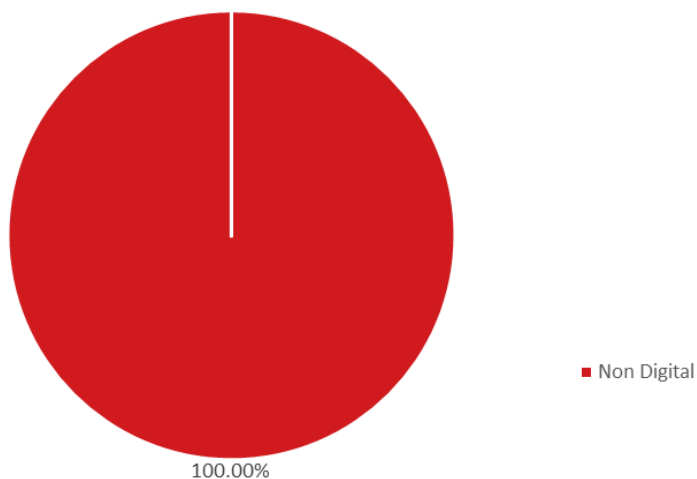
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 59. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi seluruhnya sebesar 100% diketahui merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

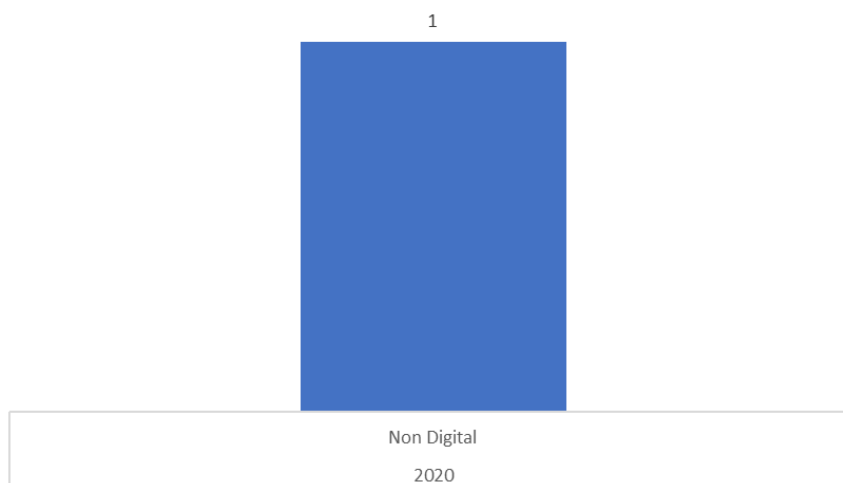
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 60. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, yang dilaporkan Kabupaten Hulu Sungai Utara seluruhnya merupakan inovasi non digital.

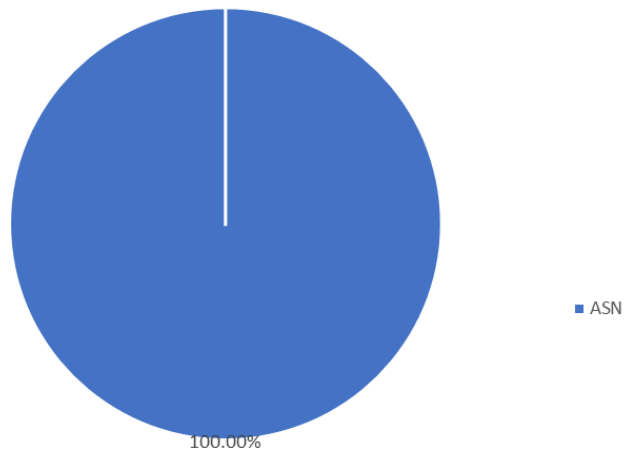
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



Gambar 61. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

Diketahui tidak ada progres jumlah inovasi karena Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya memiliki 1 inovasi non digital pada tahun 2020.

**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 62. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Seluruh Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun penilaian 2021 diinisiasi oleh ASN. Tidak ada inovasi yang diinisiasi oleh OPD, Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat di tahun 2021.

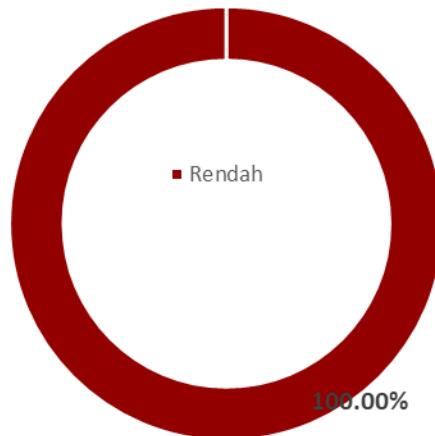
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Gambar 63. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Inovasi daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya pada urusan kesehatan yaitu sebanyak 1 inovasi.

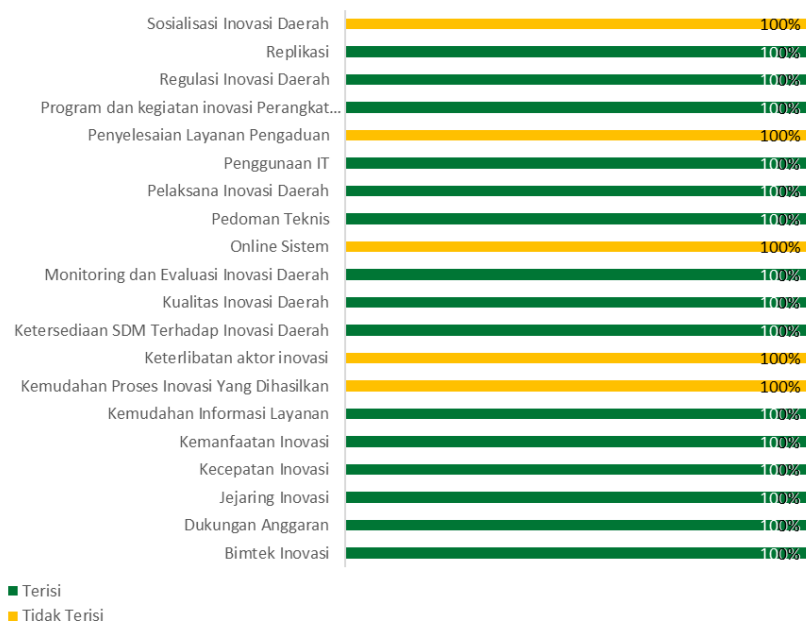
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 64. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



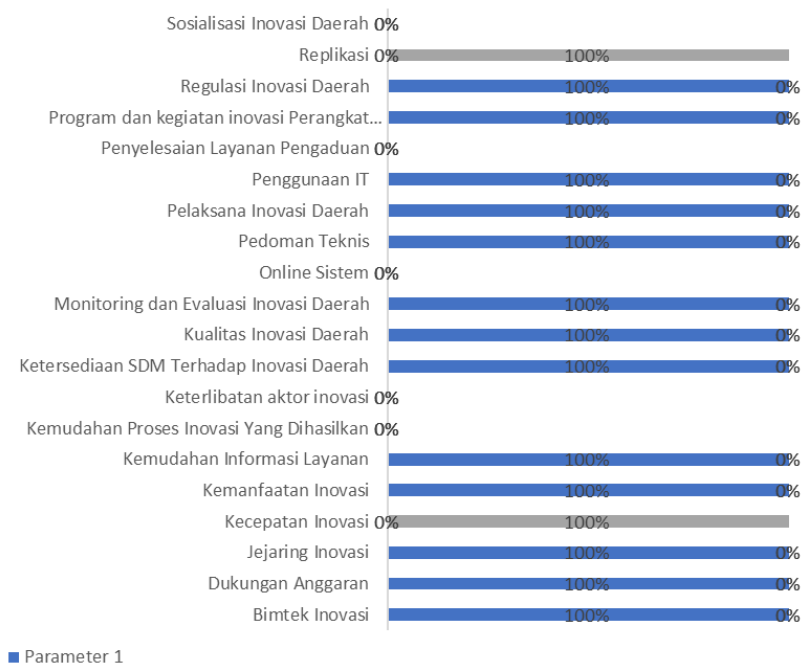
Gambar 65. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah



sebesar 75.00% sedangkan 25.00% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator sosialisasi inovasi daerah, indikator penyelesaian layanan pengaduan, indikator online sistem, indikator keterlibatan aktor inovasi dan indikator kemudahan proses inovasi yang dihasilkan menjadi indikator yang paling banyak tidak terisi yaitu sebesar 100% sedangkan selain indikator tersebut, merupakan indikator-indikator yang memiliki persentase tingkat keterisian paling tinggi yaitu sebesar 100%.

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 66. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

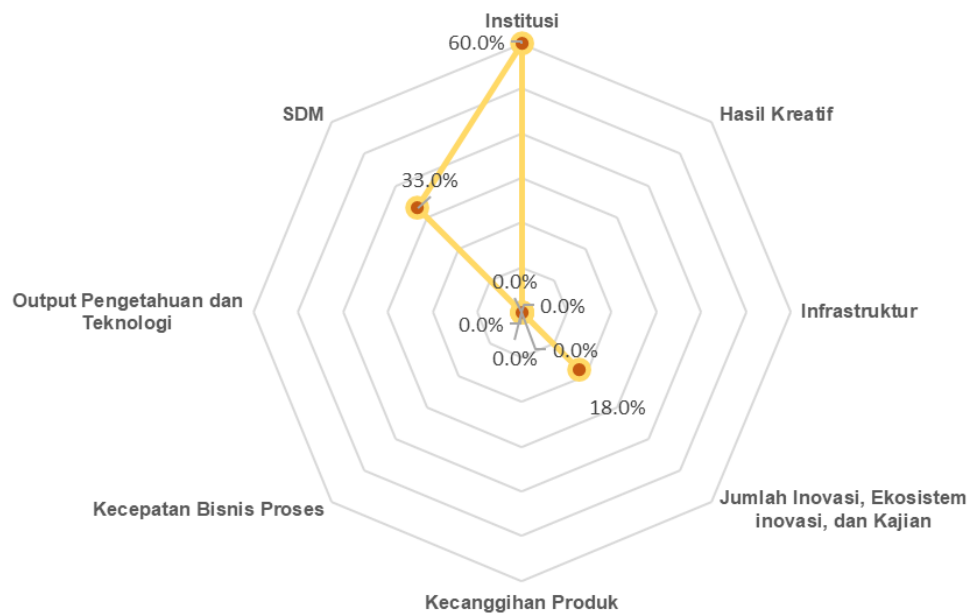
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah indikator Replikasi dan Kecepatan Inovasi sebesar 100%. Kemudian, tidak ada indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator Regulasi inovasi daerah, program dan kegiatan inovasi perangkat daerah, penggunaan IT, pelaksana inovasi daerah, pedoman teknis, monitoring dan evaluasi inovasi daerah, kualitas inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, kemudahan informasi layanan, kemanfaatan inovasi, jejaring inovasi, dukungan anggaran dan bimtek inovasi.

#### j. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. 6. Daftar Inovasi Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
WC Model "GENTONG MAS SANTUN" (GERakan TOLONg MASyarakat SANitasi TUNtas)	49

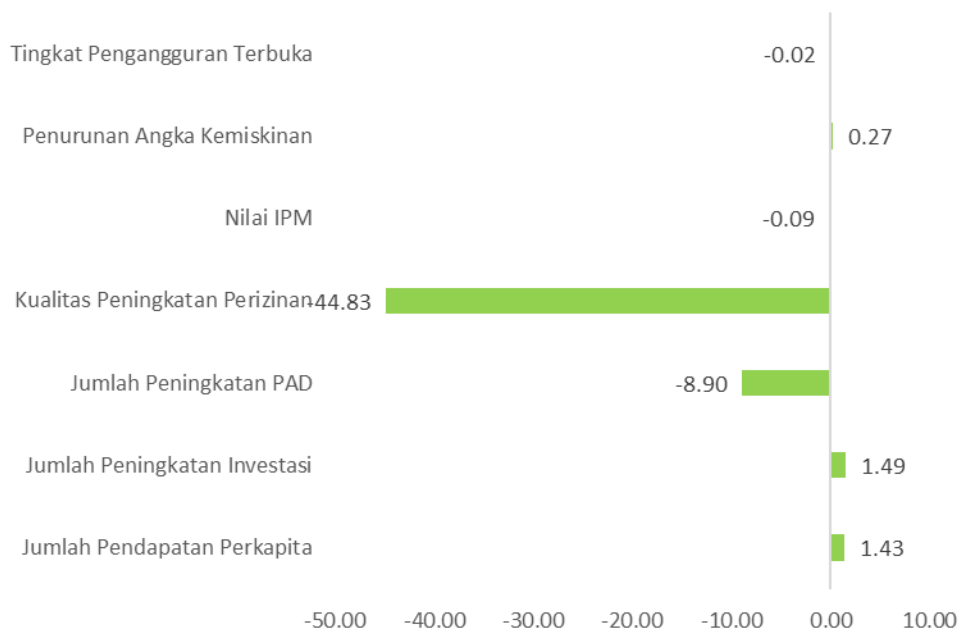
## G. KABUPATEN KOTA BARU



Gambar 67. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kota Baru

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Kota Baru memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 60.0%. Namun beberapa variabel memiliki skor 0% yaitu variabel Hasil Kreatif, variabel infrastruktur, variabel kecanggihan produk, variabel kecepatan bisnis proses dan variabel output pengetahuan dan teknologi.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



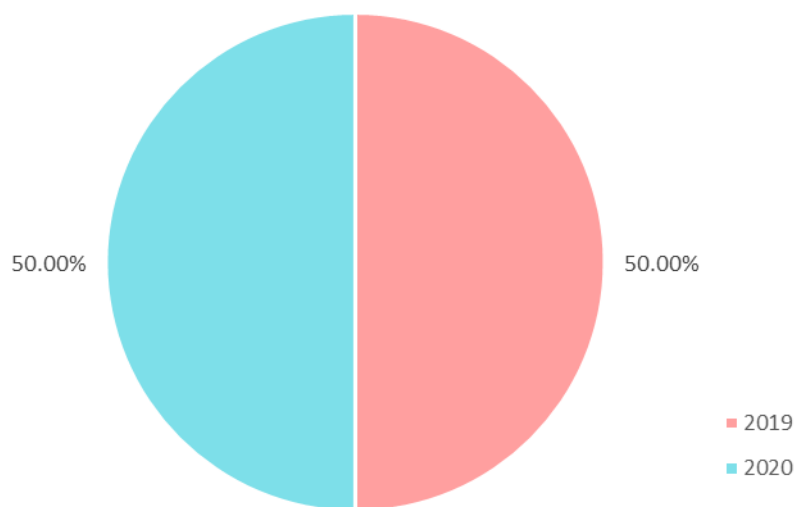
Gambar 68. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kota Baru

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Kota Baru pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.02% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.27% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami penurunan sebesar 0.09% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Kota Baru menunjukkan penurunan pada angka 44.83% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 8.90% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 1.49% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Kota Baru mengalami peningkatan sebesar 1.43% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

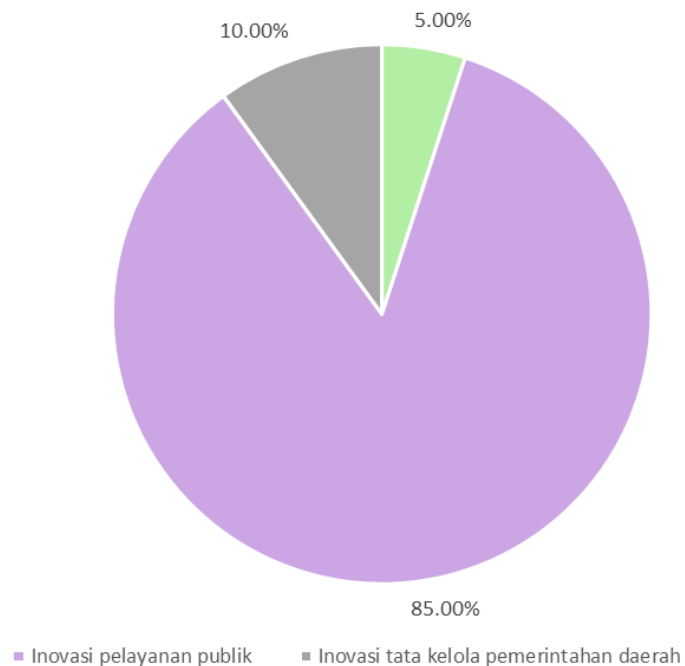
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 69. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kota Baru telah diterapkan sejak tahun 2019 yaitu sebesar 50.00%, sedangkan sebagian lagi sebesar 50.00% diterapkan pada tahun 2020.

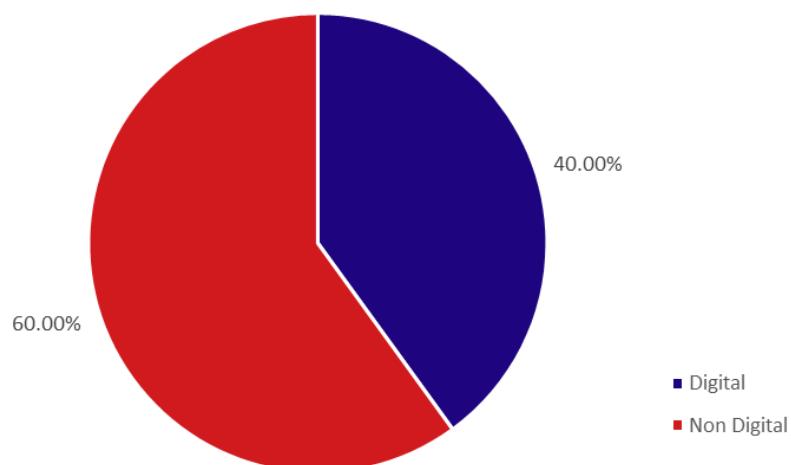
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 70. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 85.00%, kemudian sebesar 10.00% merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan sisanya sebesar 5.00% adalah inovasi kategori lainnya.

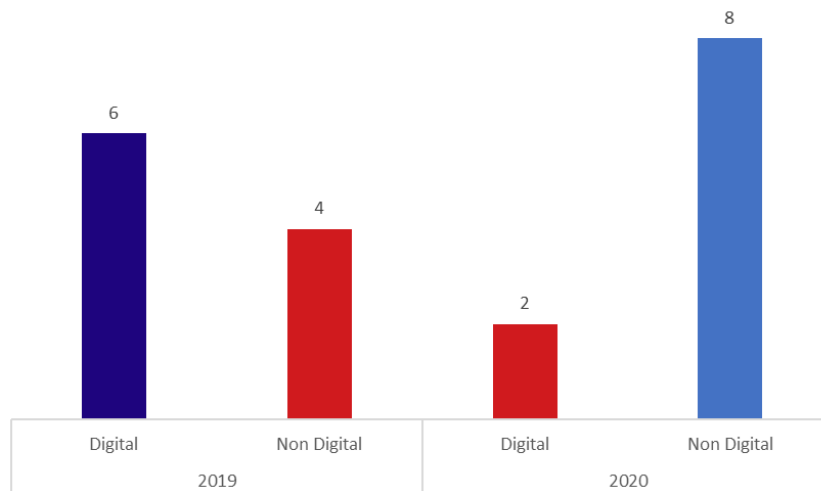
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 71. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 60% yang dilaporkan Kabupaten Kota Baru merupakan inovasi non digital, kemudian sisanya sebesar 40.00% dilaporkan berjenis inovasi digital.

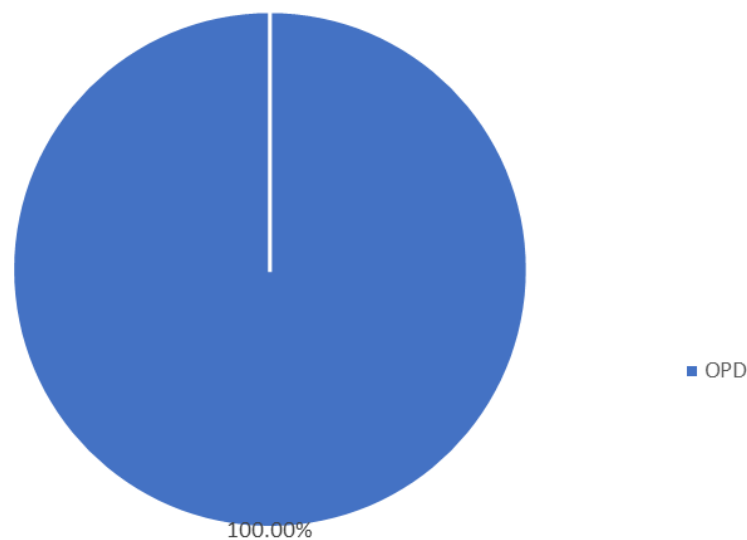
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 72. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Kota Baru

Dapat dilihat perbandingan jumlah inovasi antara tahun 2019 dan 2020 bahwa inovasi digital mengalami penurunan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 2 inovasi. Sedangkan inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 4 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 8 inovasi.

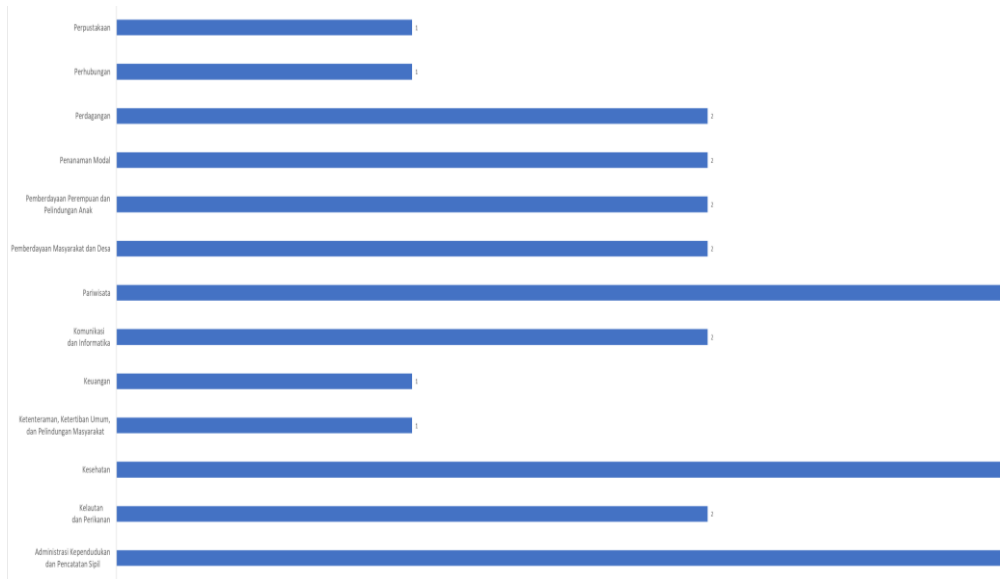
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 73. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Kota Baru

Seluruh Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Kota Baru pada tahun penilaian 2021 diinisiasi oleh OPD. Tidak ada inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat di tahun 2021.

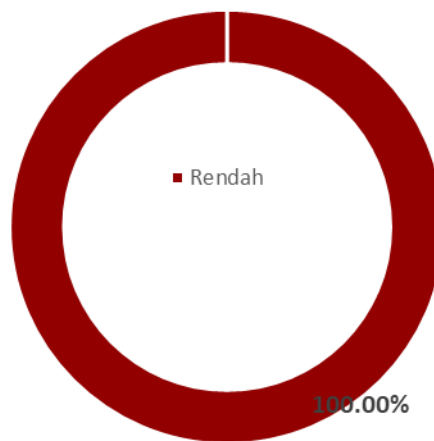
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 74. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupatén Kota Baru

Sebaran inovasi daerah pada Kabupatén Kota Baru berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan pariwisata, urusan kesehatan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 3 inovasi.

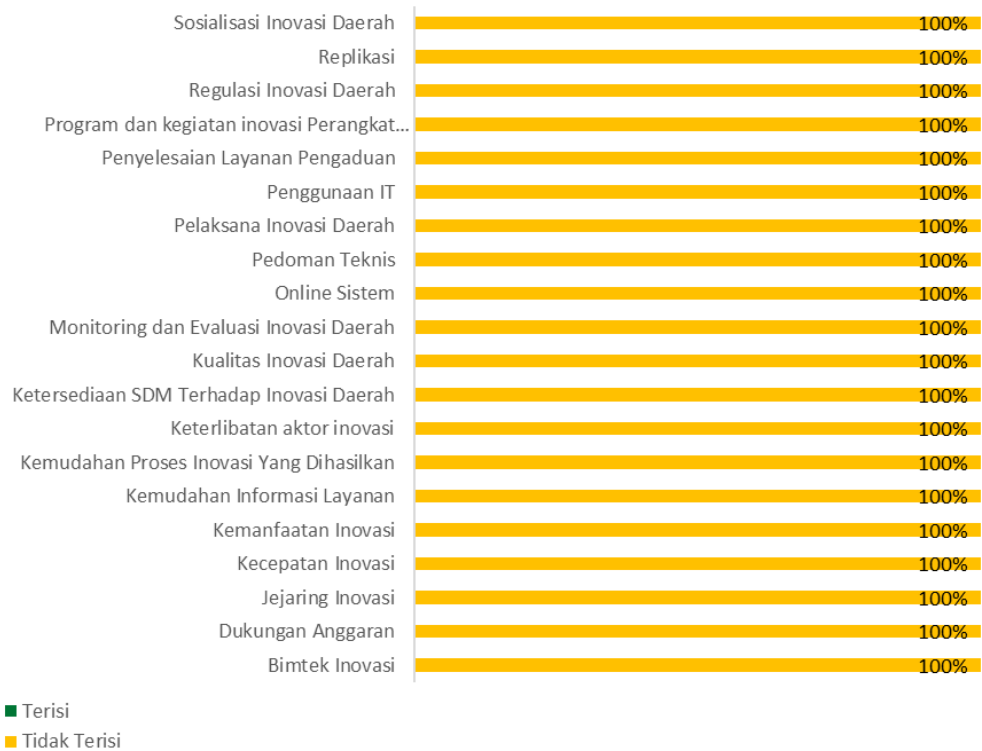
#### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 75. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupatén Kota Baru

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi Kabupatén Kota Baru berada di skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

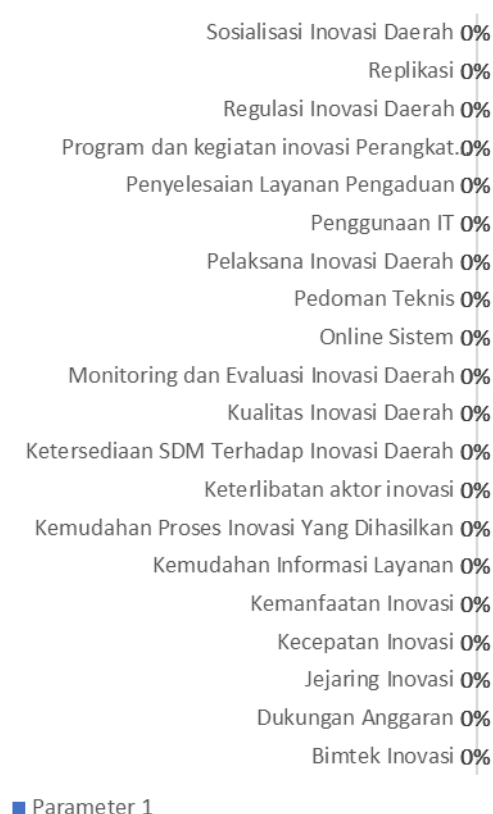
## h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 76. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kota Baru

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Kota Baru, diketahui bahwa seluruh inovasi tidak terisi data pendukung atau *evidence* pada indikator satuan inovasi daerah.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 77. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah Kabupaten Kota Baru diperoleh hasil bahwa tidak terdapat keterisian data pendukung atau *evidence* untuk seluruh parameter.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Kota Baru beserta Skor Kematangannya

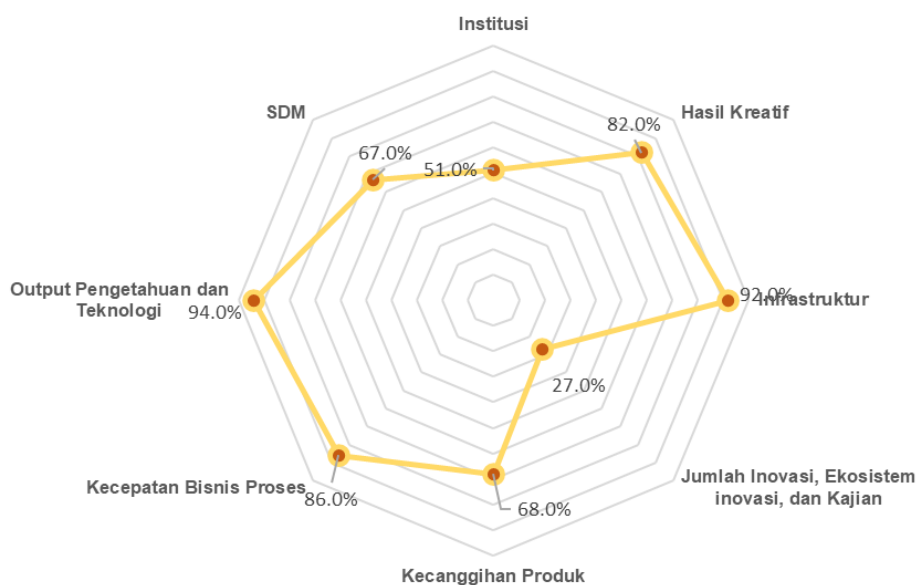
Tabel 2. 7. Daftar Inovasi Kabupaten Kota Baru beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Aplikasi Pengelolaan Perizinan Berbasis Android	0
Pasar Tradisional Kotabaru Bebas Covid-19	0
Pasar Modern Kotabaru Bebas Covid-19	0
Angkot Bebas Covid-19	0
Layanan Perizinan Bebas Covid-19	0
Tempat Wisata Bebas Covid-19	0
Restoran Bebas Covid-19	0
Hotel Bebas Covid-19	0
RETAK HATIMU (Rekam Cetak Hari Sabtu Minggu)	0
TODAK ONLINE (Transformasi Dokumen Administrasi Kependudukan Online)	0
PAK BAMEGA (Program Pelayanan Kesehatan Ibu Material dengan Pendekatan Keluarga melalui Gerakan Masyarakat Peduli Gender)	0



JOKUWI (Pojoy Suami di Posyandu Ciptakan Suami Pedas (Peduli,Waspada,Siap,Siaga, Antar,Jaga))	0
Optimalisasi Kompilasi Laporan Pertanggungjawaban APB Desa melalui Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Laporan Evaluasi Pembangunan Desa (SI TOLE PeDe)	0
Terlayannya Akses Pembuatan Bukti Pencatatan Kapal Nelayan ke Desa–Desa untuk kesejahteraan Bagi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Kotabaru	0
PELANGI BAMEGA (PElayanan LANGsung Identitas penduduk BANYak Manfaat dan Ekonomis bagi warGA)	0
SINYAL PENDING RUMTAG (Sistem Pelayanan, Pengawasan Dini dan Langsung pada Rumah Tangga )	0
Transformasi Perpustakaan Daerah menuju Community Engagement Berbasis TIK	0
Pelayanan Sertifikasi Good Aquakultur Praktis	0
AMPLANG ONLINE (Aplikasi Membayar Pajak Secara Langsung)	0
Tamu Gizi Atasi Stunting	0

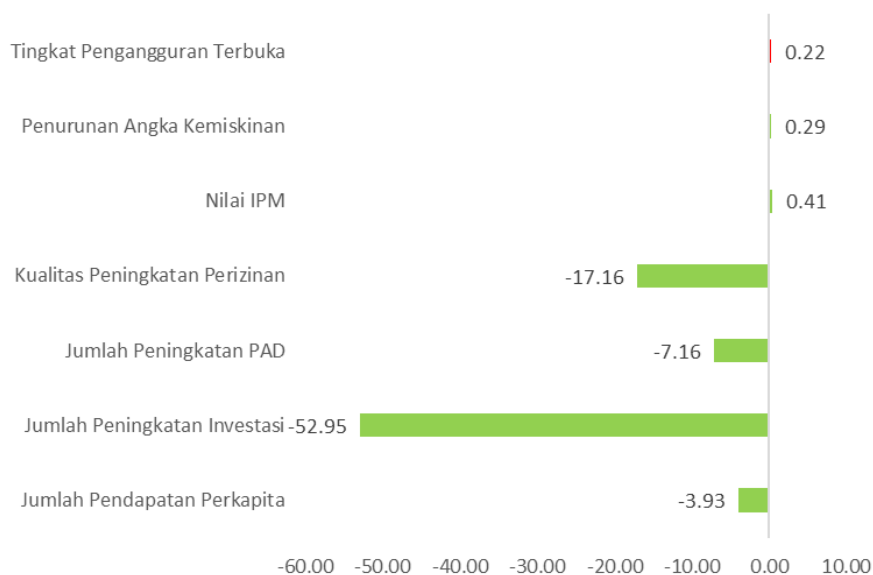
## H. KABUPATEN TABALONG



Gambar 78. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tabalong

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tabalong memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 94.0%. Artinya secara umum seluruh indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian masih cukup rendah, yaitu 27.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut masih cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



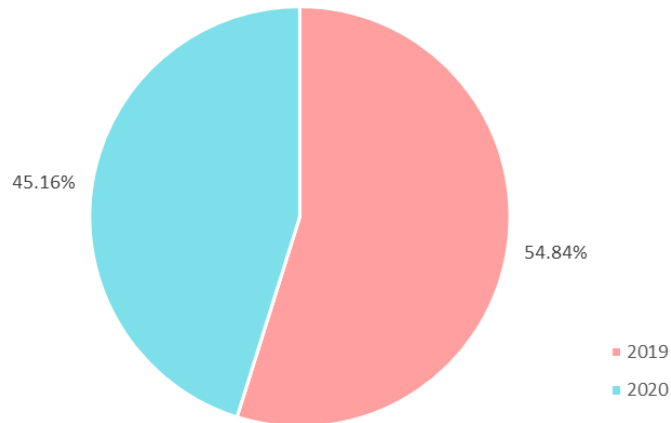
Gambar 79. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tabalong

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tabalong pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan sebesar 0.22% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.29% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.41% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Tabalong menunjukkan penurunan pada angka 17.16% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 7.16% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami penurunan sebesar 52.95% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Tabalong mengalami penurunan sebesar 3.93% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

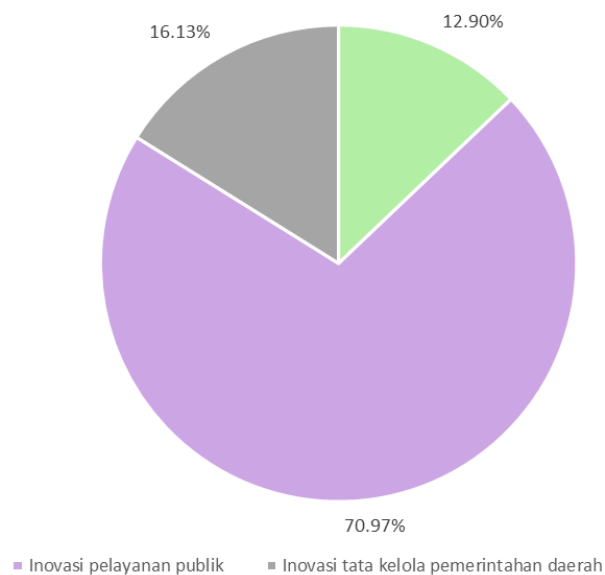
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 80. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tabalong telah diterapkan sejak tahun 2019 sebesar 54.84% dan sisanya tahun 2020 sebesar 45.16% inovasi.

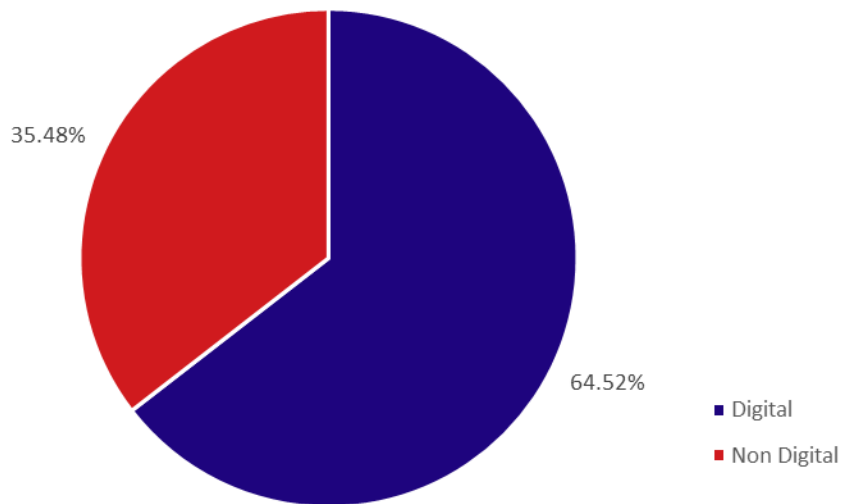
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 81. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 70.97%, kemudian 16.13% merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan sisanya sebesar 12.90% adalah inovasi lainnya.

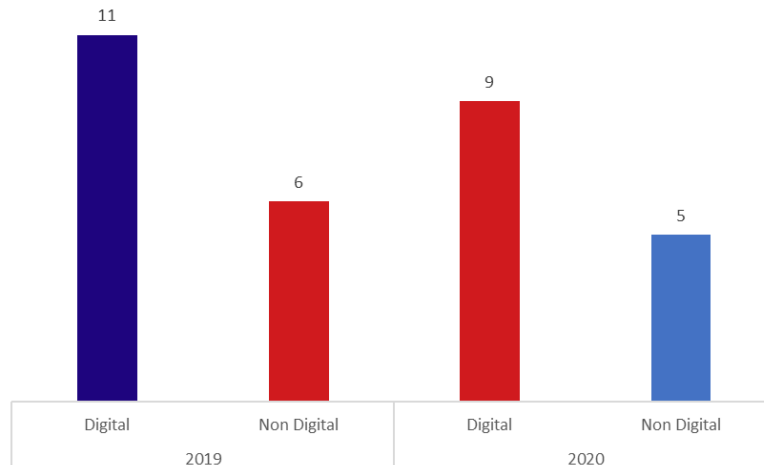
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 82. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 64.52% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Tabalong merupakan inovasi digital, dan sisanya sebesar 35.48% merupakan inovasi non digital.

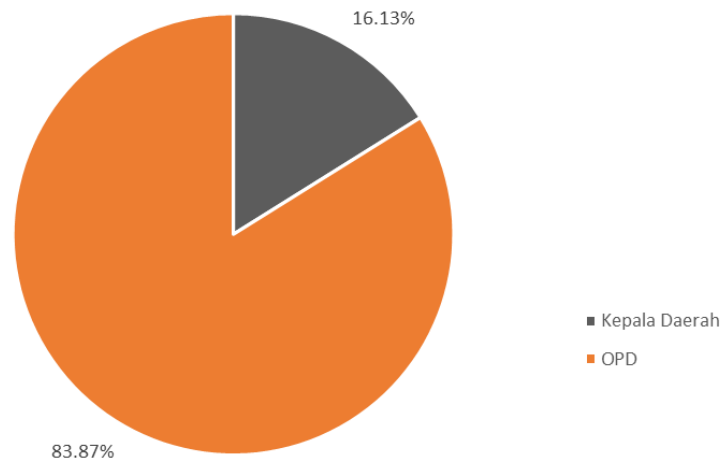
### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 83. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tabalong

Secara umum jumlah inovasi mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital maupun inovasi non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital menurun di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 11 inovasi namun pada tahun 2020 turun menjadi 9 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 6 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 5 inovasi.

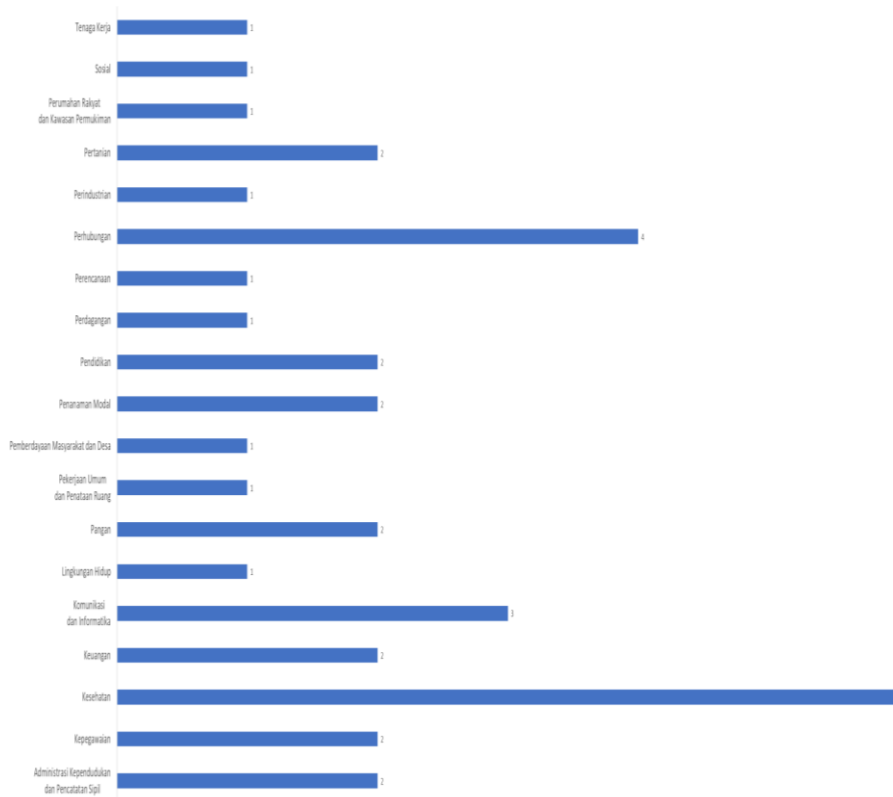
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 84. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tabalong

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD yaitu sebesar 83.87%, sementara sisanya sebesar 16.13% diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD, ASN dan masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

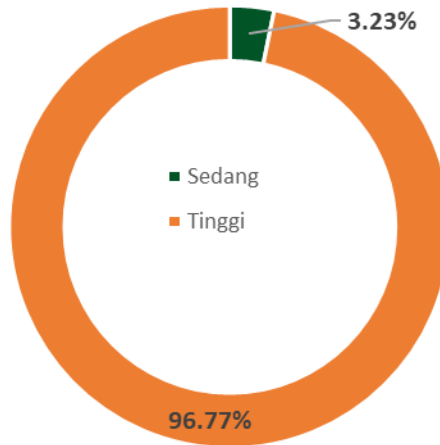
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Gambar 85. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tabalong

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tabalong berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dengan 6 inovasi.

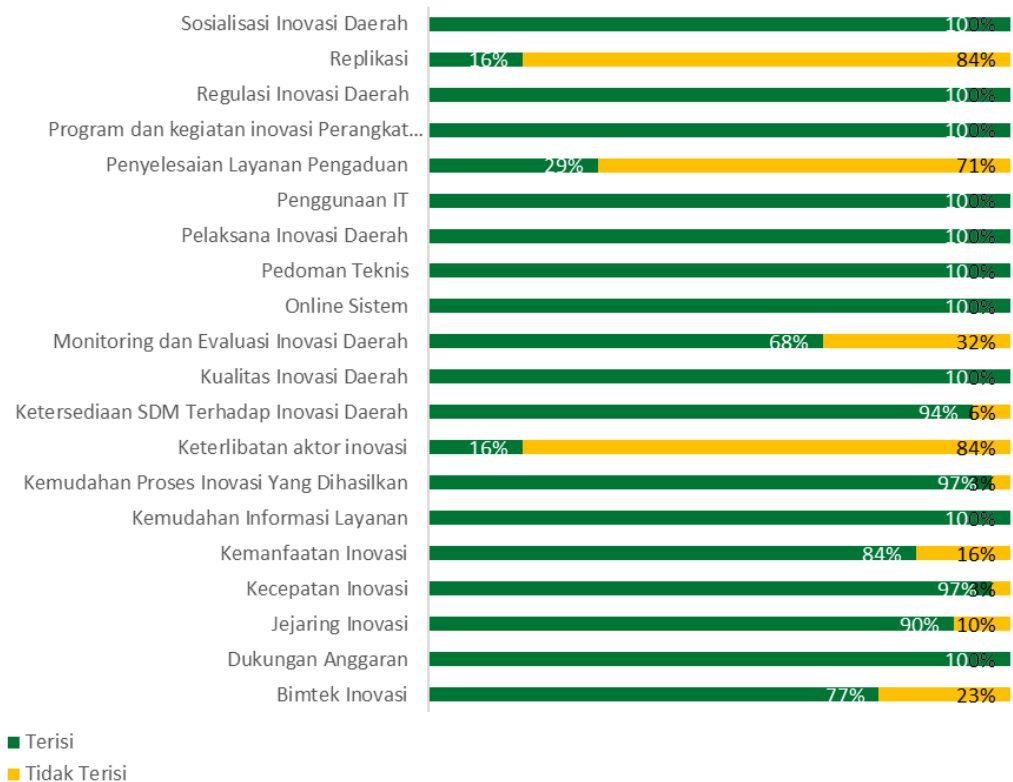
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 86. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tabalong

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sebesar 96.77% dari total inovasi. Sedangkan sisanya untuk kategori sedang sebesar 3.23%. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

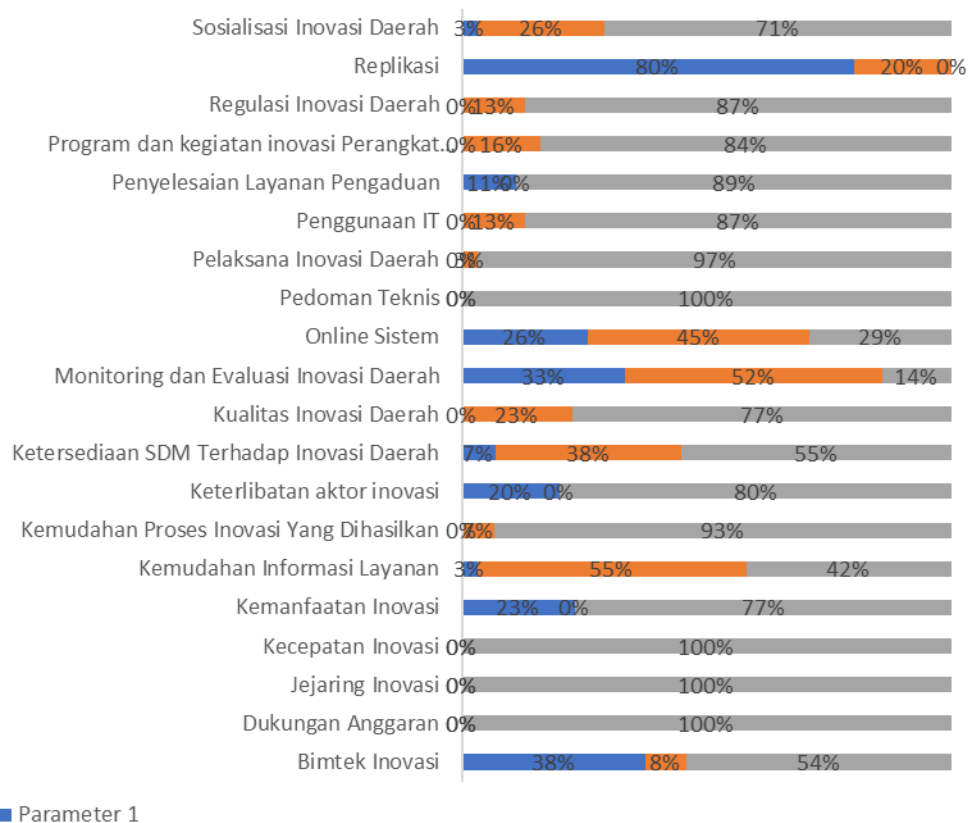
## h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 87. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tabalong, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 83.39% sedangkan 16.61% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator sosialisasi inovasi daerah, regulasi inovasi daerah, program dan kegiatan inovasi perangkat daerah, penggunaan IT, pelaksana inovasi daerah, pedoman teknis, online sistem, kualitas inovasi daerah, kemudahan informasi layanan dan dukungan anggaran menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 100% sedangkan indikator replikasi dan keterlibatan aktor inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 84%.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 88. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah pedoman teknis, kecepatan inovasi, jejaring inovasi, dan dukungan anggaran sebesar 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah kemudahan informasi layanan sebesar 55%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator replikasi sebesar 80% artinya 80% inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator replikasi.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Tabalong beserta Skor Kematangannya

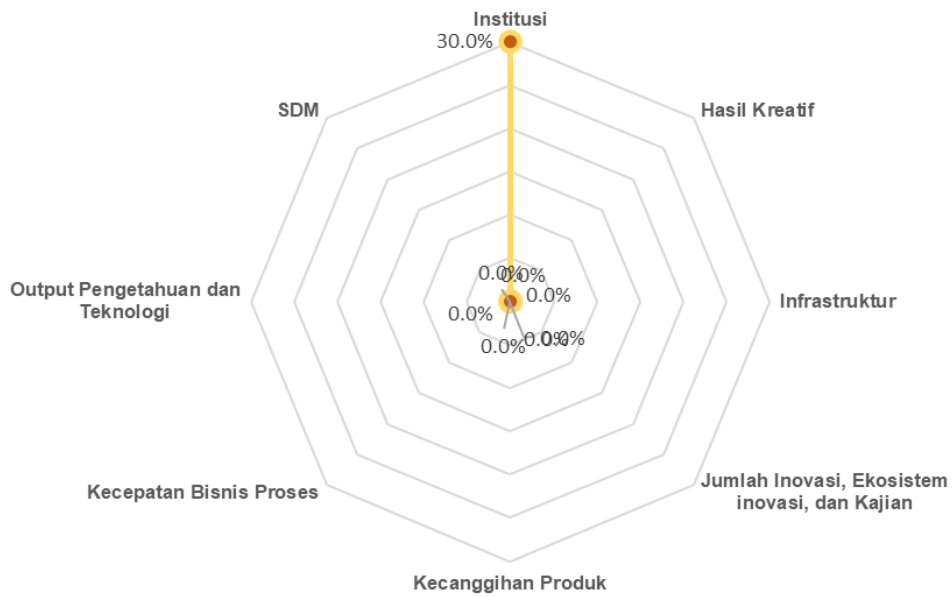
Tabel 2. 8. Daftar Inovasi Kabupaten Tabalong beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Siap tanggap Menemukan KI murni dan mencegah Stunting melalui Penemuan Ibu hamil Awal Ngidam (SMS PIAN)	119
e-SIITI (Fasilitasi Layanan Perizinan Berusaha Industri secara Elektronik)	118
Sistem Online Pajak Daerah (SIJAKA)	102
JEBOL PELANDUK CERDAS (Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan Cetak Di Tempat, Ramah dan Tuntas)	115
SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)	109



"SI RAJA PANGAN" (Sistem Peremajaan Cadangan Pangan)	125
"BANG AMAT" (Gerbang Asuhan Mandiri Toga Dan Akupresur)	115
SI LANGKAR (Sistem Informasi Layanan Kenaikan Gaji Berkala Guru secara Online)	121
MALIVAT DI PONDOK SABU (Mari lakukan IVA Test di Pondok Sayang Ibu)	112
27 SEMARAK - KESWAN (24 jam 7 hari Semangat Melayani Rakyat - Kesehatan Hewan)	115
SILANCAR (Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Terintegrasi) Melalui Website	108
IMBAS (Penyampaian Informasi Pengurusan IMB Melalui Media Elektronik dan Media Sosial)	128
PAK TERA Gempur Stunting (Penera Peduli Gerakan Melek Ukur Dan Timbangan Lindungi Konsumen dari Stunting)	119
Sinergitas Bank Sampah dan Pelapak Kurangi Sampah (SIBAPAKASAM)	133
SEKARUNG DURIAN (Sekat Kaca Ruang Tunggu Duduk Berdiri Aman dan Nyaman)	120
JELITA (Jendela Informasi dan Analisis Data Pembangunan)	109
SI BERKAT (Sistem Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat)	114
LAPAK (Pelayanan Pengurusan Akta Kematian) Online Berbasis Web	111
RHK SISI (Ruang Henti Khusus Simpang Bersinyal) Kabupaten Tabalong	111
SIGOLDA (Sistem Informasi Golongan Darah)	116
GERBANG SEJUTA HATI (Gerakan Timbang Secara Tuntas Menuju Balita Sehat Bebas Stunting)	127
PUB-G (Pendaftaran Uji Berkala dengan Gesit) secara Drive Thru	116
Perumda Kanda Tani (Perusahaan Umum Daerah Tingkatkan Pendapatan Petani)	113
Paliat Online (Pelayanan Aplikasi Perizinan Tabalong secara Online)	137
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong	141
Langsat Manis - Layanan Angkutan Masyarakat Nyaman dan Gratis menuju Tatanan Baru (New Normal)	125
PENTOL ENAK (Pendaftaran Online Pelatihan Berbasis Kompetensi)	114
e-Office (Aplikasi Tata Kelola Perkantoran secara Elektronik)	100
e-Voting (Pemungutan Suara Secara Elektronik)	98
Aplikasi WAKER (Wajib Masker)	108
Pembelajaran Melalui Media TV Tabalong	120

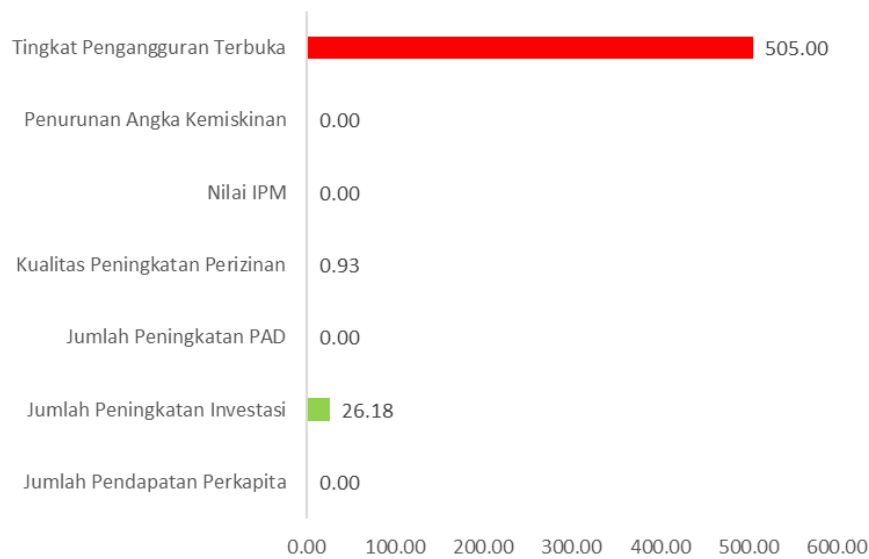
## I. KABUPATEN TANAH BUMBU



Gambar 89. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki skor tertinggi pada variabel Institusi, yaitu 30.0% sementara variabel lain tidak memiliki skor atau 0% yang artinya tidak ada capaian skor pada indikator-indikator pada variabel selain institusi.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



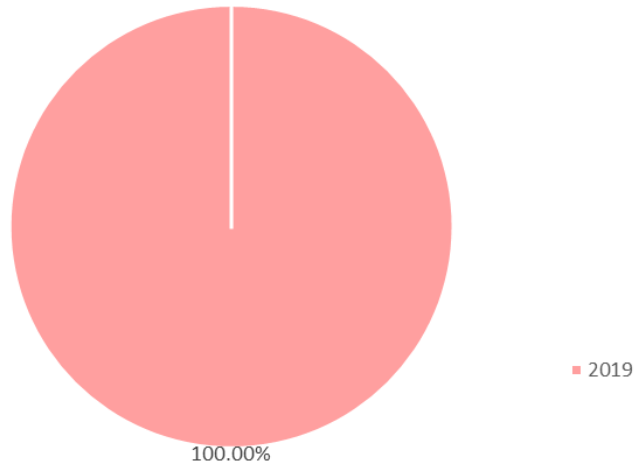
Gambar 90. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 505.00% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami peningkatan maupun penurunan sebesar 0.00% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM sebesar 0.00% telah sesuai dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peningkatan pada angka 0.93% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD tidak mengalami penurunan maupun peningkatan sebesar 0.00% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 26.18% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengalami penurunan maupun peningkatan sebesar 0.00% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

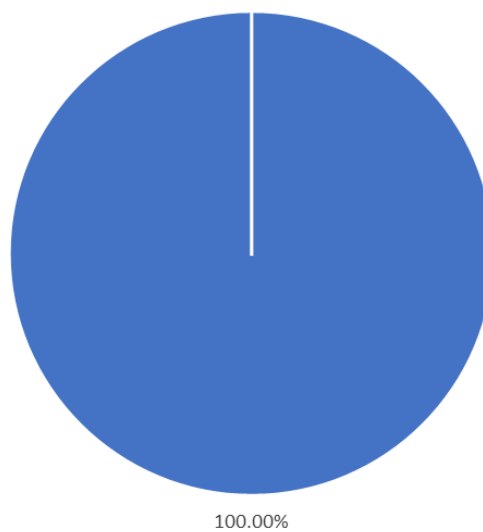
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 91. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu diterapkan pada tahun 2019.

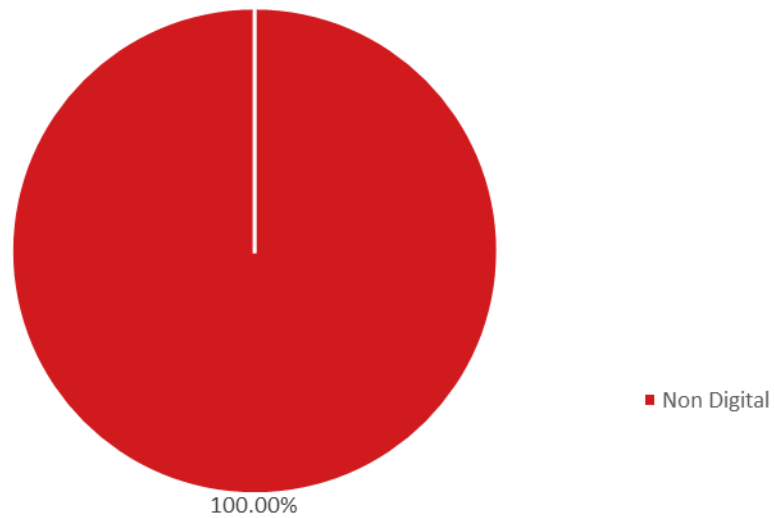
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 92. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi seluruhnya sebesar 100% diketahui merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

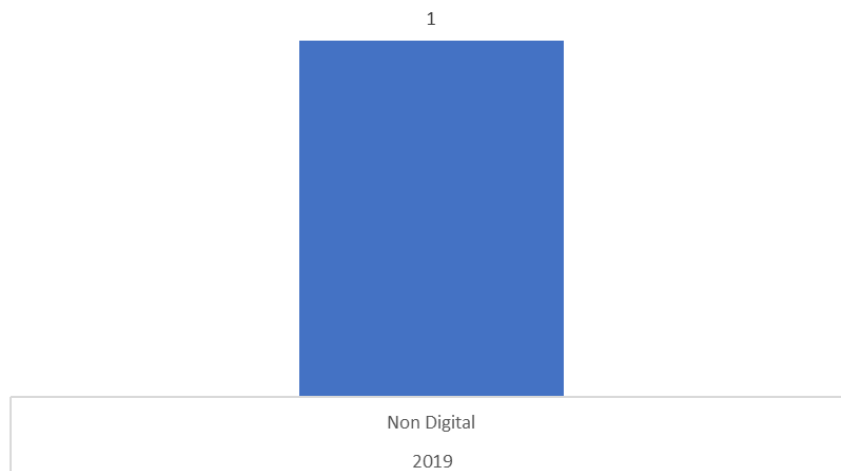
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 93. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, yang dilaporkan Kabupaten Tanah Bumbu seluruhnya merupakan inovasi non digital.

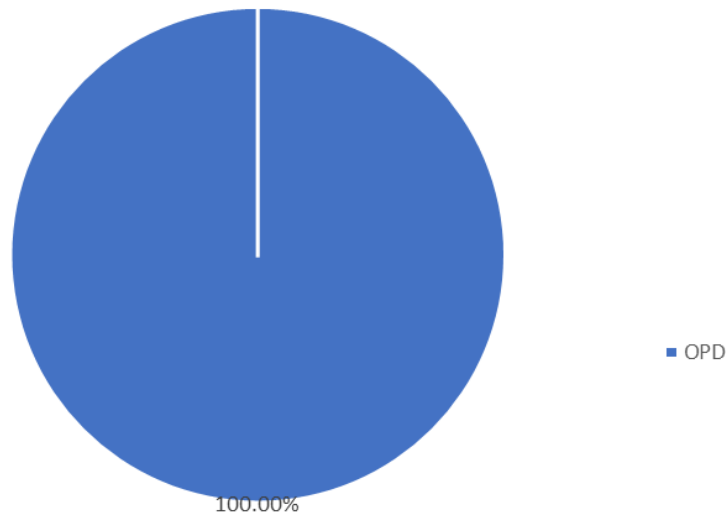
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



Gambar 94. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tanah Bumbu

Diketahui tidak ada progres jumlah inovasi karena Kabupaten Tanah Bumbu hanya memiliki 1 inovasi non digital pada tahun 2019.

**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 95. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tanah Bumbu

Seluruh Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun penilaian 2021 diinisiasi oleh OPD. Tidak ada inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat di tahun 2021.

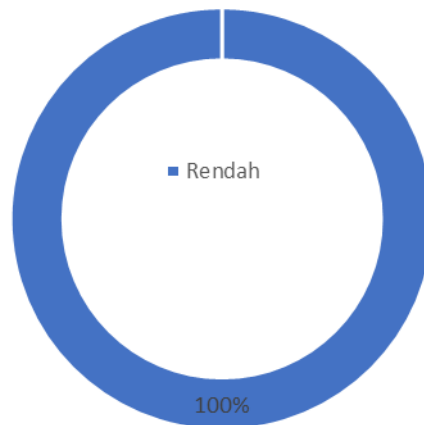
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Gambar 96. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanah Bumbu

Inovasi daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu hanya pada urusan Komunikasi dan Informatika yaitu sebanyak 1 inovasi.

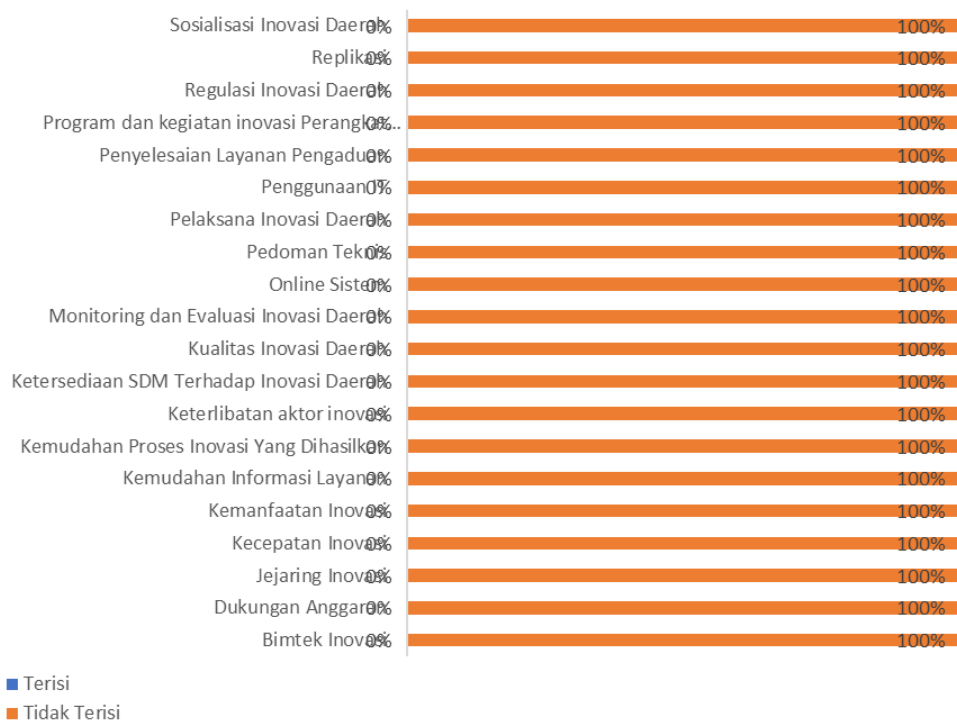
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 97. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanah Bumbu

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi Kabupaten Tanah Bumbu berada di skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

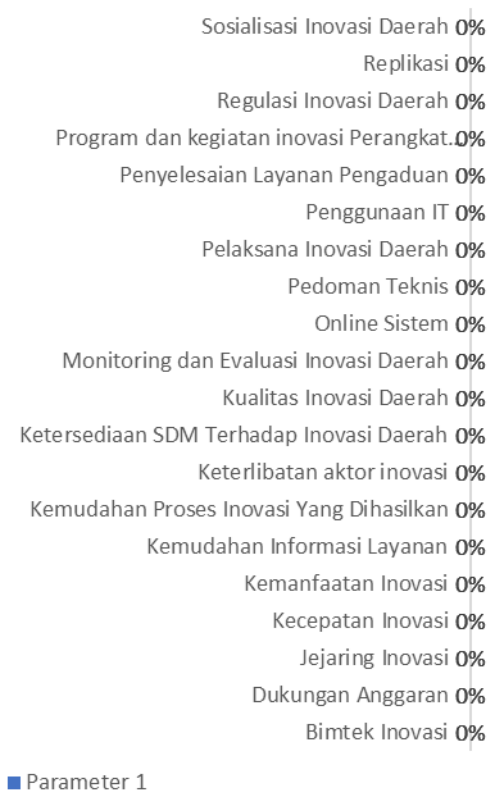
### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 98. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu, diketahui bahwa seluruh inovasi tidak terisi data pendukung atau *evidence* pada indikator satuan inovasi daerah

**i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 99. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah Kabupaten Tanah Bumbu diperoleh hasil bahwa tidak terdapat keterisian data pendukung atau *evidence* untuk seluruh parameter.

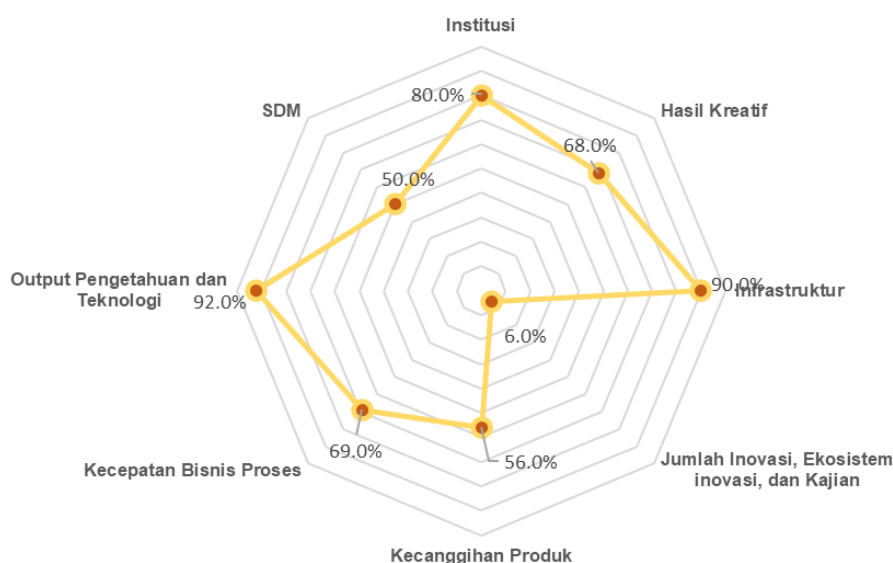
**j. Daftar Inovasi Kabupaten Tanah Bumbu beserta Skor Kematangannya**

Tabel 2. 9. Daftar Inovasi Kabupaten Tanah Bumbu beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
SIMENTEL (Sistem Informasi Menara Telekomunikasi)	0



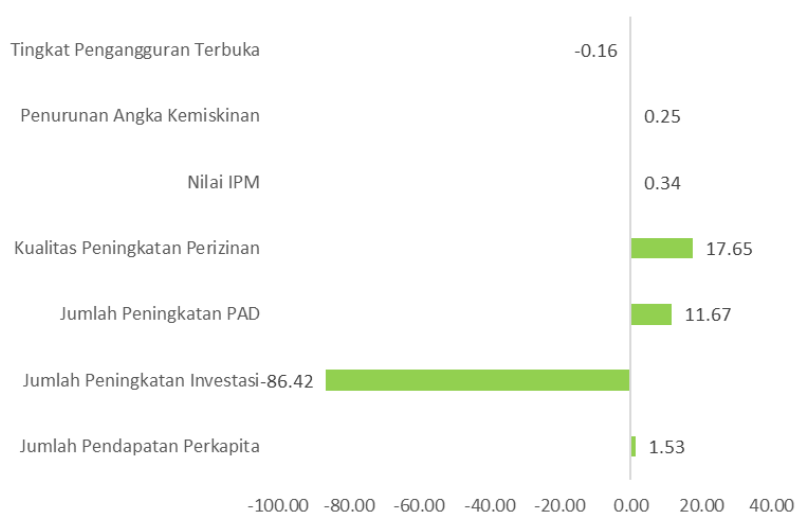
## J. KABUPATEN TANAH LAUT



Gambar 100. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tanah Laut memiliki skor tertinggi pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi, yaitu 92.0%. Artinya secara umum seluruh indikator - indikator pada variabel Output Pengetahuan dan Teknologi sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian sangat rendah, yaitu 6.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut cukup rendah atau berada pada parameter 1.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 101. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanah Laut

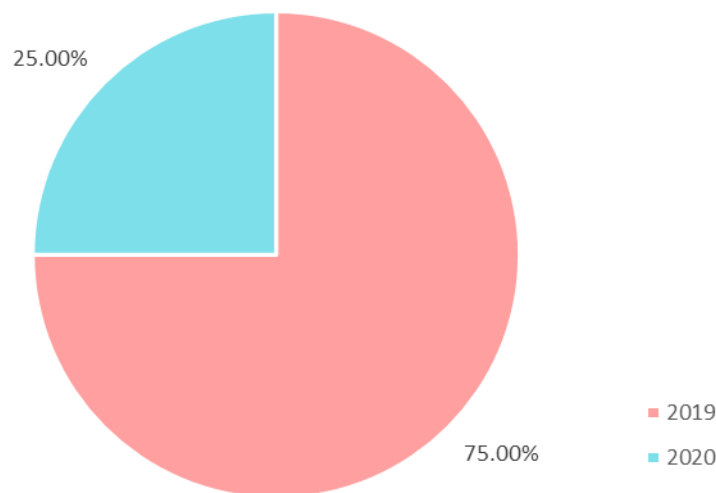
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas

dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tanah Laut pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.16% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.25% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami peningkatan sebesar 0.34% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Tanah Laut menunjukkan peningkatan pada angka 17.65% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 11.67% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami penurunan sebesar 86.42% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan sebesar 1.53% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

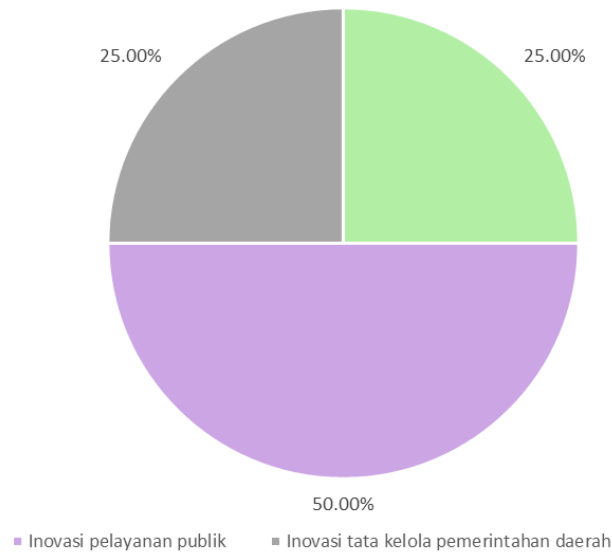
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 102. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanah Laut telah diterapkan sejak tahun 2019 sebesar 75.00% dan sisanya tahun 2020 sebesar 25.00% inovasi.

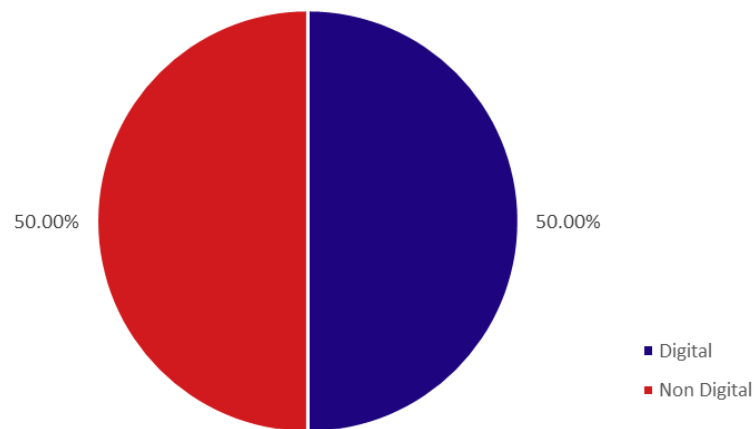
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 103. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 50.00%, kemudian 25.00% merupakan inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan sisanya sebesar 25.00% adalah inovasi lainnya.

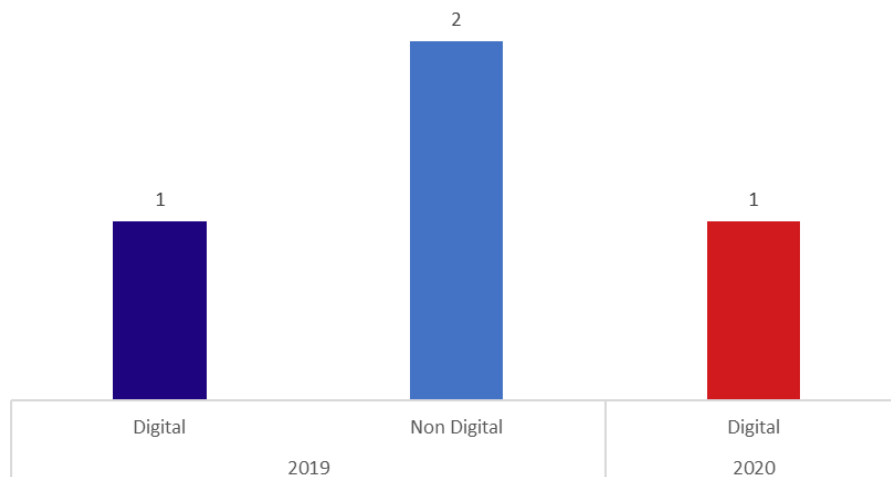
### c. Berdasarkan Jenis Inovasi



Gambar 104. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 50.00% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Tanah Laut merupakan inovasi digital, dan sisanya sebesar 50.00% merupakan inovasi non digital.

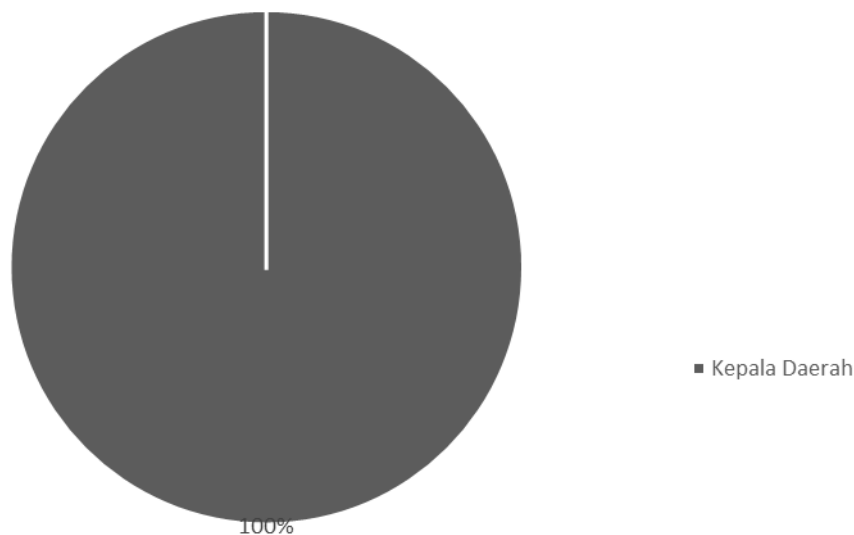
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 105. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tanah Laut

Dapat dilihat perbandingan jumlah inovasi antara tahun 2019 dan 2020 bahwa inovasi digital tidak mengalami kenaikan maupun penurunan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 1 inovasi kemudian pada tahun 2020 tetap 1 inovasi. Sedangkan inovasi non digital mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi lalu pada tahun 2020 menjadi 0 inovasi atau tidak menerapkan inovasi non digital.

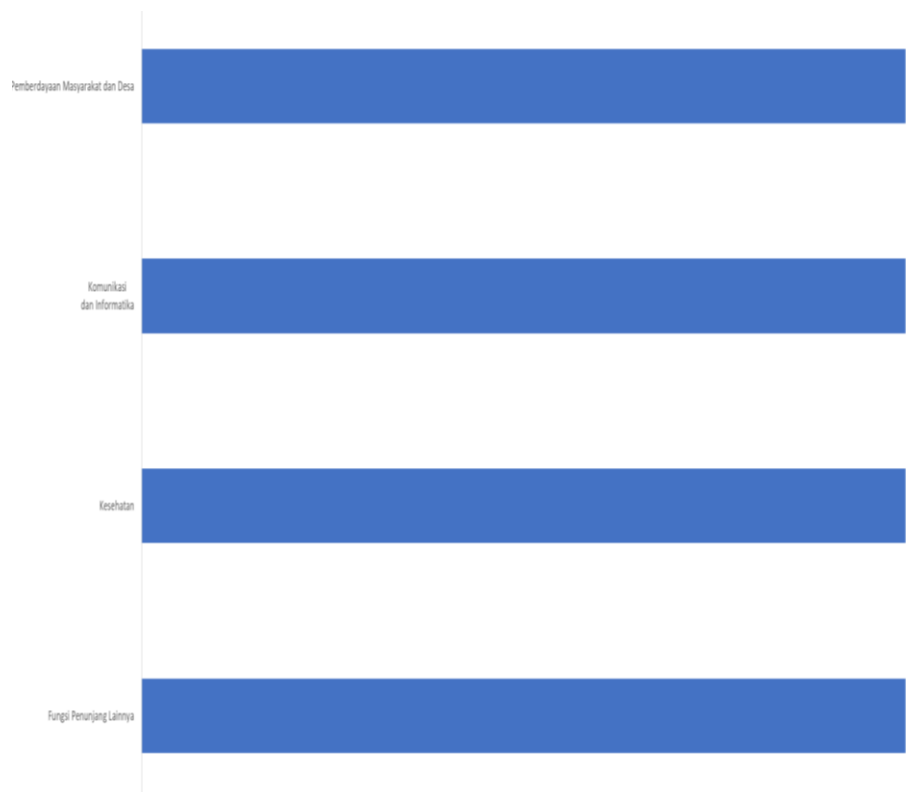
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 106. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tanah Laut

Seluruh Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun penilaian 2021 diinisiasi oleh Kepala Daerah. Tidak ada inovasi yang diinisiasi oleh ASN, OPD, DPRD, dan Masyarakat di tahun 2021.

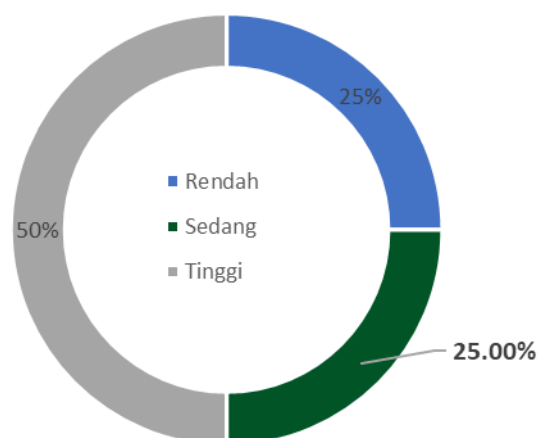
#### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan



Gambar 107. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tanah Laut

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tanah Laut berdasarkan urusan pemerintahan yaitu urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan komunikasi dan informatika, urusan kesehatan dan urusan fungsi penunjang lainnya masing-masing sejumlah 1 inovasi.

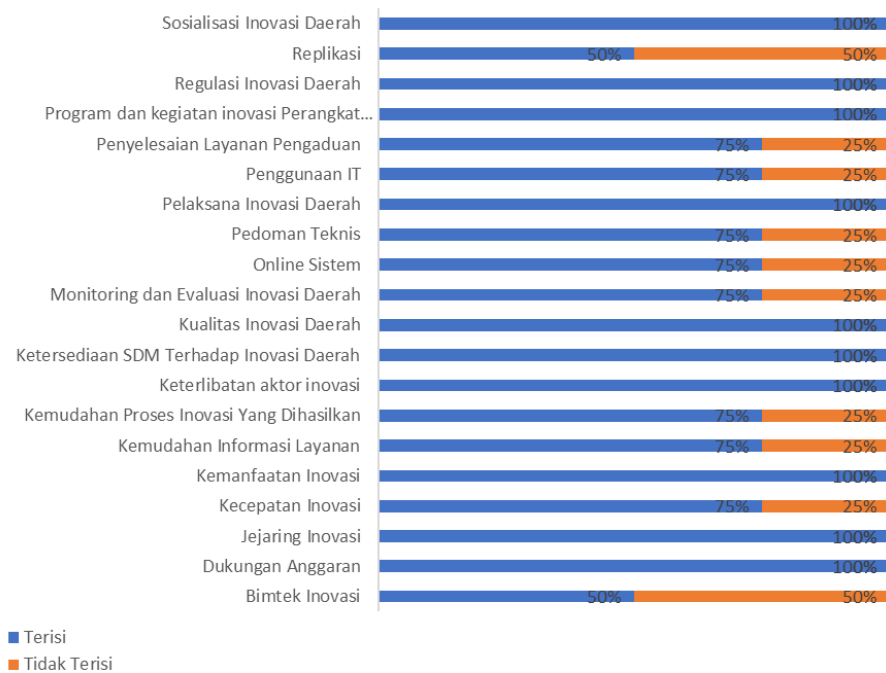
#### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 108. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tanah Laut

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan tinggi, yaitu sebesar 50.00% dari total inovasi sementara untuk kategori sedang sebesar 25.00% dan kategori rendah sebesar 25.00%. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

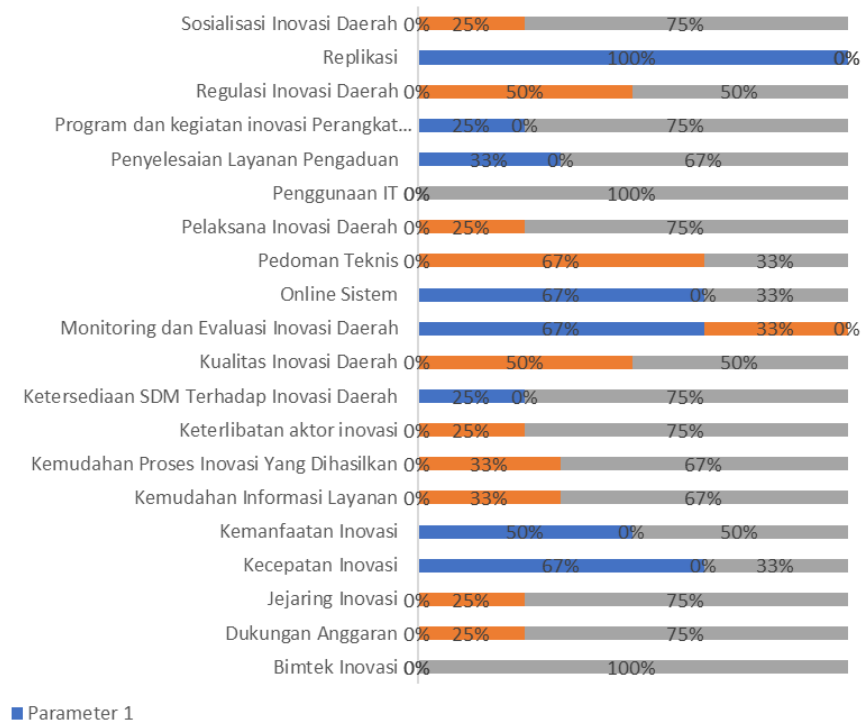
#### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 109. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tanah Laut, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 85.00% sedangkan 15.00% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator sosialisasi inovasi daerah, regulasi inovasi daerah, program dan kegiatan inovasi perangkat daerah, pelaksana inovasi daerah, kualitas inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, keterlibatan aktor inovasi, kemanfaatan inovasi, jejaring inovasi dan dukungan anggaran menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 100% sedangkan indikator replikasi dan bimtek inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 50%.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 110. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

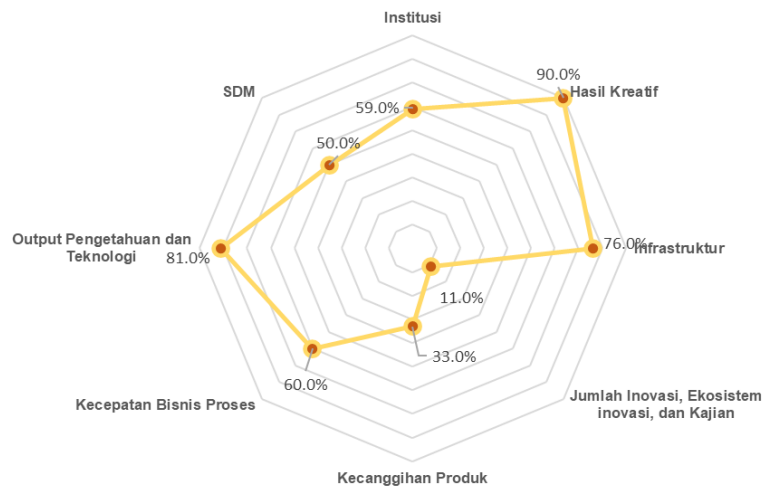
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah penggunaan IT dan bimtek inovasi sebesar 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah pedoman teknis sebesar 67%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator replikasi sebesar 100% artinya seluruh inovasi telah terisi data pendukung yang sesuai dengan parameter pertama untuk indikator replikasi.

## j. Daftar Inovasi Kabupaten Tanah Laut beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. 10. Daftar Inovasi Kabupaten Tanah Laut beserta Skor Kematangannya

Nama Inovasi	Skor Kematangan
Satu Data Tanah Laut	105
Program Manunggal Tuntung Pandang Bermalam di Desa	84
PSC 119 Tala ( Public Safety Center 119 Tala )	120
Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut	48

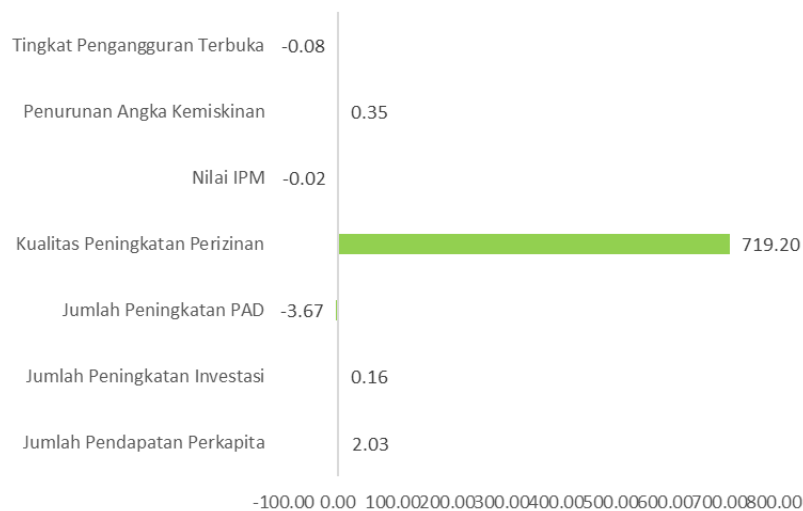
## K. KABUPATEN TAPIN



Gambar 111. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tapin

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kabupaten Tapin memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 90.0%. Artinya secara umum seluruh indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian cukup rendah, yaitu 11.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut cukup rendah atau berada pada parameter 1.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 112. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tapin

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tapin pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.08% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar

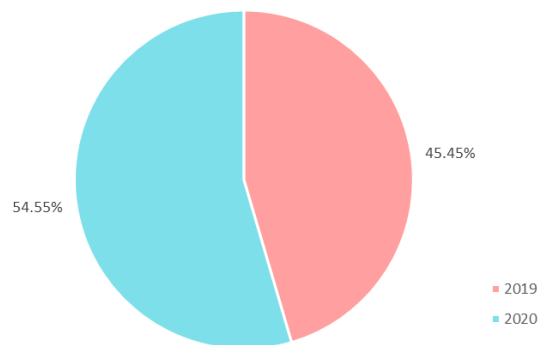


0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.35% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami penurunan sebesar 0.02% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kabupaten Tapin menunjukkan peningkatan pada angka 719.20% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 3.67% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 0.16% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kabupaten Tapin mengalami peningkatan sebesar 2.03% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

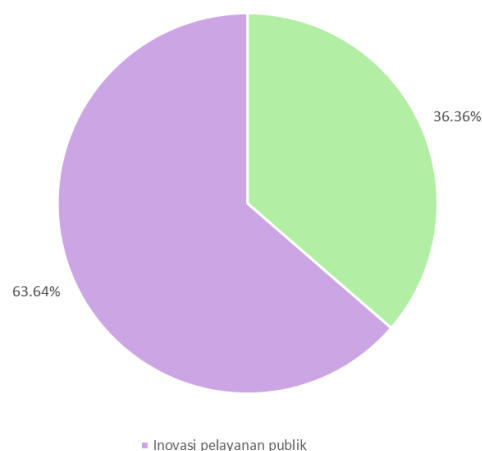
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 113. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kabupaten Tapin

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tapin telah diterapkan pada tahun 2020 sebesar 54.55% dan sisanya sejak tahun 2019 sebesar 45.45% inovasi.

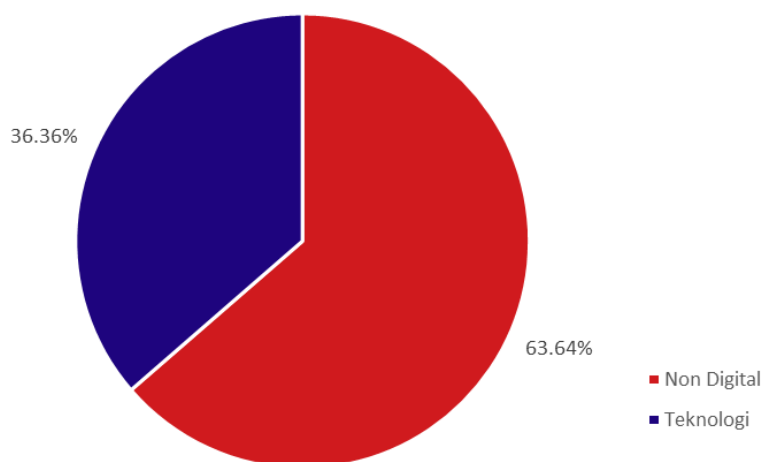
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 114. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kabupaten Tapin

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 63.64% dan sisanya sebesar 36.36% adalah inovasi lainnya.

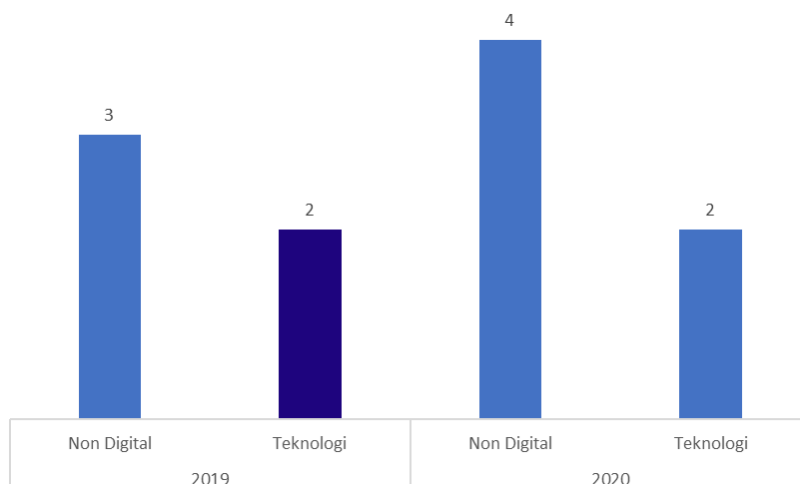
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 16. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kabupaten Tapin

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 63.64% inovasi yang dilaporkan Kabupaten Tapin merupakan inovasi non digital, dan sisanya sebesar 36.36% merupakan inovasi teknologi.

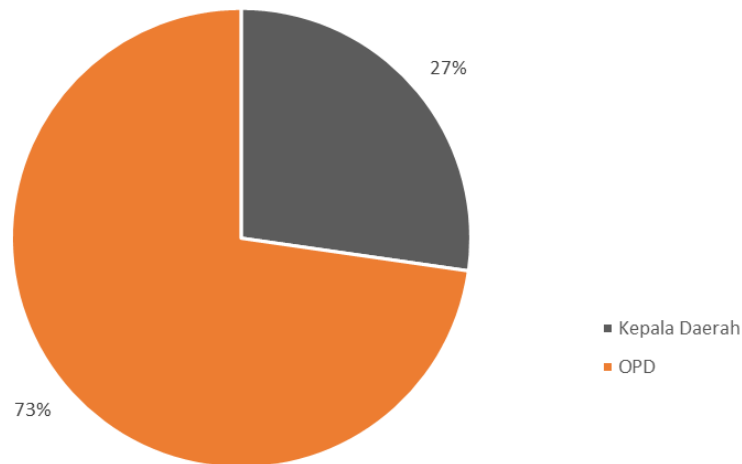
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



Gambar 115. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kabupaten Tapin

Dapat dilihat perbandingan jumlah inovasi antara tahun 2019 dan 2020 bahwa inovasi non digital mengalami sedikit kenaikan di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 3 inovasi kemudian pada tahun 2020 menjadi 4 inovasi. Sedangkan inovasi teknologi mengalami tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi lalu pada tahun 2020 tetap 2 inovasi.

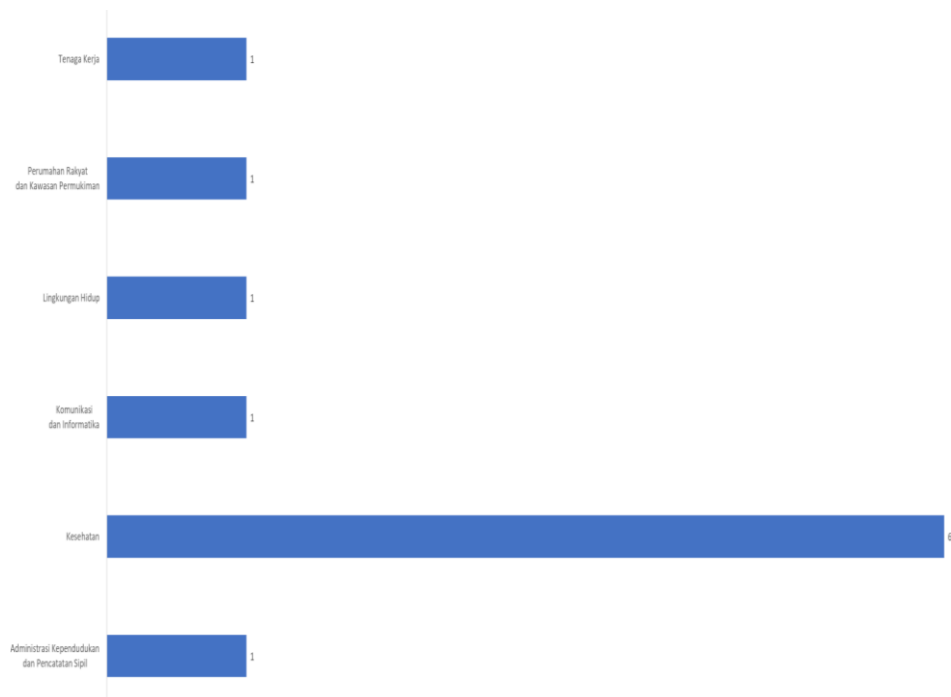
### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 116. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kabupaten Tapin

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kabupaten Tapin pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sebesar 73.00% inovasi dan sisanya sebesar 27.00% diinisiasi oleh Kepala Daerah. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh ASN, DPRD dan masyarakat belum dilaporkan di tahun 2021.

### f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan

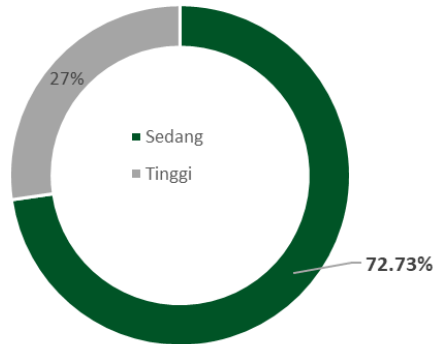


Gambar 117. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kabupaten Tapin

Sebaran inovasi daerah pada Kabupaten Tapin berdasarkan urusan pemerintahan yaitu mayoritas merupakan urusan kesehatan sebanyak 6 inovasi. Kemudian urusan tenaga

kerja, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masing-masing sejumlah 1 inovasi.

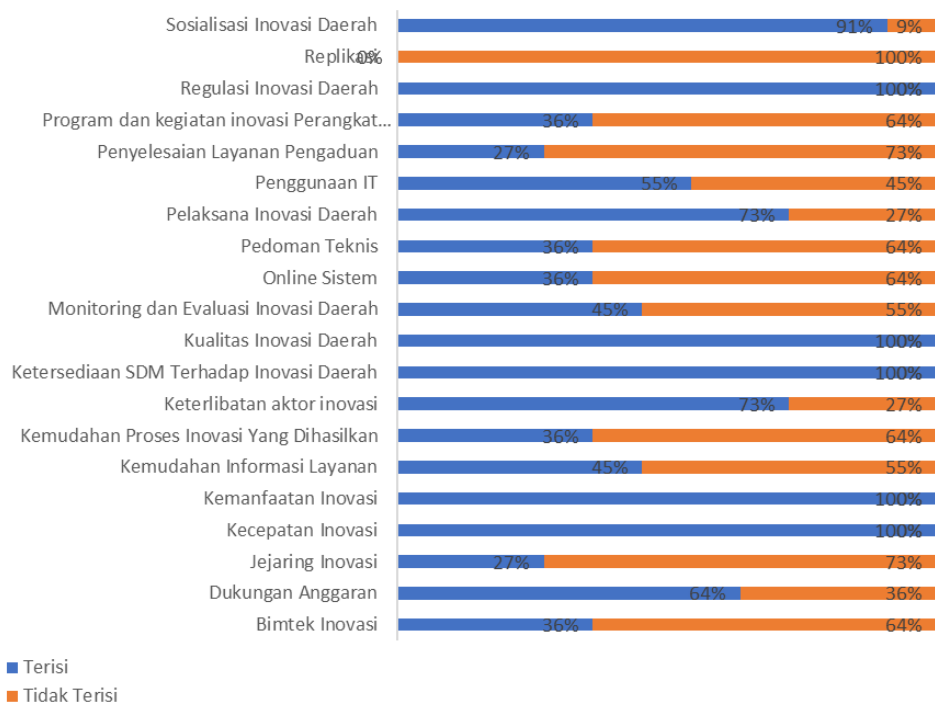
**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**



Gambar 118. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kabupaten Tapin

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi sudah mencapai skor kematangan sedang, yaitu sebesar 72.73% dari total inovasi sementara sisanya untuk kategori tinggi sebesar 27.00%. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

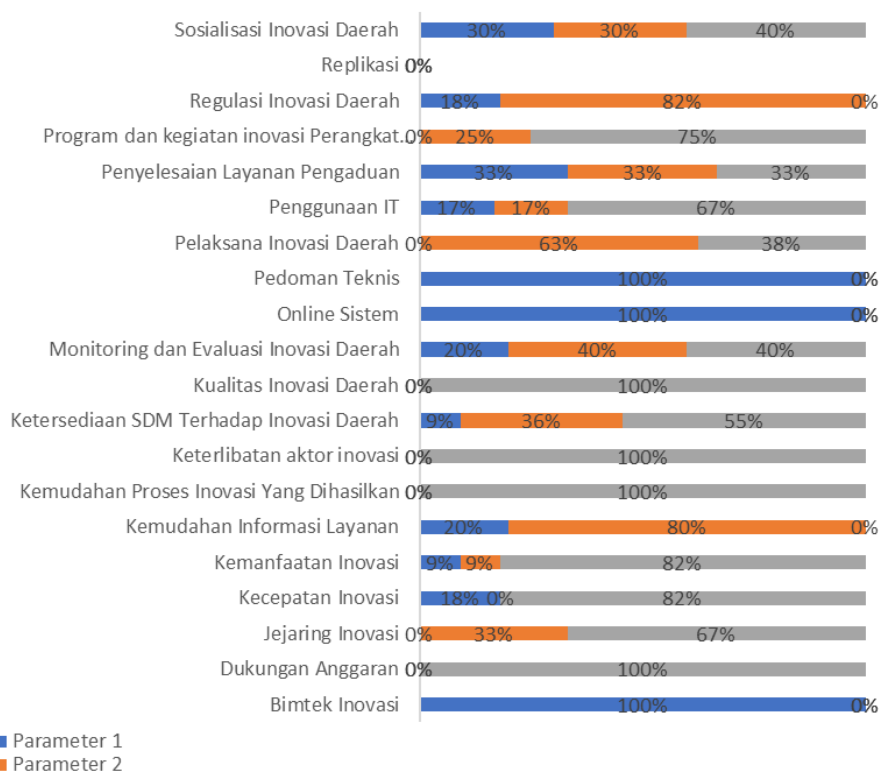
**h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah**



Gambar 119. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tapin

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kabupaten Tapin, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 59.09% sedangkan 40.91% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator regulasi inovasi daerah, kualitas inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, kemanfaatan inovasi dan kecepatan inovasi menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 100% sedangkan indikator replikasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 100%.

### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 120. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah keterlibatan aktor inovasi, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan dan dukungan anggaran sebesar 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah regulasi inovasi daerah sebesar 82%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator pedoman teknis, online sistem dan bimtek inovasi sebesar 100%.

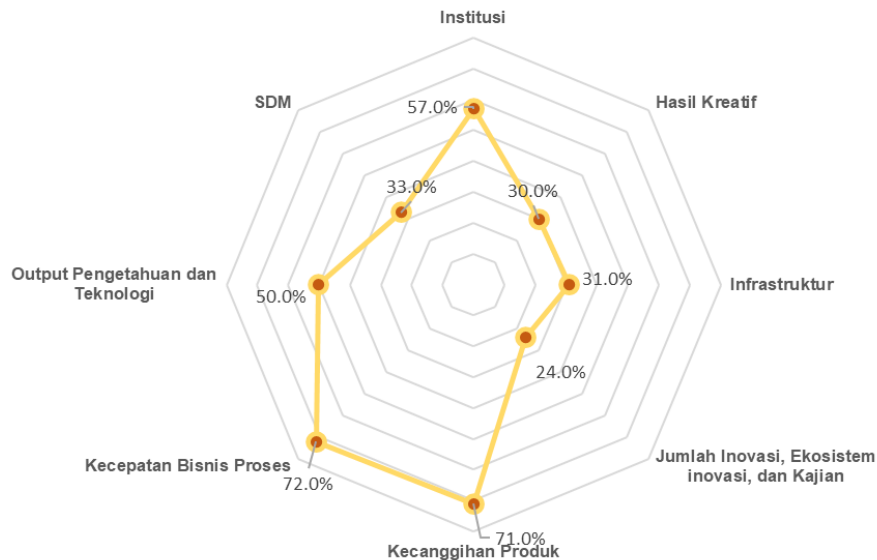
### j. Daftar Inovasi Kabupaten Tapin beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. II. Daftar Inovasi Kabupaten Tapin beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PESUGIHAN (Penataan Sungai Margasari - Pandahan)	61
SELANTING (Selamatkan Anak Tapin dari Stunting)	92
DEKDEKAN CORONA (Dapatkan Dokumen Kependudukan Dengan Chat Online Nongkrong di Rumah Aja)	105
PELAYANAN "DATU KABUL" (DATang TUntung KAREna Berkas)	110

Ulun Lengkap)	
ASINAN PEDAS (Ayo berSalin di fasilitas kesehaTAN dengan Pelayanan jEmpuT Dan Antar Selalu)	88
PHBS SQUAD (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)	105
SI-P3K (Sistem Pemberdayaan Perusahaan Peduli Kesehatan)	55
TT WUS BERPRESTASI (Wanita Usia Subur Berperan Serta Aktif Dalam Kegiatan Imunisasi Tetanus Toksoid)	55
Kolaborasi Perlindungan Primata Bekantan Tapin	59
DR RUSTRI (Daftar Rawatjalan RUMah Sakit Tanpa anTRI)	57
MENJAMUR SMART CITY KABUPATEN TAPIN (MENARA JARINGAN MENUJU GENARASI SMART CITY)	60

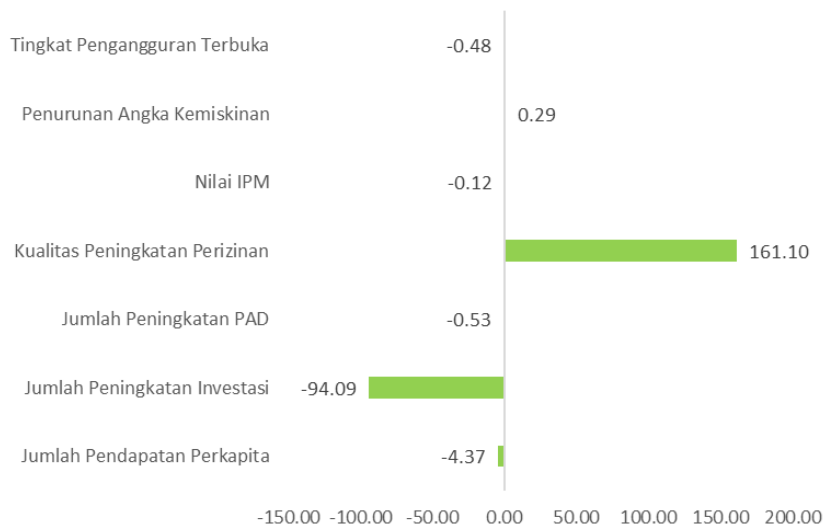
## L. KOTA BANJARBARU



Gambar 121. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjarbaru

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Banjarbaru memiliki skor tertinggi pada variabel Kecepatan Bisnis Proses, yaitu 72.0%. Artinya secara umum seluruh indikator - indikator pada variabel Kecepatan Bisnis Proses sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Jumlah Inovasi, Ekosistem Inovasi dan Kajian cukup rendah, yaitu 24.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut cukup rendah atau berada pada parameter 1.

## 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



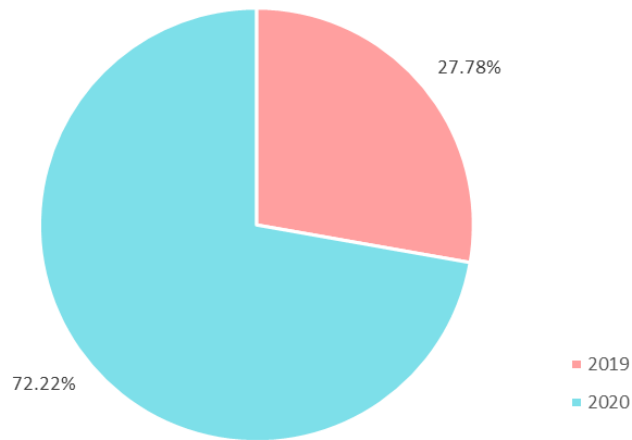
Gambar 122. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjarbaru

Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjarbaru pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.48% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0.29% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM mengalami penurunan sebesar 0.12% dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kota Banjarbaru menunjukkan peningkatan pada angka 161.10% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami penurunan sebesar 0.53% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami penurunan sebesar 94.09% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kota Banjarbaru mengalami penurunan sebesar 4.37% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

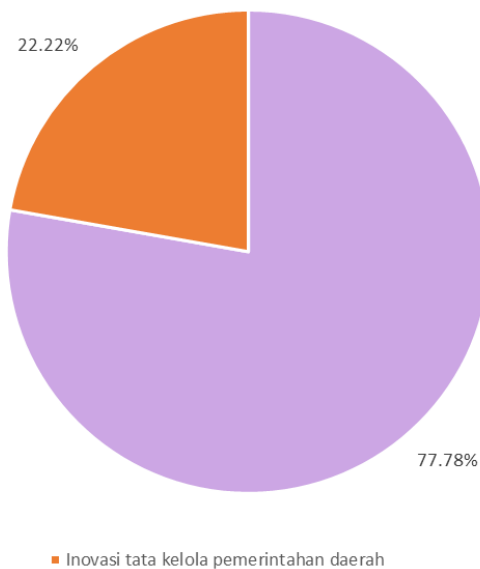
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 123. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Banjarbaru

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banjarbaru telah diterapkan pada tahun 2020 sebesar 72.22% dan sisanya sejak tahun 2019 sebesar 27.78% inovasi.

### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi

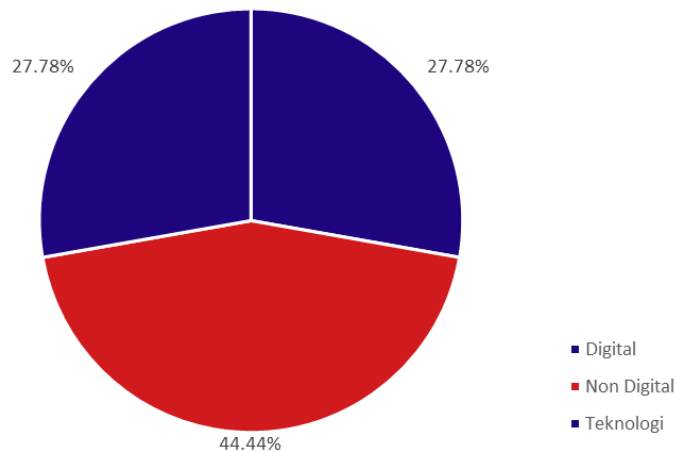


Gambar 124. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banjarbaru

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 77.78% dan sisanya sebesar 22.22% adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.



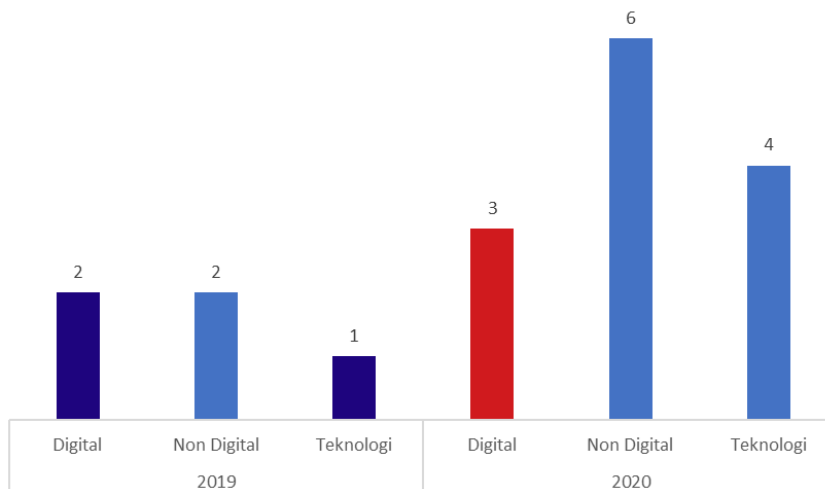
**c. Berdasarkan Jenis Inovasi**



Gambar 125. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banjarbaru

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 44.44% inovasi yang dilaporkan Kota Banjarbaru merupakan inovasi non digital, sebesar 27.78% merupakan inovasi digital dan sisanya sebesar 27.78% merupakan inovasi teknologi.

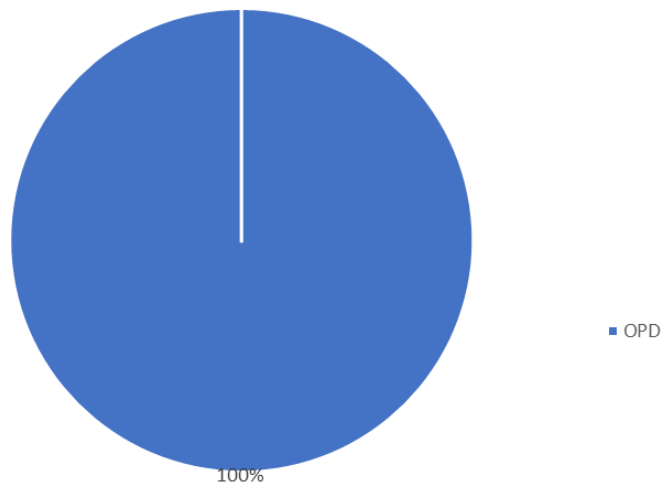
**d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi**



Gambar 126. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banjarbaru

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital, non digital, maupun inovasi teknologi. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi namun pada tahun 2020 naik menjadi 3 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 2 inovasi lalu pada tahun 2020 naik menjadi 6 inovasi. Inovasi teknologi juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 1 inovasi lalu pada tahun 2020 naik menjadi 4 inovasi.

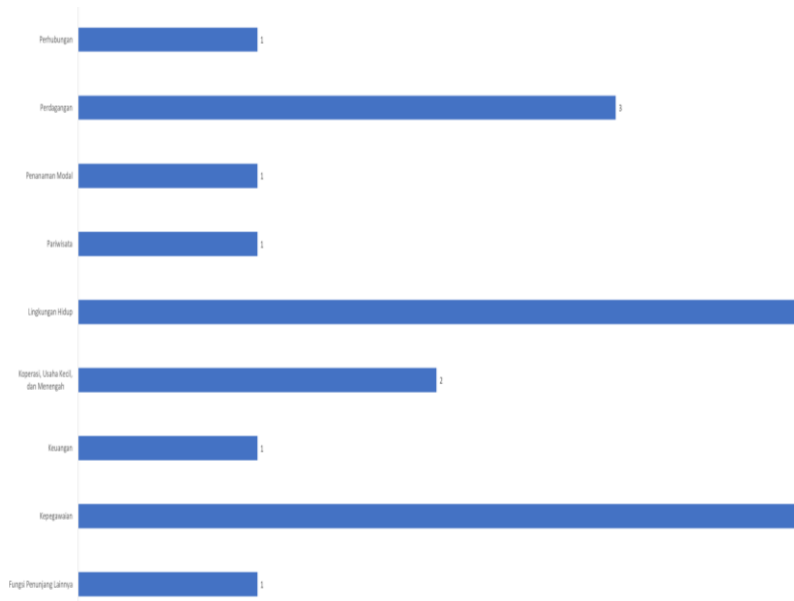
**e. Berdasarkan Inisiator Inovasi**



Gambar 127. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Banjarbaru

Seluruh Inovasi Daerah yang dilaporkan oleh Kota Banjarbaru pada tahun penilaian 2021 diinisiasi oleh OPD. Tidak ada inovasi yang diinisiasi oleh ASN, Kepala Daerah, DPRD, dan Masyarakat di tahun 2021.

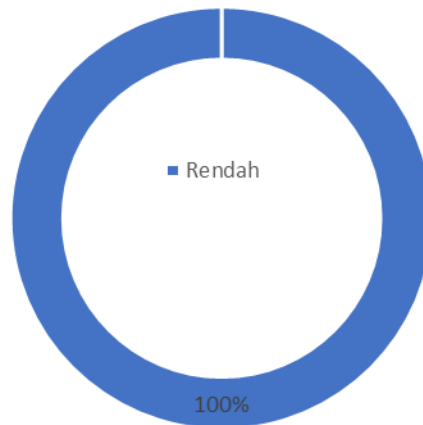
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Gambar 128. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Banjarbaru

Sebaran inovasi daerah pada Kota Banjarbaru berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan lingkungan hidup dan urusan kepegawaian dengan 4 inovasi.

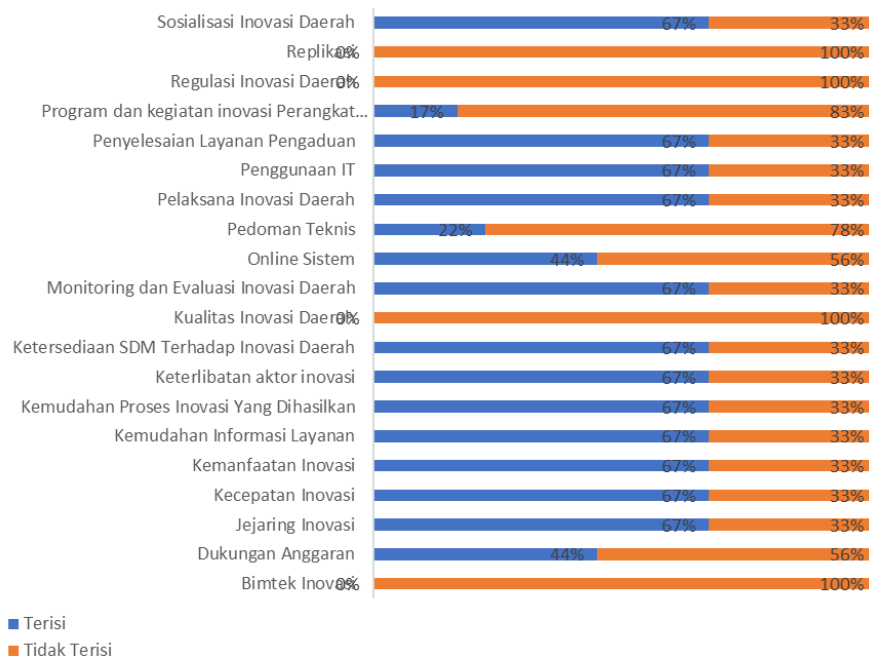
### g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan



Gambar 129. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Banjarbaru

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, seluruh inovasi Kota Banjarbaru berada di skor kematangan rendah. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

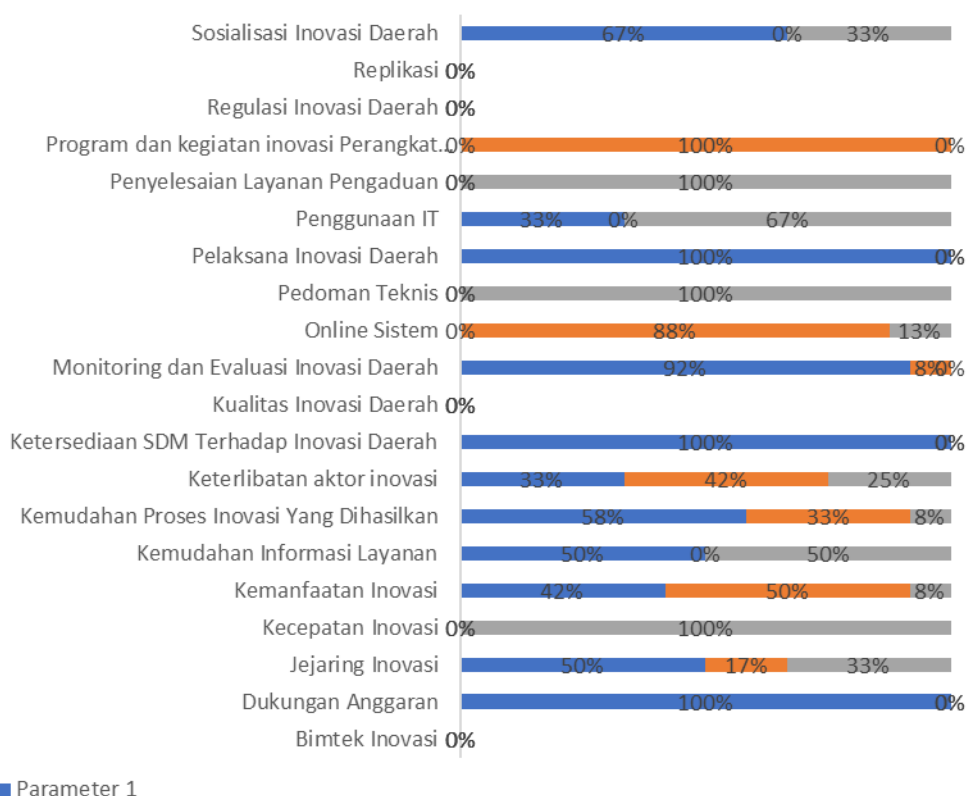
### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 130. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarbaru

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banjarbaru, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 46.39% sedangkan 53.61% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator sosialisasi inovasi daerah, penyelesaian layanan pengaduan, penggunaan IT, pelaksana inovasi daerah, monitoring dan evaluasi inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, keterlibatan aktor inovasi, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, kemudahan informasi layanan, kemanfaatan inovasi, kecepatan inovasi dan jejaring inovasi menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 67% sedangkan indikator replikasi, regulasi inovasi daerah dan bimtek inovasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 100%.

#### i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 131. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

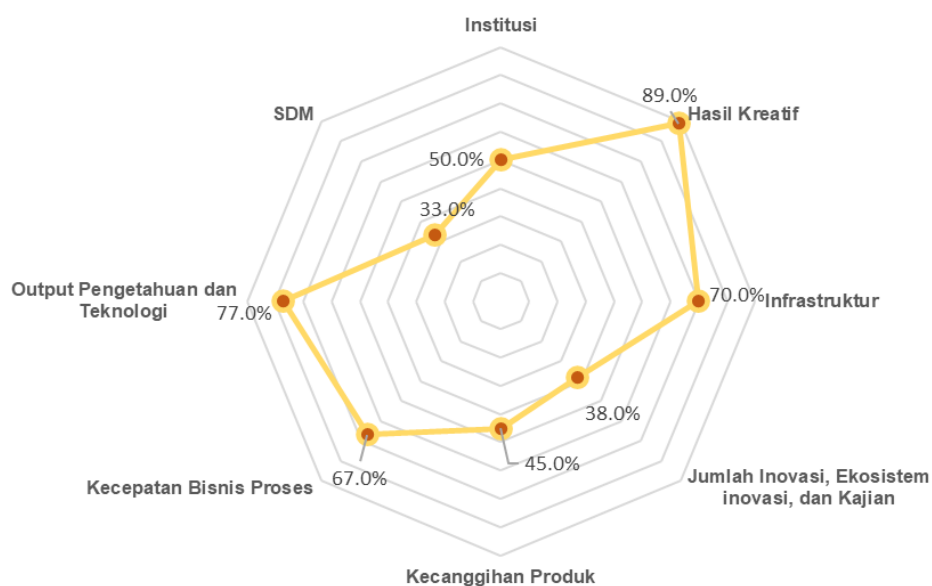
Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah penyelesaian layanan pengaduan dan kecepatan inovasi sebesar 100%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah program dan kegiatan inovasi perangkat daerah sebesar 88%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator pelaksana inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah dan dukungan anggaran sebesar 100%.

**j. Daftar Inovasi Kota Banjarbaru beserta Skor Kematangannya**

Tabel 2. 12. Daftar Inovasi Kota Banjarbaru beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
PASAR TRADISIONAL BANJARBARU MENUJU "THE NEW NORMAL DENGAN "BANYIRU" (BELANJA BAYAR DI RUMAH)	0
HOTEL BANJARBARU MENUJU "NEW NORMAL" DENGAN PEMBATAAN FISIK RUANG RAPAT & MAKAN	0
PASAR MODERN BANJARBARU MENUJU "THE NEW NORMAL" DENGAN SISTEM JALUR 1 ARAH	0
PTSP BANJARBARU MENUJU "THE NEW NORMAL" DENGAN PENDAFTARAN ONLINE	0
RESTORAN BANJARBARU MENUJU "THE NEW NORMAL" PELAYANAN JUICE LEMON GRATIS	0
TRANSPORTASI UMUM BANJARBARU MENUJU "THE NEW NORMAL" DENGAN ANGKUTAN UMUM GRATIS	0
Sistem Transaksi Laporan dan Administrasi Keuangan Koperasi (SALAM KOPERASI)	6
Kenaikan Gaji Berkala Otomatis	6
Sistem Aplikasi Pangkat dan Jabatan (SiaPaJa)	6
Banjarbaru Bagawi	12
Sampai (Sistem Administrasi Umum Kepegawaian)	6
E-L.PBB (Aplikasi Elektronik Laporan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan)	0
Database UMKM	0
Pembangunan IPAL Tahu/Tempe	0
Implemetasi ISO 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi	0
Pengurangan Kantong Plastik	6
Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah	0
INTAN BJB	6

## M. KOTA BANJARMASIN



Gambar 132. Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjarbaru

Berdasarkan diagram variabel ukur indeks inovasi daerah di atas, Kota Banjarbaru memiliki skor tertinggi pada variabel Hasil Kreatif, yaitu 89.0%. Artinya secara umum seluruh indikator - indikator pada variabel Hasil Kreatif sudah memiliki skor yang mendekati skor maksimal (parameter 3). Namun skor variabel Sumber Daya Manusia cukup rendah, yaitu 33.0% dimana secara umum capaian skor indikator – indikator pada variabel tersebut cukup rendah atau berada pada parameter 1.

### 1. Aspek Satuan Pemerintah Daerah



Gambar 133. Grafik Capaian Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjarmasin

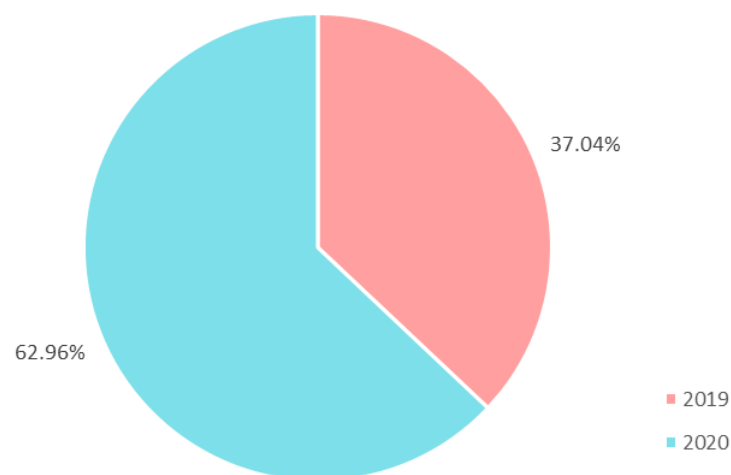
Laporan Inovasi Daerah Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat data pengukuran inovasi daerah tahun 2019 dan 2020. Dalam laporan tersebut terdapat aspek Satuan Pemerintah Daerah dan Satuan Inovasi Daerah sesuai dengan Indeks Inovasi Daerah. Melalui grafik di atas

dapat dilihat bahwa pada Aspek Satuan Pemerintah Daerah pada Kota Banjarmasin pada Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0.178% dengan perbandingan standar parameter bagi tingkat pengangguran terbuka seharusnya turun sebesar 0.92%. Indikator Penurunan Angka Kemiskinan tidak mengalami penurunan maupun peningkatan sebesar 0.00% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Angka Kemiskinan seharusnya naik sebesar 0.02%. Indikator Nilai IPM tidak mengalami penurunan maupun peningkatan sebesar 0.00% telah sesuai dengan perbandingan standar parameter bagi nilai IPM sebesar 0% atau tetap.

Kualitas Peningkatan Perizinan pada Kota Banjarmasin menunjukkan penurunan pada angka 1.62% dengan perbandingan standar parameter bagi Penurunan Kualitas Peningkatan Perizinan seharusnya meningkat sebesar 5%. Indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami peningkatan sebesar 29.88% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan PAD seharusnya naik sebesar 8%. Indikator jumlah peningkatan investasi mengalami peningkatan sebesar 28.43% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah peningkatan investasi seharusnya naik sebesar 0.45%. Sedangkan jumlah pendapatan perkapita Kota Banjarmasin mengalami peningkatan sebesar 25.00% dengan perbandingan standar parameter bagi jumlah pendapatan perkapita seharusnya turun sebesar 1.85%.

## 2. Aspek Satuan Inovasi Daerah

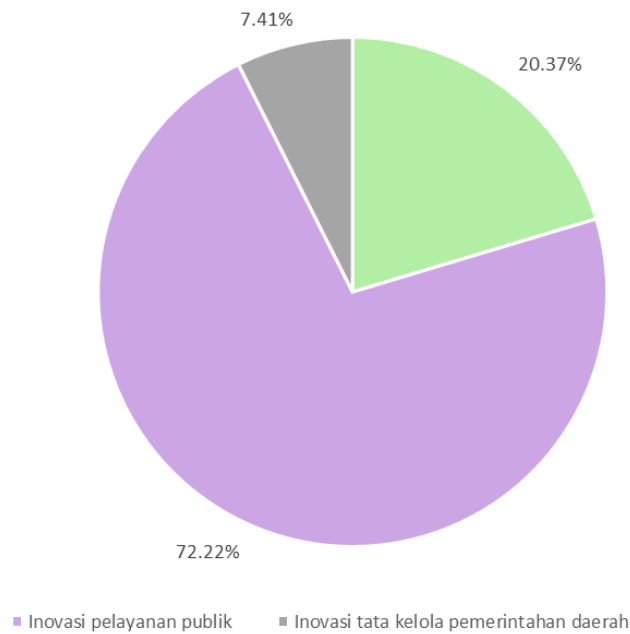
### a. Berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi



Gambar 134. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tahun Penerapan Inovasi pada Kota Banjarmasin

Dilihat dari tahun penerapan inovasi, sebagian besar inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banjarmasin telah diterapkan pada tahun 2020 sebesar 62.96% dan sisanya sejak tahun 2019 sebesar 37.04% inovasi.

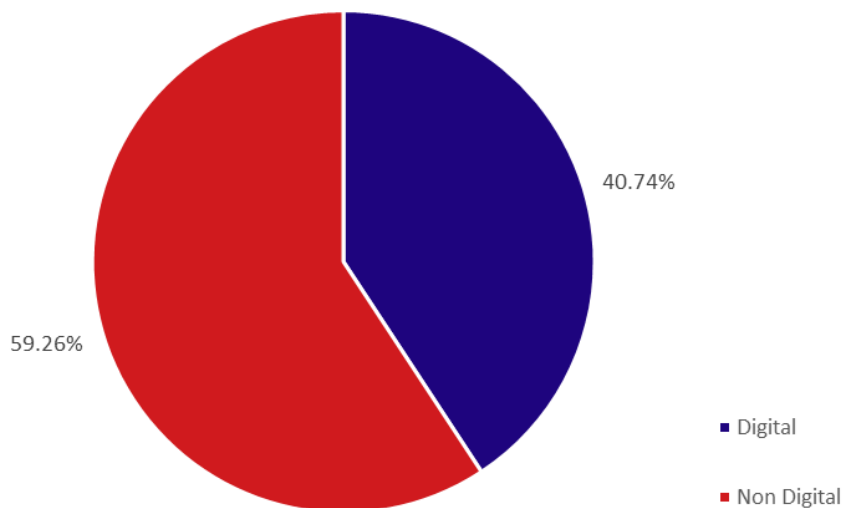
### b. Berdasarkan Bentuk Inovasi



Gambar 135. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Bentuk Inovasi pada Kota Banjarmasin

Berdasarkan bentuk inovasi, proporsi paling besar diketahui merupakan inovasi pelayanan publik sebesar 72.22%, kemudian sebesar 20.37% inovasi daerah lainnya dan sisanya sebesar 7.41% adalah inovasi tata kelola pemerintahan daerah.

### c. Berdasarkan Jenis Inovasi

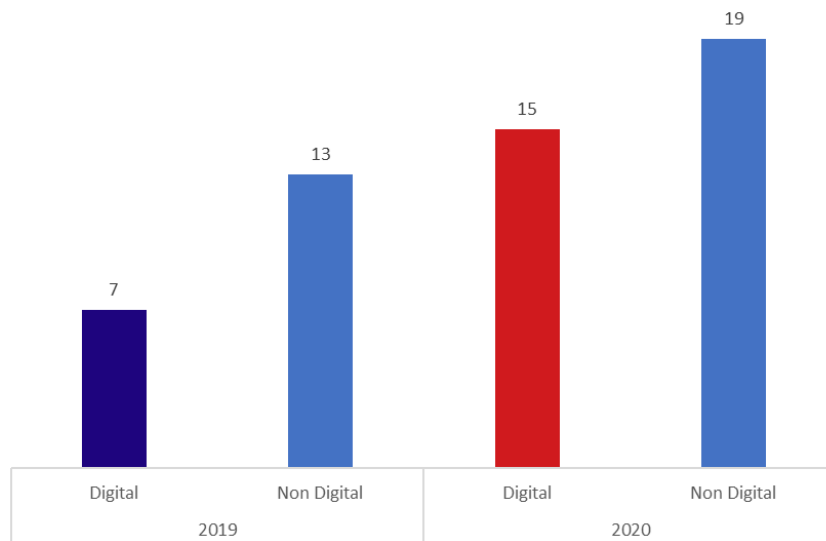


Gambar 136. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Jenis Inovasi pada Kota Banjarmasin

Pada Indeks Inovasi Daerah tahun penilaian 2021 jika dilihat dari jenis inovasinya, sebesar 59.26% inovasi yang dilaporkan Kota Banjarmasin merupakan inovasi non digital dan sisanya sebesar 40.74% merupakan inovasi digital.



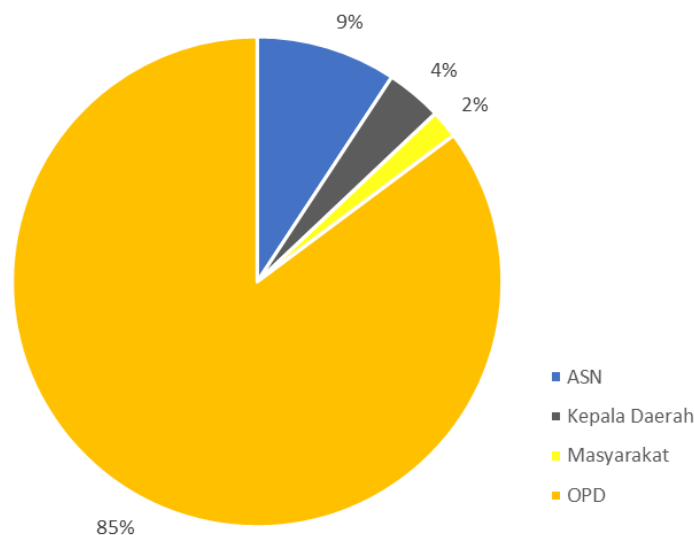
#### d. Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi



Gambar 137. Grafik Progres Jumlah Inovasi Berdasarkan Tahun dan Jenis Inovasi Kota Banjarmasin

Secara umum jumlah inovasi mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, baik inovasi digital dan non digital. Dapat dilihat bahwa inovasi digital meningkat di mana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 7 inovasi namun pada tahun 2020 naik menjadi 15 inovasi. Demikian pula dengan inovasi non digital mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 inovasi yang diterapkan sejumlah 13 inovasi lalu pada tahun 2020 naik menjadi 19 inovasi.

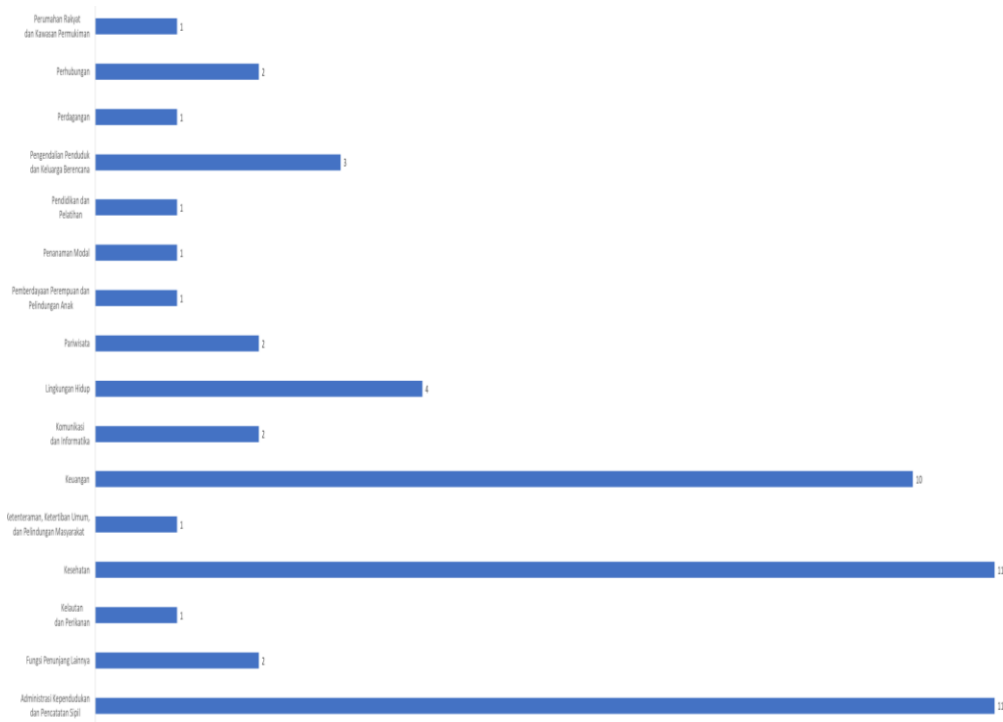
#### e. Berdasarkan Inisiator Inovasi



Gambar 138. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Inisiator Inovasi pada Kota Banjarmasin

Mayoritas inovasi daerah yang dilaporkan oleh Kota Banjarmasin pada tahun 2021 diinisiasi oleh OPD, yaitu sebesar 85.00% inovasi sementara sebesar 9% diinisiasi oleh ASN, sebesar 4% diinisiasi oleh Kepala Daerah dan sebesar 2% diinisiasi oleh masyarakat. Untuk inovasi yang diinisiasi oleh DPRD belum dilaporkan di tahun 2021.

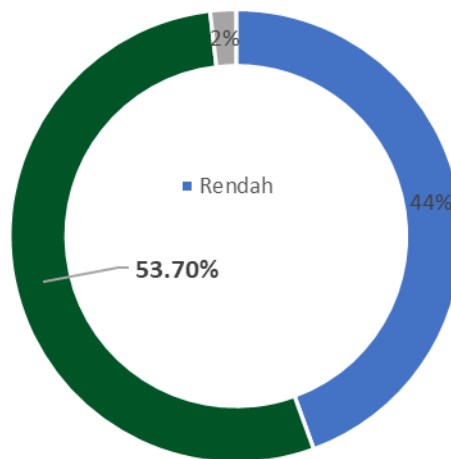
**f. Berdasarkan Urusan Pemerintahan**



Gambar 139. Grafik Jumlah Inovasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan pada Kota Banjarmasin

Sebaran inovasi daerah pada Kota Banjarmasin berdasarkan urusan pemerintahan cukup merata. Mayoritas urusan inovasi adalah inovasi pada urusan kesehatan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 11 inovasi.

**g. Berdasarkan Tingkat Skor Kematangan**

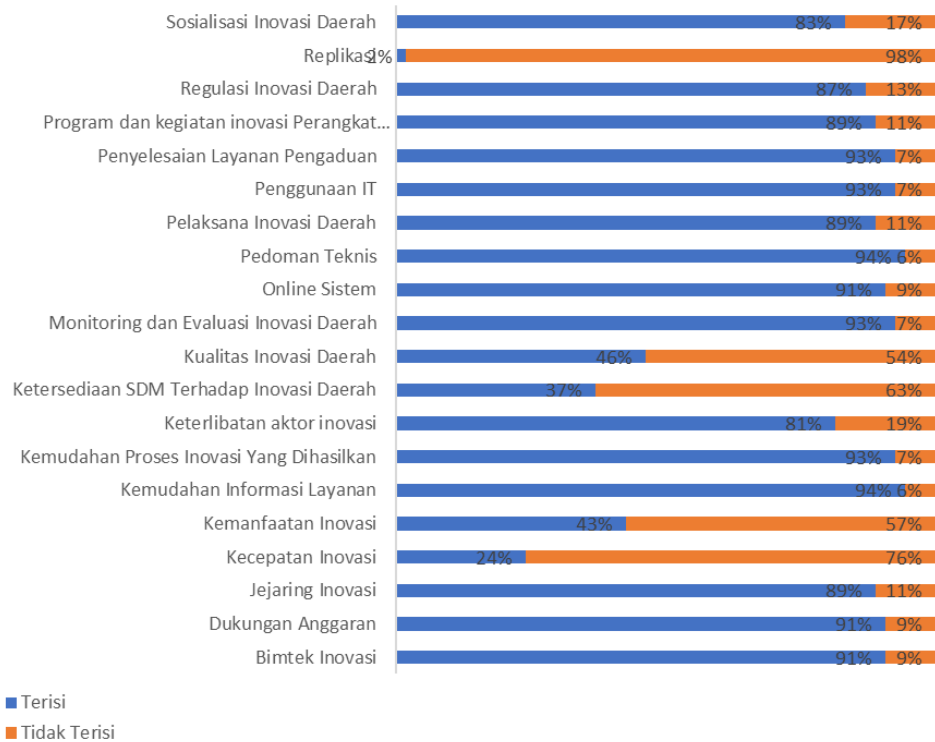


Gambar 140. Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan pada Kota Banjarmasin

Jika dilihat berdasarkan tingkat skor kematangan suatu inovasi, mayoritas inovasi Kota Banjarmasin berada di skor kematangan sedang sebesar 53.70%, kemudian sebesar 44%

berada pada tingkat skor kematangan rendah dan sisanya sebesar 2% mencapai skor tinggi. Sebagai informasi, skor kematangan rendah adalah inovasi yang mencapai skor kematangan dibawah 50, skor kematangan sedang adalah inovasi yang mencapai skor sebesar 50 – 100 dan skor kematangan tinggi adalah inovasi dengan skor kematangan di atas 100.

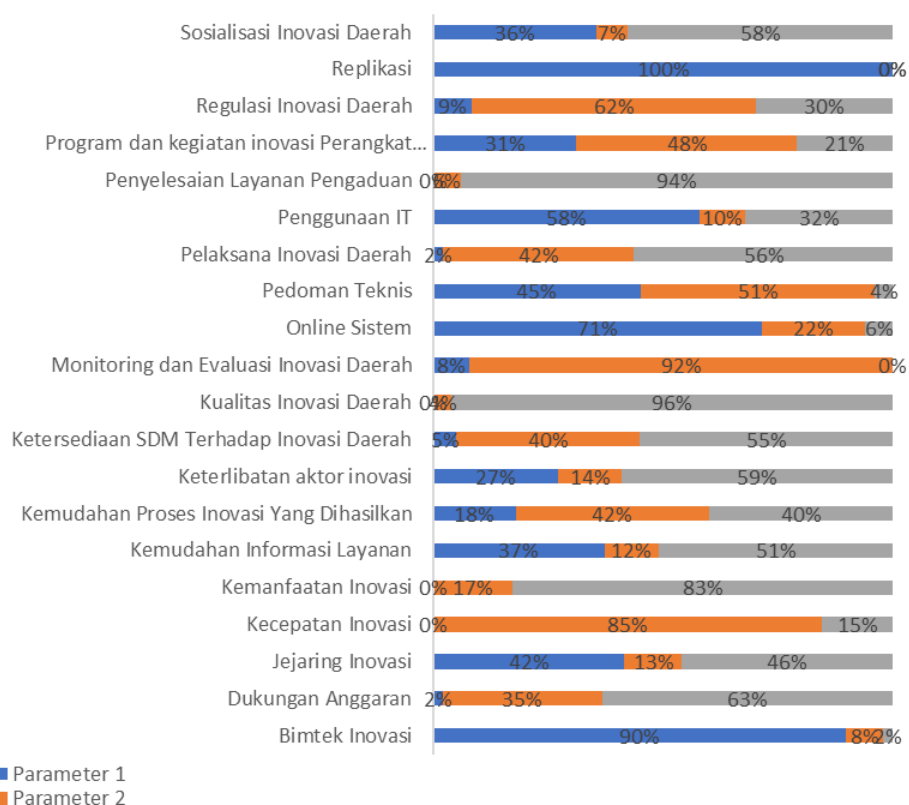
#### h. Tingkat Keterisian Data Pendukung atau Evidence dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 141. Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarbaru

Dari seluruh inovasi yang dilaporkan oleh Kota Banjarbaru, diperoleh rata-rata inovasi yang terisi data pendukung pada indikator satuan inovasi daerah adalah sebesar 75.09% sedangkan 24.91% lainnya tidak terisi data pendukung. Indikator pedoman teknis dan kemudahan informasi layanan menjadi indikator yang paling banyak terisi yaitu sebesar 94% sedangkan indikator replikasi merupakan indikator yang memiliki persentase tingkat ketidak terisian paling tinggi yaitu sebesar 98%.

## i. Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah



Gambar 142. Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah

Dapat dilihat dari indikator satuan inovasi daerah yang dilengkapi dengan data pendukung diperoleh hasil bahwa indikator dengan tingkat keterisian parameter 3 (tiga) yang tertinggi adalah kualitas inovasi daerah sebesar 96%. Kemudian, indikator dengan tingkat keterisian parameter 2 (dua) yang tertinggi adalah monitoring dan evaluasi inovasi daerah sebesar 92%. Selanjutnya, indikator dengan tingkat keterisian parameter 1 (satu) yang tertinggi adalah indikator replikasi sebesar 100%.

## j. Daftar Inovasi Kota Banjarmasin beserta Skor Kematangannya

Tabel 2. 13. Daftar Inovasi Kota Banjarmasin beserta Skor Kematangannya

NAMA INOVASI	SKOR KEMATANGAN
Pasar Wadai Online	45
Pelayanan Obat dengan Kopi TB (Kotak pengingat Minum Obat TB)	73
Ayo Basikat Gigi Saurangan (AYO BASASIRANGAN)	45
GIAT JAJAN SEHAT ( Gigi Sehat Jaga Janin Sehat)	57
TERPIKAT	35
MAMA SUNGAI	35
OJOL ASIK TANPA KANTONG PLASTIK	59
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	51
MANTAB (Mengantar izin tanpa biaya)	113
PCiC (Population Corner in Class)	20

KAMPUNG KB KAMPUNG BAIMAN	29
HIP HIP HURA (Hari Ini Periksa Hari Ini Pasang Hari hari Ulun Rasa Aman)	23
BASAPIDA	58
LHP Online (Laporan Hasil Pengadaan) Online	78
Aplikasi Penghapusan BMD Online	32
Aplikasi RKBMD Online (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) Online	36
Sistem Asistensi Penyusunan RKA-SKPD dan Informasi Keuangan Daerah (Si_APIK)	51
Aplikasi SIGAP ( Sistem Informasi Geospasial Aset Pemko Banjarmasin)	71
Aplikasi SIPS ( Sistem Informasi Pengelolaan Surat ) Bakeuda	38
SmartGov	50
Tapping Box	74
Pasar Wadai Online (PWO)	74
Angkutan Pelajar	57
Trans Banjarmasin	35
Integritas Pelaporan Gangguan Kamtibmas Melalui Aplikasi	26
TANDUK BANTENG (daTA pemerintahAN dan kependuDUKAn Kecamatan Banjarmasin Tengah	29
Penataan Permukiman Pinggir Sungai Dua Muka dan Dermaga Apung	61
maigut Cencil	39
Malam Pertama	61
Radistra	24
KODAK BABEPAS	94
Peningkatan Pelayanan dalam penyampaian laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD melalui aplikasi SIMOLEK (Sistem Informasi Monitoring Laporan Secara Elektronik)	0
Kotak Saran Digital	68
SIFIA ( Aplikasi Fokus Ibu dan Anak )	78
TASIHAT BELAKAS	66
Si TB U	63
IG Live "Bersama Kita BISA" (Bincang Sehat)	94
Ekstra Masin (Edukasi Keluarga Sejahtera Kota Banjarmasin)	33
Bungas Cantik	69
Luntang Lantung	78
Bauntung Batuah	79
Alay	34
Langkar	52
Sakali Talu	48
Lapat	50



# ***BAB III***

---

## ***PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI***



Fokus pembahasan pada bagian ini akan dibatasi pada hal-hal yang menjadi kekurangan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada variabel-variabel dan indikator satuan Inovasi daerah dan perumusan rekomendasi berdasarkan hal tersebut. Ini dikarenakan variabel dan indikator tersebut merupakan indikator input dan proses pendorong inovasi, sementara variabel dan indikator pada satuan pemerintah daerah adalah indikator makro pemerintah daerah yang ditempatkan sebagai indikator output makro pada pemerintah daerah. Variabel dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Pada satuan Inovasi Daerah IID Tahun 2021

SATUAN INOVASI DAERAH	
Variabel	Indikator
<b>Infrastruktur</b>	Regulasi Inovasi Daerah
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah
	Dukungan anggaran
	Penggunaan IT
	Bimtek inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD
<b>Output Pengetahuan dan teknologi</b>	Keterlibatan aktor inovasi
	Pelaksana inovasi daerah
	Jejaring inovasi
	Sosialisasi Inovasi Daerah
<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	Pedoman teknis
	Kemudahan informasi layanan
	Kecepatan penciptaan inovasi
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
	Penyelesaian layanan pengaduan
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem
	Replikasi
	Kecepatan penciptaan inovasi
<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
	Kualitas inovasi daerah

## A. KABUPATEN BALANGAN

Kabupaten Balangan pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 42.62 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat gambar 1 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Balangan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Namun optimalisasi masih harus dilakukan pada beberapa indikator yaitu Output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan hasil kreatif karena masih dibawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).



Tabel 3. 2 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Balangan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

VARIABEL	INDIKATOR	HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN
<b>Output Pengetahuan dan teknologi</b>	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah</li> <li>• melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan</li> </ul>
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda</li> <li>• meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi</li> </ul>
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat,</li> <li>• tanggap menindaklanjuti aduan yang ada</li> <li>• menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan</li> </ul>
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat

		manfaat tinggi
<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan monev inovasi secara berkala</li> <li>• membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi</li> </ul>
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan grafik 8 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Balangan tersebar di 10 (sepuluh) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar meliputi 3 (tiga) urusan yaitu pendidikan, trantibumlinmas, dan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pada perangkat daerah yang belum aktif dalam pelaksanaan Inovasi untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 9 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 10 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tersedia dokumen pendukungnya. Masih diperlukan optimalisasi ketersediaan dokumen pendukung dari indikator yang belum mencapai 60%.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 11 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter presentase terbesar menunjukkan pengisian pada parameter 2. Masih diperlukan optimalisasi pengisian parameter agar memenuhi parameter 3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Balangan

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Program dan kegiatan pada RKPD (5%)	2. Monev Inovasi (0%)
3. Keterlibatan actor Inovasi (30%)	3. Bimtek (0%)
4. Regulasi Inovda (40%)	4. Online Sistem (6%)

5. Penyelesaian layanan aduan (40%)	5. Jejaring Inovasi (11%)
6. Kualitas Inovasi daerah (45%)	6. Pelaksana Inovda (11%)
7. Monev Inovasi (55%)	7. Pedoman Teknis (12%)
	8. Regulasi Inovda (13%)
	9. Keterlibatan actor Inovasi (17%)
	10. Ketersediaan SDM (18%)
	11. Kemanfaatan Inovasi (23%)
	12. Sosialisasi Inovda (33%)
	13. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (33%)
	14. Kemudahan informasi (37%)
	15. Kualitas Inovasi daerah (44%)
	16. Kecepatan Inovasi (47%)
	17. Penggunaan IT (58%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## B. KABUPATEN BANJAR

Kabupaten Banjar pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 48.62 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat gambar 12 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Banjar pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% bahkan 60% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Berdasarkan grafik 19 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Banjar telah tersebar di 24 (dua puluh empat) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar telah ada di seluruh urusan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18(delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pada perangkat daerah yang belum aktif dalam pelaksanaan Inovasi untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 20 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang dan rendah. Gambar 21 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah

tersedia dokumen pendukungnya. Masih diperlukan optimalisasi ketersediaan dokumen pendukung dari indikator yang belum mencapai 60%.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 22 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter presentase terbesar sudah menunjukkan pengisian pada parameter 3 namun masih dapat dioptimalkan pada beberapa indikator karena pengisian parameter 3 masih kurang dari 60%.

Tabel 3. 4 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Banjar

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (18%)	1. Monev Inovasi (11%)
2. Program dan kegiatan pada RKPd (44%)	2. Regulasi Inovda (14%)
3. Penyelesaian layanan aduan (45%)	3. Pelaksana Inovda (18%)
4. Pedoman Teknis (51%)	4. Pedoman Teknis (21%)
5. Online Sistem (53%)	5. Ketersediaan SDM (33%)
	6. Online Sistem (38%)
	7. Bimtek (39%)
	8. Penggunaan IT (40%)
	9. Replikasi (40%)
	10. Penyelesaian layanan aduan (48%)
	11. Kemanfaatan Inovasi (48%)
	12. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (56%)
	13. Kemudahan informasi (58%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

### C. KABUPATEN BARITO KUALA

Kabupaten Barito Kuala pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 33.90 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat gambar 23 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Barito Kuala pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% bahkan 60% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Berdasarkan grafik 30 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Barito Kuala tersebar di 23 (dua puluh tiga) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada di 4 (empat) urusan yakni social, pekerjaan umum dan penataan ruang, trantibumlinmas, dan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar

inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 31 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 32 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator tidak terisi. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 33 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter menunjukkan paling banyak di parameter 1.

Tabel 3. 5 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Barito Kuala

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (2%)	1. Replikasi (0%)
2. Monev Inovasi (3%)	2. Bimtek (0%)
3. Penyelesaian layanan aduan (7%)	3. Monev Inovasi (0%)
4. Kemanfaatan Inovasi (10%)	4. Sosialisasi Inovda (3%)
5. Kemudahan informasi layanan (14%)	5. Ketersediaan SDM (4%)
6. Dukungan anggaran (17%)	6. Pedoman Teknis (8%)
7. Online Sistem (19%)	7. Kualitas Inovasi daerah (17%)
8. Pedoman Teknis (21%)	8. Online Sistem (27%)
9. Program dan kegiatan pada RKPD (21%)	9. Pelaksana Inovda (27%)
10. Jejaring Inovasi (24%)	10. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (35%)
11. Penggunaan IT (26%)	11. Penggunaan IT (40%)
12. Bimtek (26%)	12. Jejaring Inovasi (50%)
13. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (34%)	13. Penyelesaian layanan aduan (50%)
14. Kualitas Inovasi daerah (41%)	14. Program dan kegiatan pada RKPD (58%)
15. Kecepatan Inovasi (43%)	

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

#### D. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 61.83 dan masuk pada kategori Sangat Inovatif. Melihat gambar 34 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat

perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan grafik 41 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar di 28 (dua puluh delapan) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada di 4 (empat) urusan yakni social, pendidikan, trantibumlinmas, dan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, Inovasi relative telah tersebar pada sebagian besar urusan daerah, namun perlu dorongan agar inovasi dapat dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pada perangkat daerah yang belum aktif dalam pelaksanaan Inovasi untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 42 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 43 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator telah terisi. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 44 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter menunjukkan paling banyak di parameter 3. Namun begitu, optimalisasi masih perlu dilakukan pada beberapa indikator keterisian dokumen dan kesesuaian bukti dukung yang masih kurang dari 60%.

Tabel 3. 7 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Pelaksana Inovda (8%)
2. Keterlibatan actor Inovasi (10%)	2. Online Sistem (12%)
3. Penyelesaian layanan aduan (18%)	3. Ketersediaan SDM (12%)
4. Program dan kegiatan pada RKPD (52%)	4. Pedoman Teknis (14%)
	5. Bimtek (27%)
	6. Jejaring Inovasi (33%)
	7. Kualitas Inovasi daerah (41%)
	8. Regulasi Inovda (44%)
	9. Sosialisasi Inovda (47%)
	10. Kemanfaatan Inovasi (48%)
	11. Replikasi (50%)
	12. Kemudahan informasi (51%)
	13. Keterlibatan actor Inovasi (56%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## E. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 9.44 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat gambar 45 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah semua variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
<b>Infrastruktur</b>	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan

		melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran</li> <li>• menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran</li> </ul>
<b>Output Pengetahuan dan teknologi</b>	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah</li> <li>• melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan</li> </ul>
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda</li> <li>• meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi</li> </ul>
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat,</li> <li>• tanggap menindaklanjuti aduan yang ada</li> <li>• menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctya sebagai bahan perbaikan</li> </ul>



		layanan
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan monev inovasi secara berkala</li> <li>• membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi</li> </ul>
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan grafik 52 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tersebar di 3 (tiga) urusan yaitu perencanaan, penanaman modal, dan fungsi penunjang lainnya dan belum ada Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagai menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, Inovasi belum tersebar pada sebagian besar urusan daerah, perlu dorongan agar inovasi dapat dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 53 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa seluruh inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 54 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa keseluruhan indikator tidak terisi. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 55 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa tidak ada bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter. Oleh karena itu optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung harus dilakukan pada semua indikator.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## F. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 27.28 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat gambar 56 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah bahwa keseluruhan variabel berada di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) bahkan ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021) yaitu Output pengetahuan dan teknologi dan kecanggihan produk. Untuk itu, optimalisasi perlu dilakukan pada keseluruhan variabel. Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
<b>Infrastruktur</b>	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran</li> <li>menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran</li> </ul>
<b>Output Pengetahuan dan</b>	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah</li> </ul>

<b>teknologi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan</li> </ul>
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda</li> <li>• meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi</li> </ul>
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkan ke masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektivitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat,</li> <li>• tanggap menindaklanjuti aduan yang ada</li> <li>• menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan</li> </ul>
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas

	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan monev inovasi secara berkala</li> <li>• membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi</li> </ul>
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarluaskan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan grafik 63 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya ada di 1 (satu) urusan kesehatan yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, Inovasi belum tersebar pada sebagian besar urusan daerah, perlu dorongan agar inovasi dapat dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 64 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa seluruh inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 65 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator telah terisi namun selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 66 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada parameter 1. Oleh karena itu optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung harus dilakukan pada semua indikator.

Tabel 3. 10 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Hulu Sungai Utara

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Sosialisasi Inovda (0%)	1. Sosialisasi Inovda (0)
2. Penyelesaian layanan aduan (0%)	2. Regulasi Inovda (0%)
3. Online Sistem (0%)	3. Program dan kegiatan pada RKPD (0%)
4. Keterlibatan actor Inovasi (0%)	4. Penyelesaian layanan aduan (0%)
5. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (0%)	5. Penggunaan IT (0%)
	6. Pelaksana Inovda (0%)
	7. Pedoman Teknis (0%)
	8. Online Sistem (0%)
	9. Monev Inovasi (0%)
	10. Kualitas Inovasi daerah (0%)
	11. Ketersediaan SDM (0%)

	12. Keterlibatan actor Inovasi (0%)
	13. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (0%)
	14. Kemudahan informasi (0%)
	15. Kemanfaatan Inovasi (0%)
	16. Jejaring Inovasi (0%)
	17. 19. Dukungan anggaran (0%)
	18. 20. Bimtek (0%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## G. KABUPATEN KOTA BARU

Kabupaten Kota Baru pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 15.20 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat gambar 67 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Kota Baru pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah seluruh variabel tidak ada yang tercapai (keseluruhannya 0%). Optimalisasi harus dilakukan pada keseluruhan variabel Inovasi daerah di Kabupaten Kota Baru dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Kota Baru Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
<b>Infrastruktur</b>	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran</li> <li>menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD</li> </ul>

		dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
<b>Output Pengetahuan dan teknologi</b>	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah</li> <li>• melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan</li> </ul>
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda</li> <li>• meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi</li> </ul>
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat,</li> <li>• tanggap menindaklanjuti aduan yang ada</li> <li>• menginventarisir seluruh aduan dan tinjunctnya sebagai bahan perbaikan layanan</li> </ul>
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan monev inovasi secara berkala</li> <li>• membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi</li> </ul>
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan grafik 74 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Kota Baru tersebar di 13 (tiga belas) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan yakni kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 75 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Kota Baru menunjukkan bahwa keseluruhan Inovasi (100%) menunjukkan kematangan rendah. Gambar 77 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa keseluruhan indikator tidak terisi (100%). Upaya pembinaan yang perlu dilakukan adalah bimtek khusus tata cara pelaporan Inovasi secara keseluruhan.

## H. KABUPATEN TABALONG

Kabupaten Tabalong pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 62.78 dan masuk pada kategori Sangat Inovatif. Melihat gambar 78 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tabalong pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% bahkan 60% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).

Berdasarkan grafik 85 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Tabalong tersebar di 19 (sembilan belas) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar tersebar di 5 (lima) urusan yakni social, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta kesehatan.. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non

pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, Inovasi relative telah tersebar pada sebagian besar urusan daerah, namun perlu dorongan agar inovasi dapat dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pada perangkat daerah yang belum aktif dalam pelaksanaan Inovasi untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 86 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi menunjukkan nilai kematangan tinggi. Gambar 87 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator telah terisi. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 88 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter menunjukkan paling banyak di parameter 3. Namun begitu, optimalisasi masih perlu dilakukan pada beberapa indikator keterisian dokumen dan kesesuaian bukti dukung yang masih kurang dari 60%.

Tabel 3. 12 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Tabalong

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (16%)	1. Replikasi (0%)
2. Keterlibatan actor Inovasi (16%)	2. Monev Inovasi (14%)
3. Penyelesaian layanan aduan (29%)	3. Online Sistem (29%)
	4. Kemudahan informasi (42%)
	5. Bimtek (54%)
	6. Ketersediaan SDM (55%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## I. KABUPATEN TANAH BUMBU

Kabupaten Tanah Bumbu pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 5.48 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat gambar 89 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanah Bumbu pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah semua variabel perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:



Tabel 3.13 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
<b>Infrastruktur</b>	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran</li> <li>• menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran</li> </ul>
<b>Output Pengetahuan dan teknologi</b>	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah</li> <li>• melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan</li> </ul>
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda</li> <li>• meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi</li> </ul>
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
<b>Kecepatan Bisnis Proses</b>	Pedoman teknis	menyusun pedoman teknis dan menyebarkannya kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses

	Kemudahan informasi layanan	memberikan informasi layanan dengan media yang paling mudah dijangkau dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat
	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	mengupayakan inovasi yang memberikan manfaat pada efisiensi dan efektifitas layanan
	Penyelesaian layanan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyosialisasikan layanan pengaduan kepada seluruh sasaran manfaat,</li> <li>• tanggap menindaklanjuti aduan yang ada</li> <li>• menginventarisir seluruh aduan dan tinjutnya sebagai bahan perbaikan layanan</li> </ul>
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi
<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan monev inovasi secara berkala</li> <li>• membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi</li> </ul>
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan grafik 96 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Tanah Bumbu hanya ada di 1 (satu) urusan yaitu komunikasi dan informatika dan belum ada Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, Inovasi belum tersebar pada sebagian besar urusan daerah, perlu dorongan agar inovasi dapat dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat

dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 97 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa seluruh inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 98 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa keseluruhan indikator tidak terisi. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 99 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa tidak ada bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter. Oleh karena itu optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung harus dilakukan pada semua indikator.

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## J. KABUPATEN TANAH LAUT

Kabupaten Tanah Laut pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 52.42 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat gambar 100 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tanah Laut pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan grafik 107 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Tanah Laut tersebar di 4 (empat) urusan yaitu pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, kesehatan, dan fungsi penunjang lainnya. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar hanya ada di 1 (satu) urusan yakni kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6(enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18(delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di

daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 108 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi sudah menunjukkan nilai kematangan tinggi. Gambar 88 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa hampir keseluruhan indikator telah terisi di atas 60% kecuali terkait replikasi dan bimtek Inovasi.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 110 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter mayoritas sdh menunjukkan paling banyak di parameter 3 namun masih dapat dioptimalkan pada beberapa indikator karena pengisian parameter 3 masih kurang dari 60%.

Tabel 3. 15 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Tanah Laut

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (50%)	1. Replikasi (0%)
2. Bimtek Inovasi (50%)	2. Monev Inovasi (0%)
	3. Pedoman Teknis (33%)
	4. Online system (33%)
	5. Kecepatan Inovasi (33%)
	6. Regulasi Inovda (50%)
	7. Kualitas Inovda (50%)
	8. Kemanfaatan Inovasi (50%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## K. KABUPATEN TAPIN

Kabupaten Tapin pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 44.68 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat gambar 111 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kabupaten Tapin pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi masih dapat dilakukan pada variabel kecanggihan produk karena masih di bawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Optimalisasi Inovasi daerah di Kabupaten Tapin berdasarkan pencapaian variabel dan indikator dapat dilakukan melalui upaya sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kabupaten Tapin Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan grafik 117 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kabupaten Tapin tersebar di 6 (enam) urusan yaitu Tenaga kerja, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, kesehatan, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar ada di 2 (dua) urusan yakni permukiman rakyat dan kawasan permukiman serta kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 118 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 119 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa mayoritas indikator telah terisi. Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 120 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter menunjukkan paling banyak di parameter 3. Namun begitu, optimalisasi masih perlu dilakukan pada beberapa indikator keterisian dokumen dan kesesuaian bukti dukung yang masih kurang dari 60%.

Tabel 3. 17 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kabupaten Tapin

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Pedoman Teknis (0%)
2. Penyelesaian layanan aduan (27%)	2. Replikasi (0%)
3. Jejaring Inovasi (27%)	3. Regulasi Inovda (0%)
4. Program dan kegiatan pada RKPD (36%)	4. Online Sistem (0%)
5. Pedoman Teknis (36%)	5. Kemudahan informasi (0%)
6. Online Sistem (36%)	6. Bimtek (0%)
7. Kemudahan Proses Inovasi yang	7. Penyelesaian layanan aduan (33%)

dihasilkan (36%)	
8. Bimtek (36%)	8. Pelaksana Inovda (38%)
9. Kemudahan informasi layanan (45%)	9. Sosialisasi Inovda (40%)
10. Monev Inovasi (46%)	10. Monev Inovasi (40%)
11. Penggunaan IT (55%)	11. Ketersediaan SDM (55%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## L. KOTA BANJARBARU

Kota Banjarbaru pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 16.71 dan masuk pada kategori Kurang Inovatif. Melihat gambar 121 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjarbaru pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Namun optimalisasi masih harus dilakukan pada beberapa indikator yaitu . Infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, hasil kreatif karena masih dibawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021)

Tabel 3. 18 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Banjarbaru Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

Variabel	Indikator	Hal-Hal Yang Perlu dilakukan
<b>Infrastruktur</b>	Regulasi Inovasi Daerah	menetapkan penerapan inovasi ke dalam regulasi daerah dengan perda atau Perkada sesuai ketentuan yang berlaku
	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	mengalokasikan SDM yang cukup dalam penerapan Inovasi
	Dukungan anggaran	koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran dan menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses penganggaran
	Penggunaan IT	penyediaan infrastruktur IT yang memadai dalam mendukung kemanfaatan inovasi
	Bimtek inovasi	melaksanakan bimtek secara berkala kepada pengelola inovasi
	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>koordinasi antar OPD dan Bappeda terkait proses perencanaan dan penganggaran</li> <li>menuangkan kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan ke dalam RKPD dan melanjutkan ke dalam proses</li> </ul>

		penganggaran
<b>Output Pengetahuan dan teknologi</b>	Keterlibatan aktor inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memetakan mitra strategis dalam kegiatan inovasi daerah</li> <li>• melakukan kolaborasi antar pemangku kepentingan</li> </ul>
	Pelaksana inovasi daerah	membentuk dan menetapkan tim pelaksana inovasi dengan keputusan kada
	Jejaring inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bersinergi dan melakukan kolaborasi internal pemda</li> <li>• meningkatkan peran bappeda melaksanakan fungsi koordinasi</li> </ul>
	Sosialisasi Inovasi Daerah	melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media yang memudahkan untuk diakses
<b>Hasil Kreatif</b>	Kemanfaatan inovasi	menyebarkan inovasi agar kemanfaatannya dapat dirasakan lebih besar atau luas
	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan monev inovasi secara berkala</li> <li>• membuka kesempatan kepada pihak luar untuk memberikan feed back atau mereview kegiatan inovasi</li> </ul>
	Kualitas inovasi daerah	menyusun rencana ataupun template pembuatan video dengan memuat semua unsur yang diminta dan menyebarkan kepada OPD sebagai pengampu kegiatan inovasi

Berdasarkan grafik 128 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Banjarbaru tersebar di 9 (sembilan) urusan. Tidak terdapat Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, Inovasi belum tersebar pada sebagian besar urusan daerah, perlu dorongan agar inovasi dapat dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi massif untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi pada semua urusan sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 129 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa seluruh inovasi menunjukkan nilai kematangan rendah. Gambar 130 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa persentase terbesar menunjukkan indikator tidak terisi. Selanjutnya

dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 131 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan persentase terbesar pada parameter 1.

Tabel 3. 19 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Banjarbaru

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (0%)	1. Replikasi (0%)
2. Regulasi Inovda (0%)	2. Regulasi Inovda (0%)
3. Kualitas Inovasi daerah (0%)	3. Pelaksana Inovda (0%)
4. Bimtek (0%)	4. Monev Inovasi (0%)
5. Program dan kegiatan pada RKPD (17%)	5. Dukungan anggaran (0%)
6. Pedoman Teknis (22%)	6. Bimtek (0%)
7. Online Sistem (44%)	7. Program dan kegiatan pada RKPD (0%)
8. Dukungan anggaran (44%)	8. Kualitas Inovasi daerah (0%)
	9. Ketersediaan SDM (0%)
	10. Kemanfaatan Inovasi (8%)
	11. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (8%)
	12. Online Sistem (13%)
	13. Keterlibatan actor Inovasi (25%)
	14. Jejaring Inovasi (33%)
	15. Sosialisasi Inovda (33%)
	16. Kemudahan informasi (50%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

## M. KOTA BANJARMASIN

Kota Banjarmasin pada Indeks Inovasi Daerah 2021 mendapat hasil 37.85 dan masuk pada kategori Inovatif. Melihat gambar 132 Diagram Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah pada Kota Banjarmasin pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa didapatkan hasil dari satuan Inovasi daerah tidak ada variabel yang perlu mendapat perhatian khusus karena berada di bawah 30% (Standar 30% sebagai kategori kurang dipakai mengikuti standar skor dan predikat kurang inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021). Namun optimalisasi masih harus dilakukan pada indikator kecanggihan produk, karena masih dibawah 60% (Standar 60% sebagai kategori cukup dipakai mengikuti standar skor dan predikat inovatif pada penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021).



Tabel 3. 20 Optimalisasi Inovasi Daerah di Kota Banjarmasin Berdasarkan Capaian Variabel Ukur Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021

	Indikator	Hal-Hal yang Perlu dilakukan
<b>Kecanggihan produk</b>	Online sistem	mendorong Inovasi-inovasi digital sesuai amanat Perpres SPBE
	Replikasi	aktif mendesiminasikan inovasi-inovasi yang berhasil agar dapat direplikasi oleh daerah lain
	Kecepatan penciptaan inovasi	mengupayakan pembuatan inovasi yang membutuhkan proses cepat dengan tingkat manfaat tinggi

Berdasarkan grafik 139 pada bab sebelumnya tentang sebaran Inovasi daerah berdasarkan urusan, Inovasi di Kota Banjarmasin tersebar di 16 (enam belas) urusan. Inovasi pada urusan wajib pelayanan dasar meliputi 3 (tiga) urusan yaitu perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibumlinmas, dan kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan terbagi menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, dan 6 (enam) urusan penunjang. Berdasarkan hal tersebut, masih perlu dorongan agar inovasi dapat massif dilakukan pada semua urusan di daerah terutama pada urusan wajib pelayanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi pada perangkat daerah yang belum aktif dalam pelaksanaan Inovasi untuk memberikan pemahaman akan perlunya Inovasi sebagai sarana untuk dapat meningkatkan pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat, mengadakan ajang kompetisi antar perangkat daerah untuk mendorong perangkat daerah melakukan Inovasi, dan memberikan reward pada perangkat daerah yang telah melakukan Inovasi.

Berdasarkan gambar 140 Diagram Persentase Inovasi berdasarkan Tingkat Skor Kematangan di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa persentase terbanyak inovasi menunjukkan nilai kematangan sedang. Gambar 141 Grafik Tingkat Keterisian Data Pendukung dalam Indeks Inovasi Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tersedia dokumen pendukungnya. Masih diperlukan optimalisasi ketersediaan dokumen pendukung dari indikator yang belum mencapai 60%.

Selanjutnya dari bukti dukung yang diberikan, Gambar 142 Grafik Tingkat Keterisian Parameter dalam Indikator Satuan Inovasi Daerah menunjukkan bahwa bukti dukung yang dilampirkan dalam pengisian parameter presentase terbesar menunjukkan pengisian pada parameter 3.

Tabel 3. 21 Kebutuhan Optimalisasi Keterisian dan Kesesuaian Bukti Dukung Kota Banjarmasin

Keterisian Dokumen di bawah 60%	Kesesuaian Bukti Dukung Pada Parameter 3 dibawah 60%
1. Replikasi (2%)	1. Replikasi (0%)
2. Kecepatan Inovasi (24%)	2. Monev Inovasi (0%)
3. Ketersediaan SDM (37%)	3. Bimtek (2%)
4. Kemanfaatan Inovasi (43%)	4. Pedoman Teknis (4%)
5. Kualitas Inovasi daerah (46%)	5. Online Sistem (6%)
	6. Kecepatan Inovasi (15%)
	7. Program dan kegiatan pada RKPD (21%)
	8. Regulasi Inovda (30%)
	9. Penggunaan IT (32%)

	10. Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan (40%)
	11. Jejaring Inovasi (46%)
	12. Kemudahan informasi (51%)
	13. Ketersediaan SDM (55%)
	14. Pelaksana Inovda (56%)
	15. Sosialisasi Inovda (58%)
	16. Keterlibatan actor Inovasi (59%)

Optimalisasi keterisian dan kesesuaian bukti dukung dapat dilakukan melalui pendalaman pedoman teknis penginputan IID oleh admin/ operator perangkat daerah, melakukan konsinyering dalam rangka penginputan bukti dukung IID, koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.